BALAIRUNG

Bunga Rampai

Mengalir dari Manfaat sampai Sekelumit Masalah

EDISI 01/TH. MMX/2020

"Cambuk dan Rantai"
Oleh Iksaka Banu

KONTRIBUSI TULISAN YUK!

SASTRA | OPINI | RESENSI FILM ATAU BUKU

Tulisan yang dapat dikirimkan:

SASTRA (1400-2500 kata)

OPINI (1000-1200 kata)

RESENSI (1200-1500 kata)

Kirim naskah ke balairungpress@gmail.com dengan subjek Kontribusi_Nama Rubrik

Selamat datang mahasiswa biasa di kampus yang biasa-biasa saja!

Yuk, ikut kontribusi tulisan di BPPM Balairung UGM! Kontributor terpilih akan mendapatkan honorarium!

Ketentuan lebih lanjut kunjungi:
balairungpress.com/kontribusi

@bppmbalairung | /bppmbalairungugm | @bppmbalairung | @GSJ9240C | /balairungpress.com

selamat datang mahasiswa biasa di kampus yang biasa-biasa saja

Melihat situasi yang tak kunjung pasti karena wabah pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19), akhirnya Balairung memutuskan untuk mengalihkan pengerjaan produk Majalah Edisi 56/TH. MMXX/2020 ke produk alternatif, yaitu Bunga Rampai. Mengingat dalam keadaan *physical distancing*, seluruh pengerjaan dilakukan secara daring. Jika tetap melanjutkan produksi majalah, maka proses penggarapan mulai dari pengumpulan data, penulisan, hingga penyuntingan tidaklah menjanjikan. Terlebih lagi pada rubrik-rubrik tematik Redaksi. Bedanya dengan majalah, ruang lingkup Bunga Rampai lebih umum atau tidak terbatas pada lingkup D.I. Yogyakarta saja. Selain itu, tulisan yang disajikan di dalam majalah bersifat jurnalistik, sedangkan tulisan yang disajikan di dalam bunga rampai bersifat ilmiah populer.

Setelah melalui berbagai tahap pemilihan tema, kami sepakat bahwa persoalan sistem manajemen air patut diangkat. Hal itu dilatarbelakangi oleh adanya kejanggalan dalam pengelolaan sistem manajemen sumber daya air. Pengelolaan air yang seharusnya adil seringkali masih rumpang sana-sini. Campur tangan negara dan swasta dalam pengelolaan air juga menuai banyak problematika. Peran utama air yang memiliki fungsi ekologis kerap kali diabaikan dalam proses pengelolaan air. Akibatnya, air yang menjadi bagian fundamental dari kehidupan kerap menjadi masalah. Sebut saja krisis air bersih, kekeringan, dan krisis air di wilayah mata air.

Berbagai kendala dalam proses penggarapan Bunga Rampai seringkali muncul, tetapi tidak menjadi penghalang dan kami bisa melaluinya. Berkat kerja sama antara empat divisi; Redaksi, Penelitian dan Pengembangan (Litbang), Produksi dan Artistik (PdA), dan Perusahaan, akhirnya Bunga Rampai edisi pertama ini dapat rampung dan terdistribusi.

Bunga Rampai ini berisi tiga rubrik tematik; dua Kajian, lima Ilmiah Populer dan Insan Wawasan. Dua artikel Kajian mengulas tentang keadilan air serta dampak strategi Air Minum dalam Kemasan (AMDK) terhadap lingkungan. Sedangkan, lima artikel Ilmiah Populer mengupas kasus-kasus yang berkaitan dengan polemik sistem manajemen air. Di antaranya; kasus terancamnya Pegunungan Kendeng Utara sebagai sumber air oleh adanya pabrik semen, komparasi pengelolaan air antara Jakarta dan Belanda, dan krisis air di wilayah mata air akibat korporasi air minum. Dua artikel lainnya membahas pengelolaan air berbasis kearifan lokal yaitu manajemen air Subak dan Kasepuhan Ciptagelar. Sementara Insan Wawasan akan memberikan analisis pemenuhan hak atas air dalam kacamata hukum. Selain rubrik tematik, artikel-artikel non-tematik lainnya juga mengusung topik-topik yang relevan dengan situasi hari-hari ini.

Melalui Bunga Rampai Edisi 01 ini, Balairung berupaya menggugah nalar kritis pembaca, khususnya mahasiswa untuk peka terhadap isu-isu yang berlangsung di sekelilingnya. Balairung berharap Bunga Rampai ini dapat membantu pembaca untuk mulai menentukan keberpihakannya. Segala saran dan kritik yang membangun sangatlah kami terima sebagai acuan yang lebih baik di hari esok.

Selamat membaca, semoga selalu diberi kewarasan dan kelapangan untuk peduli.

Alamat Redaksi, Sirkulasi, Iklan dan Promosi
Kompleks Perumahan Dosen UGM, Bulaksumur B-21, Kec. Depok
Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, Indonesia

 @bppmbalairung /bppmbalairungugm @bppmbalairung @GSJ9240C /balairungpress.com /jurnal.ugm.ac.id/balairung

DAFTAR ISI

Mengalir dari Manfaat sampai Sekelumit Masalah

© Estri/BAL

". . . sebuah proses yang terjadi di antara umat manusia dengan alam, di mana manusia—melalui tindakan-tindakannya—menengahi, mengatur, dan menguasai metabolisme di antara dirinya dengan alam. Ia menggerakkan daya yang ada di dalam tubuh, lengan, kaki, kepala, dan tangannya untuk membentuk materi yang disediakan alam agar sesuai dengan keperluannya. Melalui proses ini ia menggerakkan dan mengubah dunia di luar dirinya, namun di saat yang bersamaan juga mengubah apa yang ada di dalam dirinya."
(Karl Marx)

Saat masih hidup dengan cara berburu dan meramu, manusia hidup dalam kelompok kecil, tinggal di dalam goa agar terhindar dari serangan binatang buas, dan selalu berpindah-pindah tempat. Apabila sumber makanan di wilayah yang ditempati sudah mulai menipis, manusia akan pindah mencari tempat-tempat yang dinilai memiliki cukup sumber daya makanan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup kelompok.

Memasuki era mesolitikum, seiring dengan punahnya mamalia besar, manusia mulai hidup dengan cara bercocok tanam dan tinggal secara menetap. Manusia yang sebelumnya hanya bergantung penuh pada alam, pada tahap ini sudah mulai menciptakan infrastruktur sederhana untuk bisa memanfaatkan potensi alam secara lebih optimal. Sumur, saluran air, dan kanal sederhana mulai dibangun untuk mengairi sawah yang ada saat itu. Pada tahap inilah, manusia mulai melakukan pengelolaan atas air.

Pengelolaan atas air menandai perubahan yang signifikan dalam peradaban manusia. Peradaban awal manusia tumbuh dan berkembang di sekitar sumber air. Sistem irigasi pertama ditemukan di pinggiran sungai Nil, Indus, dan Eufrat. Air, yang mulanya diakses manusia secara bebas saat masih berburu dan meramu, kini mulai memasuki tahap distribusi demi perkembangan ekonomi daerah agraria. Pembagian ini mendorong munculnya birokrasi dan konsentrasi kekuasaan di tangan negara dan para pejabat. Karl Wittfogel, dalam karya seminalnya berjudul *Oriental Despotism* mencatat, lewat perkembangan ekonomi dan pendistribusian air inilah elite-elite peradaban awal manusia memperoleh kekuasaannya.[1]

Seiring bertambahnya jumlah manusia dan penemuan teknologi, pengelolaan air juga mengalami perkembangan. Air mulai dikelola dengan teknologi-teknologi yang mensyaratkan pengetahuan khusus dan tenaga kerja manusia untuk mengoperasikannya. Revolusi industri di Eropa menjadi fase penting dalam perkembangan pengelolaan air. Penemuan mesin uap pada saat itu mendorong penggunaan turbin untuk pembangkit listrik tenaga air. Selanjutnya, pada akhir abad kedua puluh, pembangunan bendungan dan waduk raksasa

yang dibarengi investasi negara dan swasta telah menandai masa transisi menuju pengelolaan daerah aliran sungai dan organisasi kelembagaan lintas batas—yang saat ini menjadi cetak biru pengelolaan air dalam skala lokal maupun global.[2]

Air merupakan sumber daya paling penting di bumi karena manusia membutuhkannya secara biologis dan tidak dapat disubstitusi dengan alternatif lain. Kita membutuhkan air agar dapat bertahan hidup. 70% permukaan bumi terdiri atas air, namun hanya 2.5% saja yang merupakan air tawar. Sejumlah kecil air itulah yang kini digunakan manusia untuk berbagai kebutuhan seperti pertanian, industri, pembangunan, hingga domestik.[3]

Pemanfaatan atas air yang berbeda-beda itu ternyata membawa manusia pada satu masalah serius, yakni krisis air. 785 juta orang tidak memiliki akses atas air bersih dan satu juta orang meninggal setiap tahunnya akibat kekurangan air.[4] Artinya, terdapat distribusi yang tidak merata serta ketidaksetaraan akses terhadap air yang jumlahnya terbatas. Air mulai dibendung, disalurkan melalui pipa, tercemar dan terkontaminasi, yang pada akhirnya menyebabkan sebagian orang memperoleh air, sementara sebagian lagi tidak.

Kondisi ini sebetulnya mencerminkan bahwa ada upaya pengendalian dan privatisasi terhadap sumber-sumber air. Meningkatnya komodifikasi terhadap air menandakan bahwa air kini diberi nilai ekonomis yang sepenuhnya diatur oleh mekanisme pasar. Akibatnya, orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan semakin tidak bisa mengakses air. Permukiman kumuh yang berkembang di kota-kota besar, misalnya, sering tidak memiliki air atau sanitasi sama sekali. Jutaan penduduk miskin kota hidup tanpa akses ke pasokan air kota, meskipun pada kenyataannya mereka tinggal dekat dengan sumber air. Mereka membayar harga yang sangat tinggi untuk air, yang seringkali diperoleh secara ilegal, di berbagai kota besar seperti Cape Town, Dhaka, Mumbai, Lima, hingga Jakarta. Air menjadi barang rebutan yang tidak bisa diperoleh begitu saja. Hanya yang memiliki kuasa dan modal yang memiliki kontrol dan akses terhadap air.

Dalam kondisi seperti itu, sebagian kecil manusia makin berkuasa atas air, sementara sebagian lagi secara perlahan dipisahkan dari air. Padahal, hubungan air dan manusia adalah hubungan yang dialektis. Air mengalir melalui ruang dan waktu tertentu yang dibentuk oleh hubungan tak terpisahkan dengan manusia, yang pada akhirnya akan menentukan mode kontrol, pengelolaan, dan pengetahuan manusia terhadap air.[5]

Umat Hindu di India, misalnya, masih tetap memanfaatkan air Sungai Gangga yang sangat tercemar karena mereka percaya bahwa air sungai itu memiliki kekuatan penyembuhan. Kondisi ini tidaklah mencerminkan seperangkat nilai kebudayaan yang abai begitu saja terhadap fakta ilmiah, tetapi menggambarkan bahwa pemahaman terhadap air dibentuk dari proses yang panjang dan spesifik. Ini justru mencerminkan bahwa manusia dan air tidak hanya terhubung secara material, melainkan juga terhubung secara kultural. Keterhubungan ini terjadi karena air mendapatkan maknanya dari nilai-nilai dalam kehidupan sosial yang berlangsung di sekelilingnya, sementara interaksi manusia dengan air yang sudah dimaknai itu akan turut pula menciptakan identitas dan imajinasi manusia.[6]

Maka, apabila sepakat dengan kutipan Marx di awal, alam dan manusia sejatinya tidaklah terpisah. Kehidupan fisik dan kesadaran manusia bergantung dari alam fisik di sekitarnya. Manusia seharusnya senantiasa 'berdialog' dengan alam agar dapat bertahan hidup. Mengatakan kehidupan fisik dan mental manusia terhubung dengan alam, berarti sama dengan mengatakan bahwa alam terhubung dengan dirinya sendiri, karena manusia adalah bagian dari alam. Dengan kata lain, hubungan manusia dengan alam bukanlah sebuah hubungan pertukaran, melainkan suatu kesatuan.[7]

Dalam kemenyatuan tak terpisahkan itulah kita perlu lebih berhati-hati lagi dalam melakukan pengelolaan terhadap sumber daya alam. Dalam konteks air, pengelolaan yang berkeadilan dan berkelanjutan mutlak diperlukan. Pengelolaan atas air harus selalu mempertimbangkan kelestarian air dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas, bukan tunduk pada kepentingan modal segelintir pihak. Sudah sejak awal peradaban manusia, air telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia itu sendiri. Mengikuti apa yang dikatakan Vandana Shiva, kita tidak hanya sebatas memiliki hak atas air; melainkan kita memiliki tanggung jawab terhadap air, yakni dengan aktif terlibat dalam upaya merawat keberlangsungan dan kelestarian air.[8]

Akhir kata, selamat membaca dan mengarungi samudera! **[Redaksi]**

Catatan Akhir

[1] Karl Wittfogel, *Oriental Despotism: A Comparative Study of Total Power* (New Haven and London: Yale University Press, 1963), 27.
[2] Fekri Hassan, *Water History for Our Times* (Paris: UNESCO, 2011), 25.
[3] Farhana Sultana, "Water justice: why it matters and how to achieve it," *Water International* 43, 4 (2018): 1.
[4] Water.org, "The Global Water Crisis," https://water.org/our-impact/water-crisis/global-water-crisis/ diakses pada 20 Mei 2020.
[5] Jamie Linton dan Jessica Budds, "The hydrosocial cycle: Defining and mobilizing a relational-dialectical approach to water," *Geoforum* 57 (2014): 4.
[6] Jamie Linton dan Jessica Budds, "The hydrosocial cycle," 4.
[7] Dalam bahasa Vandana Shiva, hal ini disebut sebagai kebudayaan air (*water culture*); yakni sebuah kesadaran atas air, kesadaran bahwa manusia 'terbenam' (*immersed*) dalam siklus air, kesadaran bahwa manusia terdiri dari 70 persen air, kesadaran bahwa bumi terdiri dari 70 persen air, dan kesadaran untuk terus berupaya menjaga keseimbangan air tidak terganggu. Vandana Shiva, "FROM WATER CRISIS TO WATER CULTURE," *Cultural Studies* 22, 3–4 (2008): 500.
[8] Vandana Shiva," FROM WATER CRISIS TO WATER CULTURE," 507.

Akses Air Pegunungan Kendeng Tersendat Semen

© Estri/BAL
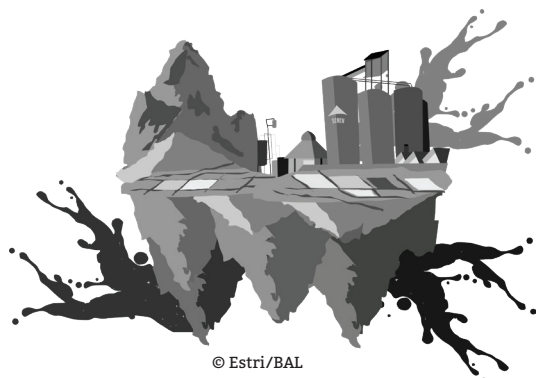
Air menjadi hal penting bagi kehidupan masyarakat Pegunungan Kendeng untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Dalam upayanya mendapatkan akses air, mereka menjumpai sejumlah halangan, salah satunya ialah pabrik semen.

Air merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam menunjang kebutuhan hidup, masyarakat Kendeng sangatlah bergantung pada kekayaan air dari pegunungan. Namun, kini mereka khawatir akan krisis air yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Sebab kekayaan air pegunungan yang melimpah itu terancam mengalami degradasi.

Pegunungan Kendeng membentang sepanjang 250 km dari Pati sampai Lamongan. Kawasan seluas 275.581 ha ini mencakup tujuh kabupaten serta dua provinsi, yaitu Pati, Grobogan, Rembang, dan Blora di Jawa Tengah serta Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan di Jawa Timur.[1] Sejak dulu, masyarakat memanfaatkan mata air untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini terkait dengan fungsi hidrologis Pegunungan Kendeng sebagai regulator alamiah untuk meresapkan, mengalirkan, dan mengeluarkan air hujan menjadi mata air.[2]

Secara fisiologis, Pegunungan Kendeng merupakan perbukitan karst yang memiliki lapisan permukaan berupa batu gamping. Karakteristik batu gamping yang khas membuat air hujan tidak selalu mengalir di permukaan, melainkan masuk ke dalam tanah melalui lubang-lubang yang disebut porus. Hal ini menjadikan Pegunungan Kendeng menyimpan kandungan air bawah tanah yang melimpah.

Air yang masuk ke dalam tanah akan membentuk suatu sistem sungai bawah tanah yang searah dengan daerah aliran sungai di atasnya. Sungai bawah tanah tersebut pada umumnya menghasilkan mata air dengan debit yang cukup besar. Selain itu, kandungan air juga tersimpan dalam kantong air raksasa yang disebut Cekungan Air Tanah (CAT).

Pegunungan Kendeng memiliki salah satu CAT yang cukup terkenal, yaitu CAT Watuputih di Gunem, Rembang. Berdasarkan hasil pendataan, pada tahun 2014 terdapat sekitar 109 mata air yang berada di kawasan CAT Watuputih.[3] Mata air itu kebanyakan mampu memancarkan air sepanjang tahun dengan debit yang relatif konstan, sehingga fenomena kekeringan jarang dijumpai.[4]

Secara umum, mata air yang tersebar di seluruh Pegunungan Kendeng terkonsentrasi di kawasan bentang alam karst Sukolilo di Pati, CAT Watuputih di Rembang, dan wilayah karst di Tuban. Hal ini menjadikan ketiga kabupaten tersebut memiliki jumlah mata air terbanyak di kawasan Pegunungan Kendeng.

Keberadaan Pegunungan Kendeng sebagai sumber daya air semakin penting di tengah curah hujan kawasan tersebut yang relatif rendah. Berdasarkan hasil pengukuran Dinas Pekerjaan Umum, pada tahun 2017, rata-rata curah hujan di Pegunungan Kendeng Utara untuk periode 1995–2015 adalah sebesar 1.630 mm/tahun.[5] Angka ini lebih kecil dari curah hujan di Pegunungan utara Pulau Jawa yang secara umum mencapai 2.000 mm/tahun. Curah hujan yang rendah membuat wilayah di sekitar Pegunungan Kendeng rentan mengalami krisis air.

Meski terancam krisis air, sumber air dari Pegunungan Kendeng cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun pertanian masyarakat setempat. Mata air mampu mengairi lahan pertanian dengan luas 49.596 ha melalui saluran irigasi yang hampir tidak pernah kering. Bahkan memungkinkan petani untuk melakukan panen hingga tiga kali dalam setahun. Di samping itu, PDAM turut memanfaatkan sumber daya air dengan menggali sejumlah sumur bor di kawasan Rembang dan Tuban.

Kekayaan air yang melimpah di kawasan Pegunungan Kendeng dikelola dengan kearifan lokal oleh masyarakat Sedulur Sikep. Sedulur Sikep merupakan masyarakat Jawa yang pada umumnya menganut ajaran Saminisme, yang dicetuskan oleh Samin Surosentiko.[6] Saminisme mewajibkan masyarakat untuk menaati tata cara tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.[7] Saminisme ini menjadi landasan masyarakat Kendeng dalam menjaga kelestarian alam, termasuk mengelola air. Mereka berusaha untuk menjaga hubungan dengan alam tanpa mengeksploitasi alam. Mereka memanfaatkan alam sebatas untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sedulur Sikep meyakini eksploitasi alam akan menimbulkan dampak buruk yang merugikan. "*Dulur-dulur* memandang Gunung Kendeng sebagai sosok yang dihormati dan dijaga layaknya keluarga," kata Gunarti, salah satu tokoh masyarakat Sedulur Sikep. Gunarti juga menambahkan bahwa alam telah menjaga kehidupan masyarakat selama ini. Oleh karena itu, masyarakat juga harus menjaga alam.

Kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun itu menemui tantangan ketika perusahaan semen tertarik mendirikan pabrik di kawasan Pegunungan Kendeng. Rencana ini terkait dengan karakteristik batu gamping yang amat cocok untuk bahan dasar pembuatan semen. Sementara itu, masyarakat setempat menilai bahwa keberadaan pabrik semen tidak sesuai dengan kearifan lokal. Selain itu, keberadaan pabrik semen juga dapat mengancam pertanian yang merupakan sumber penghidupan masyarakat setempat. "Aksi tolak yang dilakukan masyarakat Samin itu sangat dipengaruhi oleh pandangan hidup masyarakat," menurut salah satu masyarakat Samin.[8]

Dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tahap I, disebutkan bahwa CAT Watuputih dan sekitarnya merupakan satu kesatuan yang perlu ditetapkan sebagai kawasan lindung.[9] Hasil kajian tersebut juga memprediksi apabila kegiatan tambang tetap berlangsung di CAT Watuputih, maka akan menimbulkan kerugian setara 2,2 triliun rupiah per tahun. Hal ini timbul akibat kerusakan pada sumber daya air untuk lahan pertanian dan rumah tangga.

Aktivitas pertambangan menyebabkan terjadinya perubahan morfologi kawasan karst Pegunungan Watuputih.[10] Akibatnya adalah degradasi jumlah air yang tersimpan di CAT Watuputih, sehingga terjadi perubahan komposisi aliran dasar dibanding aliran total.[11] "Keberadaan pabrik semen ini dapat mempercepat banjir dan menyebabkan kekurangan air, karena kawasan serapan sudah tidak ada," jelas Gunretno, salah satu tokoh masyarakat adat Kendeng.

Pernyataan Gunretno dipertegas oleh hasil analisis citra dan peta rupabumi yang dilakukan oleh Petrasa Wacana, dkk. Menurut analisis itu, perubahan morfologi tersebut berpotensi mengurangi resapan air yang akan memberi pasokan air ke Bengawan Solo, Lusi, dan Tuyuhan.[12] Hal tersebut menimbulkan potensi banjir yang lebih tinggi setiap tahunnya karena hilangnya fungsi resapan air.[13]

Berdasarkan KLHS tahap II, ditemukan permasalahan turunnya daya dukung lingkungan, khususnya air. Hal itu merupakan akibat dari terancamnya pasokan air untuk keperluan masyarakat setempat dan pertanian. Selain itu, berdampak juga pada produksi pertanian dan kesejahteraan petani, akibat dari kelangkaan air. Masalah ini juga berkesinambungan dengan keberlangsungan kehidupan para petani.

Kajian tersebut juga menemukan bahwa jasa ekosistem Pegunungan Kendeng akan mengalami degradasi yang lebih besar. Temuan ini tecermin dalam keberlangsungan pasokan air, keanekaragaman hayati, dan kenyamanan lingkungan. Degradasi ini juga dapat dilihat dari intensitas risiko bencana.

Ancaman terhadap kelestarian sumber daya air telah mendorong perlawanan masyarakat setempat yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK). Perlawanan ini bermula ketika PT Semen Gresik berencana mendirikan pabrik di Sukolilo, Pati pada tahun 2006. Setelah melalui serangkaian proses peradilan, akhirnya JMPPK berhasil menang di PTUN Semarang dan Mahkamah Agung pada tahun 2009. Sejak saat itu, PT Semen Gresik yang kemudian berganti nama menjadi PT Semen Indonesia mengalihkan sasaran mereka menuju Gunem, Rembang. Setelah mendapatkan izin kelayakan lingkungan pada tahun 2012, PT Semen Indonesia mulai membangun tapak pabrik. Langkah ini memantik perlawanan yang lebih keras dari masyarakat setempat, terlebih Gunem mencakup kawasan CAT Watuputih yang kaya akan mata air.

Selanjutnya, perjuangan petani Kendeng berlanjut ke tingkat nasional melalui aksi mengecor kaki di depan Istana Negara sampai dialog dengan Presiden. Sebagai hasilnya, pada Desember 2017 KLHS merekomendasikan agar CAT Watuputih ditetapkan sebagai kawasan lindung, serta program rehabilitasi lingkungan dan tata kelola lingkungan untuk Pegunungan Kendeng Utara ditempatkan sebagai prioritas.[14] Namun, sampai sekarang sikap pemerintah daerah maupun pusat masih belum jelas. Alih-alih menjadikan CAT Watuputih sebagai kawasan lindung, pemerintah justru mendukung pembangunan pabrik semen di Rembang yang akhirnya mulai beroperasi pada tahun 2017.

Selain itu, ancaman lain datang dari PT Sahabat Mulia Sakti, anak perusahaan PT Indocement yang mengincar kawasan Kayen dan Tambakromo, Pati sejak tahun 2010. Sekalipun menerima penolakan, izin kelayakan lingkungan berhasil dikantongi oleh PT Sahabat Mulia Sakti. Masih adanya perusahaan semen yang mengincar kawasan Kendeng mengindikasikan bahwa perjuangan Sedulur Sikep belum berakhir. Sampai hari ini, mereka masih konsisten melakukan perlawanan melalui serangkaian aksi, advokasi, hingga dialog dengan para elite.

Gunretno menyebut bahwa para petani Kendeng akan terus menuntut agar pemerintah konsekuen melaksanakan rekomendasi KLHS. Menurutnya, keuntungan pabrik semen tidak sebanding dengan ancaman kerusakan ekologi yang akan terjadi pada Pegunungan Kendeng, khususnya dalam hal sumber daya air. "Manusia bisa hidup tanpa semen, tapi tidak bisa hidup tanpa air," tegasnya. **[Revan dan Salwa]**

---

[1] Kantor Staf Presiden dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kebijakan Pemanfaatan dan Pengelolaan Pegunungan Kendeng yang Berkelanjutan Tahap II*. (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017): I-1.
[2] Kantor Staf Presiden dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kebijakan Pemanfaatan dan Pengelolaan Pegunungan Kendeng yang Berkelanjutan Tahap II*, III-71.
[3] Petrasa Wacana, dkk. "Kajian Potensi Kawasan Karst Kendeng Utara Pegunungan Rembang Madura Kabupaten Rembang, Jawa Tengah", *Prosiding Seminar Nasional Kebumian ke-7*, 48.
[4] Kantor Staf Presiden dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kebijakan Pemanfaatan dan Pengelolaan Pegunungan Kendeng yang Berkelanjutan Tahap I*. (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017): III-39.
[5] Kantor Staf Presiden dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tahap I," II-33.
[6] Anif Sukmawati, dkk. *Pengelolaan Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal Sedulur Sikep di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati untuk Konservasi Berkelanjutan*. Skripsi. (Solo:Universitas Sebelas Maret, 2015): 3.
[7] Anif Sukmawati, dkk. *Pengelolaan Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal Sedulur Sikep di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati untuk Konservasi Berkelanjutan*, 3.
[8] Rini Darmastuti, dkk. "Gethok Tular, Pola Komunikasi Gerakan Sosial Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Samin di Sukolilo," *Jurnal Aspikom* 3, 1 (2016): 109.
[9] Kantor Staf Presiden dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tahap I," III-8.
[10] Petrasa Wacana, dkk. "Kajian Potensi Kawasan Karst Kendeng Utara Pegunungan Rembang Madura Kabupaten Rembang, Jawa Tengah," 48.
[11] Petrasa Wacana, dkk. "Kajian Potensi Kawasan Karst Kendeng Utara Pegunungan Rembang Madura Kabupaten Rembang, Jawa Tengah," 51.
[12] Petrasa Wacana, dkk. "Kajian Potensi Kawasan Karst Kendeng Utara Pegunungan Rembang Madura Kabupaten Rembang, Jawa Tengah," 53.
[13] Petrasa Wacana, dkk. "Kajian Potensi Kawasan Karst Kendeng Utara Pegunungan Rembang Madura Kabupaten Rembang, Jawa Tengah," 53.
[14] Kantor Staf Presiden dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tahap II*, IV-173--IV-174.

Komparasi Manajemen Air antara Jakarta dan Belanda, Apakah Relevan?

© Inggrid/BAL

Sistem manajemen air dan keberhasilan mengatasi permasalahan air di Belanda dipengaruhi oleh kebijakan dan inovasi teknologi oleh *Rijkswaterstaat* (Direktorat Jenderal Pekerjaan Umum dan Manajemen Air Belanda).[1] Berdasarkan sejarahnya, air menjadi ancaman bagi Belanda karena dua hal. *Pertama*, tenggelamnya daratan dan naiknya permukaan laut menciptakan masalah dalam upaya pengeringan kelebihan air di permukaan. *Kedua*, intensifnya luapan air sungai karena Belanda terletak di bawah permukaan laut.

Pada tahun 1980-an, *Rijkswaterstaat* mengalami reformasi terintegrasi yang terdiri dari kelompok individu yang kompeten dalam bidang manajemen air, seperti ahli biologi, perencana, pakar perilaku, hingga insinyur. Kehadiran mereka lantas membawa budaya baru dalam *Rijkswaterstaat* yang lebih fleksibel, sebab permasalahan lingkungan menjadi fokus utama. Kesuksesan *Rijkswaterstaat* juga dikendarai oleh pelibatan kelompok-kelompok sosial non-pemerintah dalam proses desain, pengambilan keputusan, dan eksekusi. Selain itu, reformasi juga terjadi dalam kondisi sosial yang kondusif. *Pertama*, implementasi kebijakan yang baik pada tingkat lokal. *Kedua*, pemilihan pemimpin yang kompeten. *Ketiga*, hadirnya respon kritis masyarakat terhadap kelalaian *Rijkswaterstaat*. Semua hal ini kemudian menjadi pondasi *Rijkswaterstaat* sebagai sebuah lembaga krusial yang mempunyai integritas tinggi.

Menurut Rachmad Jayadi, dosen Teknik Sipil UGM, Belanda menerapkan dua hal penting dalam sistem manajemen air, yaitu pembangunan berkelanjutan dan manajemen air yang menyeluruh dan terintegrasi. Kedua prinsip tersebut menjadi dasar bagi Belanda untuk mengantisipasi risiko bencana banjir akibat penurunan tanah yang berlangsung terus-menerus dan meningkatnya potensi hujan ekstrem akibat perubahan iklim.

Sistem polder adalah suatu cara penanganan banjir dengan bangunan fisik yang meliputi sistem drainase, kolam retensi, tanggul yang mengelilingi kawasan, serta pompa dan pintu air sebagai satu kesatuan pengelolaan tata air tak terpisahkan.[2] Pada zaman pertengahan, salah satu instalasi paling penting di Belanda adalah polder, sebuah area yang terletak di dataran rendah yang direklamasi dari badan air dan dilindungi oleh tanggul penahan banjir. Pada tanggul, berdiri kincir angin yang memompa air dari polder menuju ke kanal. Saat saat air surut, kelebihan air di kanal akan mengalir ke laut. Sementara itu, saat air pasang, sistem penguncian pintu air mencegah air masuk kembali ke dalam sistem saluran. Sistemnya sangat sulit untuk dibangun, pembiayaan guna pemeliharaan mahal, dan membutuhkan tenaga dan modal yang cukup setiap saat.[3] Untuk membiayai pemeliharaan dan ekspansi sistem manajemen air, pajak ditarik dari semua penghuni polder dan pemilik tanah sesuai dengan ukuran properti mereka dalam polder. Seiring

perkembangan zaman, beberapa polder yang lebih kecil disatukan untuk membentuk polder yang lebih besar dan lebih terproteksi. Beberapa polder yang lebih lebar, dibangun antara abad ke-16 dan 17, dibiayai oleh pedagang pemilik modal.[4]

Hubungan antara Indonesia dan Belanda tentu tidak dapat lepas dari konteks sejarah kolonialisasi. Teknologi peninggalan masa pendudukan dahulu merupakan alat untuk memperoleh keuntungan material di tanah jajahan. Selain itu, pertumbuhan penduduk yang terjadi pada awal abad ke-18 menimbulkan isu minimnya lahan pemukiman, serta kurangnya pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana perkotaan.[5] Oleh sebab itu, topik komparasi sistem manajemen air Belanda dan Jakarta tidak hanya berangkat dari kemiripan kondisi fisik dan refleksi Belanda sebagai salah satu negara paling sukses dalam pengelolaan sistem perairan mereka saja. Namun, topik tersebut berangkat pula dari pendudukan Belanda di Indonesia, sehingga mengakibatkan teknologi di Jakarta tidak dapat diimplementasikan karena berbagai alasan nonteknis.

Selain penjajahan memunculkan pemindahan sumber daya manusia ataupun tata ruang yang tidak teratur dan timpang, Anderson menjelaskan bahwa pascakolonialisme juga bukan berarti akhir dari sebuah tindak kolonialisme.[6] Menurut Anderson, globalisasi teknologi merupakan suatu hal yang problematis, karena perkembangan teknologi secara merata dan mendunia terjadi pada landasan dan praktik yang hegemonis. Selain itu, dijelaskan pula bahwa implementasi pengembangan teknologi masih beroperasi pada dikotomi berorientasi superior dan inferior, negara dunia satu dan negara dunia tiga, maju dan terbelakang.

Permasalahan dan dilema manajemen air di wilayah Jakarta yang ditekel secara kritis dalam artikel *Water quality trend assessment in Jakarta: A rapidly growing Asian megacity*. Dalam artikel tersebut, Luo P., dkk, berargumen bahwa fenomena urbanisasi dan kurangnya selokan—sebagai saluran dan penampung air terutama saat hujan—telah meninggalkan air di Jakarta dalam kondisi yang sangat berpolusi.[7] Pembangunan pusat perbelanjaan dan bangunan komersial setidaknya terjadi dalam lima kawasan hijau di Jakarta pada rentang tahun antara 1985–2005. Selain itu, sebagai konsekuensi atas menyebarnya pertumbuhan populasi di Jakarta, kebutuhan air menjadi semakin tinggi. Namun, hal ini tidak disertai oleh manajemen yang mumpuni dalam menyelesaikan problematika tersebut. Sebagaimana dilansir dari *Kompas* (12-02), manajemen air di DKI Jakarta dikelola oleh Pam Jaya melalui kontrak dengan pihak swasta yaitu Aetra dan Palyja. Akan tetapi, pemerintah mengalami kerugian dan tidak mendapatkan skema manajemen yang diharapkan dari kerjasama tersebut.

Dampak buruk manajemen air di Jakarta dirasakan secara jelas oleh mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Selain banjir musiman yang menimpa daerah-daerah kumuh di Jakarta, masyarakat miskin juga dihadapi oleh masalah kekurangan air. Luo P., dkk, mempertegas bahwa kekurangan air telah menjangkiti masyarakat miskin Jakarta selama bertahun-tahun. Corak kesenjangan sangat sarat dengan mereka yang kaya tinggal di tempat yang terfasilitasi pipa, sedangkan masyarakat miskin harus bergantung dari air sungai yang tercemar, danau, dan sumur dangkal untuk memenuhi kebutuhan air mereka.[8]

Secara teoritis, ungkap Rachmad, penerapan sistem manajemen air yang ada di Belanda untuk wilayah Jakarta sangat memungkinkan untuk dilakukan. Kemungkinan ini dapat disimpulkan karena adanya karakteristik yang serupa, yaitu permukaan lahan yang rendah, bahkan lebih rendah dari muka air laut, laju penurunan tanah (*land subsidence*), dan air balik (*backwater*) dari laut. Namun, penerapannya akan menjadi tidak efektif karena timpangnya faktor ekonomi, budaya, sosial, dan lingkungan Jakarta yang jauh berbeda dengan Belanda. Sebagai contoh, *pertama*, urbanisasi yang terkonsentrasi di wilayah Jakarta mengakibatkan wilayah bantaran sungai, khususnya Sungai Ciliwung, penuh dengan pemukiman. Urbanisasi disebabkan oleh lemahnya jaminan kerja bagi masyarakat di luar Kota Jakarta, sehingga orang yang merantau ke Jakarta dan berharap mendapatkan pekerjaan lebih memilih hunian yang murah dan terletak di pinggiran sungai. *Kedua*, tidak seimbangnya upaya konservasi di daerah tangkapan air untuk mengurangi atau bahkan sekedar mempertahankan aliran banjirdengan kenyataan laju pembukaan lahan. Hal ini disebabkan oleh tuntutan pembangunan yang tidak memperhatikan pentingnya konservasi air. *Ketiga*, pendanaan yang besar dengan kemungkinan bahwa Indonesia tidak akan mampu menanggung seluruhnya.

Dapat disimpulkan bahwa manajemen air di Jakarta sangat kompleks. Tantangan masalah nonteknis, termasuk politik, berpotensi menyebabkan menurunnya kinerja pengendalian banjir. Menurut Rahmad, ada dua hal penting yang urgen untuk dilakukan. *Pertama*, peningkatan kapasitas sistem drainase makro (sungai, kanal banjir, kanal atau terowong pengelak banjir, dan lain lain) yang fungsi dan operasinya dapat terintegrasi dengan komponen sistem drainase mikro (pencegahan pembuangan sampah, pembersihan sampah dan sedimentasi di saluran drainase, menjaga berfungsinya pintu air dan pompa air). Perhatian terhadap pentingnya melakukan pemeliharaan jaringan sistem drainase, terutama sistem drainase mikro, masih perlu ditingkatkan karena dianggap bukan merupakan proyek yang besar atau urgen. *Keempat*, persoalan tumpang tindih dan ketidakjelasan kewenangan dan ego sektoral yang bersifat lintas instansi antara pemerintah Jakarta dengan daerah penyangga, masih menjadi kendala besar dalam melakukan manajemen air di Jakarta, sehingga harus diperbaiki. **[Asyraf dan Dina]**

---

[1] Yda Schreuder, "The Polder model in Dutch economic and environmental planning," *Bulletin of Science, Technology & Society* 21, 4 (2001): 238.
[2] Rony Sunaryo, dkk "Pengaruh Kolonialisme Pada Morfologi Ruang Kota Jawa Periode 1600-1942," *Seminar Nasional Riset Arsitektur dan Perencanaan (SERAP)* 3, (2014): 326.
[3] Warwick Anderson, "Introduction: Postcolonial Technoscience," *Social Studies of Science* 32, 5/6 (2002): 644.
[4] Nibras Nada Nailufar, "Upaya Pemprov DKI Rebut Kembali Pengelolaan Air Bersih di Jakarta," Kompas, 12 Februari, 2019, https://megapolitan.kompas.com/read/2019/02/12/08150281/upaya-pemprov-dki-rebut-kembali-pengelolaan-air-bersih-di-jakarta?page=all, diakses pada 25 Mei 2020.
[5] Sunaryo dkk., "PENGARUH KOLONIALISME PADA MORFOLOGI RUANG KOTA JAWA PERIODE 1600–1942," *Seminar* (2014).
[6] Warwick Anderson, "Introduction: Postcolonial Technoscience," *Social Studies of Science*, 32, 5 (2002): 650.
[7] Luo P dkk., "Water quality trend assessment in Jakarta: A rapidly growing Asian megacity," *PLoS ONE*, 14, 7 (2019): e0219009.
[8] Nibras Nada Nailufar, "Upaya Pemprov DKI Rebut Kembali Pengelolaan Air Bersih di Jakarta," *Kompas*, 12 Februari 2019, https://megapolitan.kompas.com/read/2019/02/081.50281/upaya-pemprov-dki-rebut-kembali-pengelolaan-air-bersih-di-jakarta

Kedaulatan Air untuk Korporasi, Krisis Air untuk Masyarakat
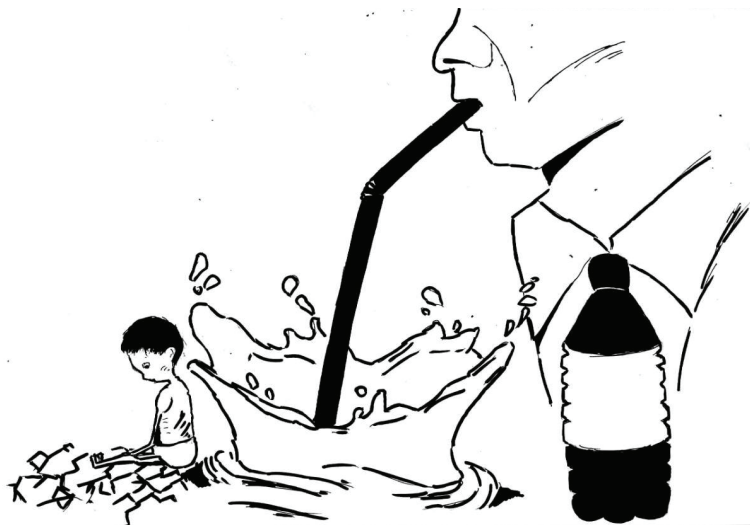
© Ingga/BAL

Pada mulanya, ide soal privatisasi air adalah solusi atas sengkarut pengelolaan air di Indonesia. Akarnya adalah pencanangan RUU Sumber Daya Air (SDA) pada tahun 1999 sebagai prasyarat dana pinjaman dari Bank Dunia[1]. Pinjaman ini sebagai wujud program Water Resources Sector Adjustment Loan (WATSAL) milik Bank Dunia. RUU inilah yang akhirnya disahkan sebagai UU No. 7 Tahun 2004. Hadirnya undang-undang tersebut justru kian memperlancar praktik privatisasi air di Indonesia.[2]

Selain itu, kebijakan privatisasi air juga mengubah paradigma negara dalam memandang air. Semula, air dimaknai sebagai hak dasar warga negara seperti yang tercantum pada UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 sehingga negara berperan penuh dalam pengelolaannya. Lalu dengan adanya privatisasi, penerjemahan air berubah menjadi komoditas.[3] Maksudnya, air tidak lagi dipandang sebagai barang bebas seperti oksigen, melainkan barang ekonomi. Dari sinilah praktik komodifikasi air semakin menjadi, termasuk air minum, yang mengakibatkan air mengalir terlalu jauh.[4] Meluasnya aksesibilitas air menjadi pepesan kosong kala perusahaan air minum menyedot mata air sementara warga sekitarnya mengalami kekeringan.

Krisis air dunia seperti yang dinyatakan World Water Forum IV pada tahun 2006 justru dianggap sebagai ladang bisnis bagi korporasi air minum. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) sebesar 7,9% tiap tahunnya sejak 2008 hingga 2014.[5] Produksi air minum yang kian masif menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat sekitar industri tersebut. Beberapa wilayah yang tadinya digolongkan sebagai daerah kaya mata air kini mulai mengalami kekeringan. Balairung mengambil contoh kasus krisis air bersih di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Pandeglang yang tercipta oleh eksploitasi korporasi air minum terhadap mata airnya.

Sukabumi masuk ke dalam wilayah yang potensial akan sumber air tanahnya, terutama lima belas kecamatan yang masuk Daerah Aliran Sungai (DAS) Cicatih. Kecamatan tersebut di antaranya Cidahu, Nagrak, Cicurug, Kadudampit, dan Caringin. Tingginya potensi air tanah di Kabupaten Sukabumi dikarenakan lokasinya yang berdekatan dengan tiga gunung vulkanik, yaitu Gede, Pangrango, dan Salak. Struktur geologi seperti ini memunculkan pola mata air rekahan yang marak dijumpai di Kabupaten Sukabumi.

Keberlimpahan air bukan hanya membawa berkah bagi masyarakat sekitarnya, tetapi juga memberi jalan kepada industri untuk mengeksploitasi air di Sukabumi. Terbukti pada tahun 2006, ada 53 industri yang mengeksploitasi air tanah di DAS Cicatih. Sejumlah 35 industri tersebut di antaranya merupakan perusahaan AMDK. Danone-Aqua, perusahaan AMDK terbesar di Indonesia, memainkan peran dominan dalam eksploitasi air di Sukabumi. Mata Air Kubang di desa Babakan Pari, Kecamatan Cidahu, menjadi basis Danone-Aqua dalam menyuplai

permintaan AMDK di Jawa bagian barat. Mata air ini bahkan mulai dieksploitasi sejak tahun 1992.

Sementara itu, Reza, anggota Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air, mengatakan bahwa Danone-Aqua menguasai tanah warga untuk kemudian menyedot air di bawahnya. Penguasaan lahan warga ini disertai serangkaian pemaksaan oleh elemen aparat dan ormas setempat. Padahal menurut Reza, hak atas tanah berbeda dengan hak atas air, apalagi untuk keperluan komersial.

Berdasarkan data dari Dinas Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sukabumi pada tahun 2010, Cidahu masih memiliki enam mata air. "Semuanya sudah dibeli perusahaan," ungkap Wawan, salah satu warga setempat.[6] Danone-Aqua sendiri menguasai empat dari enam mata air tersebut sementara dua sisanya dikuasai oleh korporasi lain.

Semenjak kedatangan Danone-Aqua, sumur-sumur warga menjadi kering. Dahulu, muka air sumur bisa mencapai ketinggian 1–2 meter, kini sejengkal saja sudah syukur. Selain itu, sulitnya memperoleh air tanah memaksa warga untuk menggunakan pompa air. Sayangnya, penggunaan pompa pun hanya bisa mengisi satu bak penampungan, tetapi mampu menghabiskan seisi sumur. Dampak lainnya yaitu penurunan air tanah. Mulanya, warga hanya perlu menggali sumur sedalam 8–10 meter. Namun saat ini, penggalian sumur 15 meter pun belum tentu mendulang hasil.

Tak hanya mengubah ekologi, eksploitasi air tersebut juga mengerdilkan mental masyarakat Sukabumi. Terpantau tidak pernah ada protes atas hak air kepada pemerintah maupun korporasi air minum. Sebaliknya, privatisasi air malah didukung oleh tokoh agama, LSM, kelompok preman, hingga pemerintah daerah.[7] Konflik perebutan air di Sukabumi sifatnya laten. Hal ini mengingat situasi yang tidak memungkinkan bagi warga terdampak untuk melayangkan protes. "Setiap ada protes, sekecil apapun itu, mesti direpresi oleh elemen LSM dan preman," ungkap Reza. Hal ini menyebabkan warga terdampak menjadi takut untuk bersuara sehingga yang terjadi malah normalisasi atas eksploitasi air tersebut.

Tak hanya di Sukabumi, krisis air sebagai imbas dari eksploitasi mata air oleh korporasi AMDK juga terjadi di Pandeglang. Kecamatan Pandeglang sendiri pada mulanya memiliki delapan mata air yang tersebar mulai dari Kampung Keramat, Kecamatan Cadasari, Kampung Cipancur, Kecamatan Baros, hingga perbatasan Kabupaten Serang.[8] Namun, kini hanya tersisa satu mata air saja yang bisa digunakan warga. Penyebabnya adalah eksploitasi oleh PT Tirta Fresindo Jaya, produsen AMDK Le Minerale.

Degradasi distribusi air ini, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, berdampak langsung pada aktivitas kehidupan warga. Konsumsi air warga sekitar sumber air yang semula diakomodasi oleh alam menyusut drastis. Aktivitas agraris seperti persawahan maupun konsumsi air domestik untuk minum, mandi, cuci, hingga kakus menjadi terhambat. Air yang menjadi sumber penghidupan sekaligus kemakmuran warga menjadi sukar didapatkan oleh warga.

Berbeda dari kondisi sosial di Sukabumi, warga terdampak di Pandeglang masih berani bersuara. Protes dimulai sejak PT Tirta Fresindo Jaya berencana mendirikan pabrik AMDK di atas lahan pertanian warga pada tahun 2012. Konflik yang melibatkan dua kubu tersebut mencapai klimaks pada pertengahan 2017. Kala itu, banyak warga yang tergabung dalam wilayah Kecamatan Cadasari hingga Baros melakukan unjuk rasa menuntut penghentian eksploitasi air. Nahas, apa yang diharapkan oleh warga sebagai motif dilakukannya unjuk rasa berbanding terbalik dengan fakta lapangan.[9] Alih-alih dipenuhi, tiga warga justru ditangkap dengan dakwaan merusak infrastruktur PT Tirta Fresindo Jaya.

Lagi pula, Perda No. 3 Tahun 2011 tentang RTRW Pandeglang 2011–2031 cukup gamblang melarang eksploitasi air di Kecamatan Cadasari. Perda tersebut menyatakan bahwa Kecamatan Cadasari merupakan wilayah resapan air, lindung geologi, dan kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Ketiga status tersebut menegaskan bahwa upaya komersialisasi air mesti angkat kaki dari Kecamatan Cadasari.

Sungguh ironis bahwa wilayah yang semula kaya air, kini masyarakatnya malah dilanda krisis air. Mata air tidak lagi membawa berkah, melainkan air mata. Hal ini tentu menjadi tugas pemerintah dalam melindungi hak masyarakat atas air. Salah satu upayanya yaitu dengan membuat regulasi yang berpihak pada kedaulatan rakyat atas air. Sayangnya, UU No. 17 Tahun 2019 tentang SDA pun tak jauh berbeda dengan pendahulunya yang sudah dibatalkan MK pada tahun 2015. "Pengetatan ada, tapi secara umum UU yang baru masih condong pada privatisasi air," ujar Reza. Dengan begitu, pengkhianatan atas UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 kembali terulang dan korbannya lagi-lagi adalah rakyat. **[Akmal, Dhias, dan Tariq]**

---

[1] Riris Tri Yunita dan Syafri Harto, "Peranan Bank Dunia Terhadap Privatisasi Sektor Air Di Indonesia Pada Tahun 1998-2010," *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau* 1, 1 (2014): 3.
[2] Hermansyah, "Privatisasi Air Di Indonesia (Kajian atas Undang-Undang Sumber Daya Air dan Ekonomi Islam)", *Bunga Rampai* 1, 1 (2016): 114–157.
[3] Riris Tri Yunita dan Syafri Harto, "Peranan Bank Dunia Terhadap Privatisasi Sektor Air Di Indonesia Pada Tahun 1998-2010," 2.
[4] Tim Redaktur Suara Pembaruan Agraria, *Ketika Sumber Air Tak Lagi Dekat, Majalah Pembaruan Agraria* XVI (2015): 10.
[5] Alexander Haryanto, "Melawan Komersialisasi Air," Tirto.id, September 13, 2016, https://tirto.id/melawan-komersialisasi-air-bJ75, diakses pada April 16, 2020.
[6] Arbi Sumandoyo, "Meraup Untung di Tengah Dahaga," Merdeka.com, September 30, 2013, https://www.merdeka.com/khas/raup-untung-di-tengah-dahaga-eksploitasi-air-aqua-3.html, diakses pada April 23, 2020.
[7] Lukman Agus Hakim. "Perebutan Sumberdaya Air: Analisis Konflik dan Politik Tata Ruang," *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 8, 2 (2017): 85–87.
[8] Arbi Sumandoyo, "Sesegar Le Minerale, Sepahit Perampasan Mata Air," Tirto.id, April 3, 2017, https://tirto.id/sesegar-le-minerale-sepahit-perampasan-mata-air-cl4k, diakses pada April 16, 2020.
[9] Tim Redaktur Binadesa, "Akibat Tolak Privatisasi Air oleh Mayora Group Warga Cadas Sari dan Baros Banten di Tangkap," BinaDesa.org, Februari 14, 2017, https://binadesa.org/akibat-tolak-privatisasi-air-oleh-mayora-group-warga-cadas-sari-dan-baros-banten-di-tangkap/, diakses pada 26 April 2020.

Perempuan dalam Pusaran Gerakan Sosial

© Haifa/BAL

Akhir November 2019, sosial media dihebohkan dengan viralnya video petani dusun Selasih, Gianyar, Bali yang melepas bajunya saat mengusir alat berat dari lahan pisangnya. Mereka adalah petani perempuan yang menolak lahannya digusur dan diklaim menjadi hak milik PT Ubud Resort Development. Padahal, selama ini warga telah secara turun temurun mengurus lahan tersebut sebagai salah satu pendapatan utama. Penggusuran dalam kasus tersebut menjadi salah satu contoh dari sekian banyak isu lainnya yang berdampak pada kaum perempuan. Tidak jarang perempuan menjadi garda terdepan dalam gerakan penolakan ketidakadilan dan gerakan sosial lainnya.

Namun, sebenarnya sejak kapan gerakan perempuan hadir? Bagaimana perempuan dapat turut serta menyuarakan kepentingannya dalam gerakan sosial? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Asfinawati, seorang pejuang dan advokat hak asasi manusia berbagi cerita terkait sejarah gerakan perempuan dari dahulu hingga saat ini. Asfin yang juga menjabat sebagai Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia periode 2017–2021 ini banyak bercerita tentang perempuan dalam gerakan sosial, termasuk tantangan dan cara untuk mempertahankan eksistensinya.

Bagaimana awal mula hadirnya isu perempuan?

Isu perempuan memang ada, tetapi kita harus hati-hati mengkategorisasikannya. Kalau kita bilang ada isu perempuan, secara logika maka ada yang bukan isu perempuan. Kalau kita menganggap isu perempuan adalah isu-isu tertentu saja, seperti kekerasan dalam rumah tangga, maka kita bisa luput melihat pengalaman kekerasan terhadap perempuan yang dialami di tempat lain. Misalnya masalah tambang dan iklim yang diangkat oleh gerakan sosial lainnya, itu sebenarnya juga isu perempuan. Karena korban yang paling terdampak dalam masalah-masalah tersebut adalah perempuan. Sehingga, isu perempuan sebenarnya muncul dari setiap permasalahan.

Lalu bagaimana awal mula munculnya gerakan perempuan di Indonesia?

Dapat dikatakan bahwa sejarah gerakan perempuan di Indonesia sangat maju pada zaman Orde Lama. Salah satu buktinya dapat dilihat pada Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 1951 yang kemudian diubah dengan UU No. 13 tahun 2003. UU tersebut sebetulnya merupakan pemberlakuan dari UU No. 12 Tahun 1948 tentang UU Kerja yang di dalamnya sudah mengatur tentang cuti menstruasi. Sehingga, dapat dilihat sejak tahun 1948 isu perempuan di Indonesia sudah menempati posisi yang penting.

Selain itu, jika dilihat dalam perjuangan kemerdekaan, jelas sekali bahwa perempuan selalu ada di setiap gerakan. Hanya saja peran mereka tidak pernah digali dengan serius atau semua tokoh perempuan yang ada di gerakan sosial disederhanakan menjadi Kartini dengan segala penghormatan kita terhadapnya. Selain nama yang saya sebutkan tadi, sebenarnya

banyak tokoh-tokoh perempuan yang namanya juga tidak disebutkan karena adanya pemusnahan sejarah Indonesia.

Bagaimana perkembangan gerakan perempuan di Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain?

Sebetulnya yang paling maju memang salah satunya negara-negara Nordik. Jadi negara-negara Nordik mengirimkan perwakilan perempuan ke Liga Bangsa-Bangsa, ketika negara lainnya tidak mengirimkannya sama sekali. Sehingga, banyak perempuan dari negara-negara Nordik yang menjadi pemikir filsafat feminisme. Tapi kalau kita lihat di Asia, pada era Orde Lama, tidak banyak negara yang sudah mengatur tentang cuti menstruasi. Jadi menurut saya, Indonesia adalah salah satu negara di Asia yang sangat maju, dan mungkin satu–satunya di ASEAN terkait gerakan perempuan. Kalau kita lihat lagi UU No. 12 Tahun 1948 dan laporan kelompok perempuan tahun 1945, setengah dari anggota Perserikatan Bangsa–Bangsa belum memberikan hak pilih untuk perempuan. Sedangkan perempuan di Indonesia saat itu sudah menjadi wakil kepala daerah, menteri perburuhan, dan anggota parlemen. Artinya, Indonesia sangat maju pada zaman itu, sebelum akhirnya dihancurkan oleh Orde Baru.

Bagaimana pandangan Anda tentang gerakan perempuan di Indonesia saat ini?

Kalau kita bicara yang sekarang ini, menurut saya yang banyak memberikan sumbangan penting dalam gerakan perempuan adalah anak muda. Kebebasan berekspresi yang lebih dahsyat karena dipengaruhi kemajuan teknologi informasi membuat banyak anak muda sadar akan haknya dan berani bersuara. Semakin ke sini, interseksionalitas atau irisan di berbagai isu dalam gerakan perempuan semakin banyak ditemukan, seperti dalam isu kemiskinan, agraria, dan tambang. Sehingga perempuan tidak dikucilkan dalam satu isu tertentu saja.

Apakah tingkat kesetaraan gender mempengaruhi munculnya gerakan perempuan di Indonesia? Apakah bisa dikatakan bahwa gerakan perempuan bangkit karena kesetaraan gender terwujud? Atau sebaliknya, bahwa gerakan perempuan hadir sebagai salah satu upaya menuntut kesetaraan gender?

Kalau kita melihat sejarahnya, gerakan itu muncul karena tidak adanya hak dan muncul tuntutan untuk hal tersebut. Gerakan sosial pada umumnya lahir karena represi, bukan pemberian. Tentu saja ketika diberikan ruang terbuka, maka gerakan sosial akan semakin membesar. Ada juga orang yang menamakan gerakan perempuan sebagai gerakan emansipasi. Namun, dahulu isu gender seringkali dianggap sebagai isu yang terlalu berlebihan, peyoratif, dan sudah buruk dari sananya. Namun, kini gerakan perempuan hadir dan menyempurnakan perspektif gerakan sosial yang *mainstream* itu. Salah satu elemen yang penting yaitu saat gerakan Suara Ibu Peduli (SIP) melakukan aksi dengan membagikan susu di bundaran Hotel Indonesia pada tahun 1998. Gerakan SIP menjadi simbol isu yang mengikat rakyat bahwa untuk hal yang mendasar seperti memenuhi kebutuhan susu saja Indonesia masih belum mampu memenuhinya. Dari aksi tersebut, saya melihat bahwa dalam sejarahnya, gerakan perempuan di Indonesia memiliki dua peran. *Pertama*, memperkuat dan memperkaya gerakan sosial yang umum. *Kedua*, dia punya jalur tersendiri untuk mengoreksi gerakan sosial umum lain.

Apa tujuan utama yang ingin dicapai oleh gerakan perempuan? Dan apa saja tujuan yang telah tercapai?

Gerakan perempuan di Indonesia, setidaknya di awal-awal, selalu menjadi bagian dari gerakan sosial yang lebih besar dalam menuntut kesetaraan, kemerdekaan, dan keadilan. Beberapa tujuan telah dicapai oleh gerakan perempuan di Indonesia. *Pertama*, negara mau melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau yang dikenal dengan Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). CEDAW mengatakan bahwa negara itu tidak hanya harus mengganti peraturan perundang-undangan dan kebijakannya, tetapi juga memperhatikan budaya yang mendiskriminasi perempuan. *Kedua*, gerakan perempuan tidak lagi menjadi gerakan yang berbeda, tetapi telah dianggap sebagai gerakan yang wajar sebagai suatu gerakan sosial. Melalui dua keberhasilan itu, gerakan perempuan mampu mempengaruhi seluruh sektor. Misalnya dalam sektor politik, gerakan perempuan bisa mendapat afirmasi, kesetaraan kerja, dan lain-lain. Namun, masih ada banyak sekali masalah, seperti dalam UU No. 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. UU ini menerangkan bahwa suatu partai dapat mengikuti pemilihan umum apabila telah menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan pusat. Belum ada yang bisa menjamin keterwakilan perempuan itu punya makna substantif di dalam pembuatan kebijakan. Akibatnya, kuota 30% tersebut bisa saja dijadikan alat untuk dapat dijual oleh partai. Sehingga gerakan perempuan akan terus ada untuk memperjuangkan berbagai masalah tersebut.

Apa yang harus diperhatikan oleh gerakan perempuan untuk menjaga eksistensinya?

Pertama, yang harus dilakukan adalah memperbaharui tuntutan. Sebab, tidak ada kesetaraan sejati yang bisa didapat tanpa adanya pengawasan dan tuntutan. Kalaupun kita sekarang telah menetapkan afirmasi 30% keterwakilan perempuan sebagai syarat suatu partai mengikuti pemilu, itu bukan capaian terakhir. Masih banyak hal yang harus dicapai. Misalnya dalam hak politik, proporsi penduduk laki-laki dan perempuan di Indonesia sudah hampir seimbang, sehingga seharusnya, haknya diubah dari 30% menjadi 50%. *Kedua*, kalau kita sudah berhasil mencapai afirmasi 50%, maka kita bisa masuk untuk bidang yang lain. Misalnya dalam bidang pendidikan, keagamaan, dan juga institusi budaya. Melihat banyaknya tujuan yang masih harus dicapai, gerakan perempuan harus tetap ada. Tinggal bagaimana meningkatkan kesadaran anggota gerakan, bahwa apabila tujuan telah tercapai, maka itu bukanlah akhir karena masih banyak capaian–capaian lain. **[Derby dan Syifa]**

Menyambut Kematian Subak

© Aris/BAL

Setiap pemerintahan mempunyai kepentingan terhadap subak. Kepentingan yang diartikulasikan melalui target politik tersebut berdampak terhadap subak. Saat Orde Baru, politik swasembada pangan telah melemahkan otonomi komunitas subak terhadap subaknya. Sementara itu, pada era reformasi, subak mengalami pelemahan kembali melalui politik pariwisata pemerintah.

Penetapan subak sebagai Warisan Budaya Dunia didasari oleh tiga aspek keistimewaan. *Pertama*, nilai sejarah. *Kedua*, filosofi *Tri Hita Karana*. *Ketiga*, tata kelola berkelanjutan, sebab subak mampu bertahan selama ribuan tahun sebagai sistem irigasi maupun komunitas.[1] Kawasan subak yang ditetapkan sebagai Warisan Budaya Dunia (WBD) berada di lima kabupaten yaitu Bangli, Gianyar, Tabanan, Buleleng, dan Badung.[2]

Nilai sejarah subak berangkat dari penemuan prasasti Pandak Bandung (1071 M) serta prasasti Klungkung (1072 M). Pada kedua prasasti berbahasa bali kuno tersebut ditemukan kata "kasuwakan", yang merupakan sinonim dari kata "subak" serta memiliki arti saluran air.[3] Sementara itu, filosofi *Tri Hita Karana* merupakan landasan keseluruhan sistem subak. Ia mengandung rumus kebahagiaan yang terjadi ketika tiga unsur (*Parhyangan*, *Pawongan*, *Palemahan*) diharmonisasi dan diwujudkan.

Kebertahanan subak selama ribuan tahun masih merupakan perdebatan. Clifford Gertz meyakini bahwa subak merupakan suatu sistem pengairan yang independen dan otonom. Semua kerja subak mulai dari alokasi air hingga jadwal bercocok tanam diatur melalui aturan *awig-awig* (aturan tradisi).[4] Di sisi lain, beberapa pakar membantah argumen romantisme tersebut. Schulte-Nordholt menilai bahwa subak tidak memiliki otonomi secara penuh karena bergantung pada keterlibatan aristokrat lokal.[5]

Argumen Schulte-Nordholt tersebut diperkuat dengan tulisan berjudul *Persaingan Akses Sumber Daya Air di Yeh Ho, Tabanan, Bali*. Pada tulisan tersebut terdapat pemaparan wajah subak dari zaman kerajaan hingga era reformasi. Setiap perubahan wajah diikuti dengan perubahan sistem subak serta keadaan lingkungan sekitarnya. Seperti pada masa Orde Baru, Soeharto melakukan modernisasi subak untuk memenuhi target swasembada pangan pemerintah. Implikasinya, kekuasaan dan tanggung jawab komunitas subak yang semula terbentang dari sumber air, daerah tangkapan air, hingga lahan petani, menyempit hingga di sekitar lahan saja.[6] Secara singkat, meskipun subak dinilai istimewa, eksistensinya tidak lepas dari peran negara.

Krisis Air

Konservasi serta preservasi nilai-nilai subak merupakan tujuan pengajuan subak sebagai WBD.[7] Alih-alih terwujud, yang terjadi malah sebaliknya. Setelah subak ditetapkan sebagai WBD, wajah subak sebagai sistem irigasi yang menghidupi pertanian beralih menjadi pariwisata. Konsekuensinya, subak mengalami krisis air.

Sejalan dengan tren industri wisata, alih fungsi lahan untuk kepentingan komersial berlangsung secara radikal.Subak Jatiluwih telah berubah karena makin banyak alih fungsi lahan sebagai tempat penginapan, restoran, bahkan helipad.[8] Subak Teges di Desa Peliatan juga mencatat bahwa terjadi alih fungsi lahan pertanian sebanyak 5 hektare dalam kurun waktu 2014 hingga 2017.[9] Penurunan luas tersebut diliputi dengan maraknya pembangunan penginapan, vila, restoran, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Tak hanya pada lahan pertanian, pada daerah resapan air pun mengalami alih fungsi.

Sesungguhnya, pesatnya alih fungsi lahan merupakan sumber ancaman bagi subak.[10] Sebab, pembangunan terjadi di antara daerah hulu dan hilir. Akibatnya, siklus air terganggu sehingga mengurangi debit air pada sumber air. Selain itu, sumber air tersebut pun mengalami penurunan kualitas akibat tercemar.

Contohnya dapat dilihat pada Sungai Yeh Ho. Sungai yang menjadi sumber air subak di Tabanan tersebut mengalami penurunan baik secara kualitas dan kuantitas.[11] Hal tersebut disebabkan oleh eksploitasi hutan di sekitar aliran Sungai Yeh Ho yang mengurangi daerah tangkapan air, sehingga air hujan tidak terserap secara optimal. Selain itu, aktivitas galian dalam rangka pembangunan infrastruktur turut menyebabkan air sungai tercemar.

Pada akhirnya, bangunan-bangunan yang telah didirikan mengharuskan pemilik modal untuk mencari sumber air dalam rangka pemenuhan kebutuhan wisatawan. Alhasil, mereka mengambil sumber air yang selama ini digunakan untuk subak. Dampaknya, subak semakin krisis air.

Komunitas Subak Pulagan mencatat bahwa debit air yang mengairi sawah mereka berkurang.[12] Pengurangan tersebut disebabkan oleh pengambilan debit air yang dilakukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Gianyar secara sepihak dari Pura Tirta Empu. Air yang diambil oleh beberapa PDAM tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas industri pariwisata. Dampaknya terhadap subak, beberapa hektare lahan basah tidak bisa ditanami.

Ketut Sudikerta, Wakil Gubernur Bali, menanggapi permasalahan akibat alih fungsi lahan ini. Ia mengatakan bahwa Perda Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jalur Hijau seharusnya mampu mengatur pendirian bangunan pada lahan pertanian serta pendirian bangunan pada wilayah hulu dan hilir. Namun, fakta di lapangan menunjukan bahwa peraturan tersebut belum berjalan efektif.[13] Sebab, masih banyak pelanggaran berupa pendirian bangunan, baik di lahan sawah bukan kawasan jalur hijau maupun lahan sawah kawasan jalur hijau.

Secara singkat, politik pembangunan berbasis pariwisata menciptakan perubahan besar bagi subak.[14] Tidak hanya mendesak lahan pertanian subak, namun juga menekan akses petani terhadap air. Langkanya air pertanian merupakan salah satu ancaman bagi hidup dan bertahannya subak.

Subak Sebagai Gerakan Politik

Alih fungsi lahan yang tidak mampu dikontrol oleh pemerintah menyebabkan subak mengalami krisis air. Hal tersebut menyebabkan subak tidak mampu bertahan. Hingga tahun 2016, tercatat luas area sawah yang dikelola oleh komunitas Subak di seluruh Bali tinggal 78.000 hektare dimana sekitar 750 hektare area sawah mengalami alih fungsi tiap tahunnya.[15]

Melihat gempuran pariwisata terhadap Bali, Roth dan Sadana mengatakan bahwa komunitas subak harus mampu berperan sebagai gerakan ideologi politik dalam rangka merespons intervensi seperti investasi.[16] Hal tersebut terjadi pada Subak Abyan di Desa Wanagiri, Buleleng, Bali. Russelin Edhayati, peneliti subak dari Sekolah Salah Didik, mengatakan bahwa subak tersebut tidak hanya berfungsi sebagai mata air saja, melainkan juga mampu berfungsi sebagai pariwisata.

Menurut Russelin kemampuan Subak Abyan tersebut sempat terancam oleh tuntutan dari pemerintah. "Pemerintah lokal ingin subak tersebut menanam sayur, alih-alih menanam tanaman keras," jelas Russelin. Padahal, jelasnya, penanaman sayur di daerah tersebut dapat memicu terjadinya longsor. Namun, tambah Russelin, komunitas Subak Abyan mampu menanggapi tuntutan pemerintah dengan tidak memenuhinya.

Russelin menganggap bahwa penolakan dari komunitas subak dapat terjadi karena masih kuatnya kegiatan ritual agama. Implikasinya, jelas Russelin, peran tokoh adat menjadi sangat krusial dalam hal pelestarian Subak Abyan. "Tokoh-tokoh agama harustersebut benar-benar memegang teguh nilai-nilai agama dalam rangka menjaga kelestarian Subak Abyan," tuturnya. Sehingga, tambahnya, segala bentuk upaya yang mengancam kelestarian Subak Abyan dapat dicegah.
[Bangkit, Bhakti, dan Naufal]

---

[1] Afit Arif. *Pengakuan UNESCO Terhadap Sistem Subak Bali Sebagai Warisan Budaya Dunia.* Skripsi. (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019): 49.
[2] Anton Muhajir, "Nasib Jatiluwih setelah Menjadi Warisan Budaya Dunia [5]," Mongabay, 2 Mei, 2019. https://www.mongabay.co.id/2019/05/02/nasib-jatiluwih-setelah-menjadi-warisan-budaya-dunia-5/, diakses pada 23 Mei 2020.
[3] Yogi Setya Permana, "Mampukah Subak Bertahan? Studi Kasus Ketahanan Sosial Komunitas Subak Pulagan, Gianyar, Bali," *Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*, (2016): 220.
[4] Yogi Setya Permana, "Mampukah Subak Bertahan?" 221.
[5] Herlina Tarigan, dkk, "Persaingan Akses Sumber Daya Air Di Yeh Ho, Tabanan, Bali," *Jurnal Agro Ekonomi* 31, 2 (2013): 152.
[6] Anton Muhajir, "Nasib Jatiluwih setelah Menjadi Warisan Budaya Dunia [3]," Mongabay, 2 Mei, 2019. https://www.mongabay.co.id/2019/04/29/nasib-jatiluwih-setelah-menjadi-warisan-budaya-dunia-3/, diakses pada 23 Mei 2020.
[7] Anton Muhajir, "Nasib Jatiluwih setelah Menjadi Warisan Budaya Dunia [3],"
[8] Komang Tri Permata Dewi, dkk, "Permasalahan Subak di Daerah Pariwisata di Subak Teges, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar," *E-Jurnal Agribisnis dan Agrowisata Fakultas Pertanian Universitas Udayana*, (2018): 518.
[9] I Gde Pitana dan I Gede Setiawan Adi Putra, *Revitalisasi Subak Dalam Memasuki Era Globalisasi* (Yogyakarta: Karya Mandiri Nusantara, 2005).
[10] Herlina Tarigan, dkk, "Persaingan Akses Sumber Daya Air Di Yeh Ho, Tabanan, Bali," 148.
[11] Yogi Setya Permana, "Mampukah Subak Bertahan?" 227.
[12] I Putu Sriartha dan Wayan Windia, "Efektivitas Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mengendalikan Alih Fungsi Lahan Sawah Subak: Studi Kasus di Kabupaten Badung, Bali," *Jurnal Kajian Bali* 5, 2 (2015): 342.
[13] Herlina Tarigan, dkk, "Persaingan Akses Sumber Daya Air Di Yeh Ho, Tabanan, Bali," 154.
[14] Yogi Setya Permana, "Mampukah Subak Bertahan?" 220.
[15] Yogi Setya Permana, "Mampukah Subak Bertahan?" 221.

Belajar dari Kasepuhan Ciptagelar: Swakelola Air Berbasis Tradisi
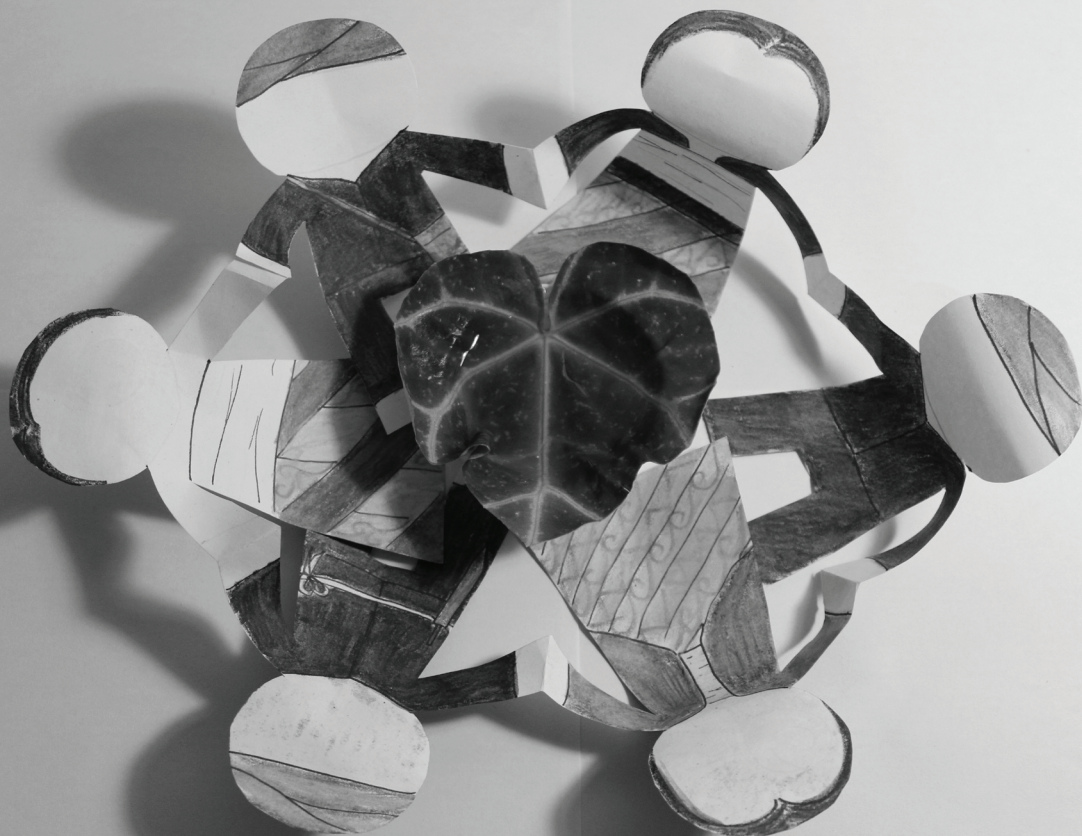
© Erika/BAL

Kemelut birokrasi dan privatisasi air menimbulkan permasalahan tersendiri dalam pengelolaan air. Penelusuran terhadap nilai-nilai kebudayaan masyarakat Kasepuhan Ciptagelar menunjukkan bahwa swakelola air mungkin untuk dilakukan.

Menilik awal sebuah peradaban, manusia bergantung pada alam. Namun, seiring berjalannya waktu, manusia dan alam pun hidup saling bergantungan. Dalam perkembangannya, manusia berinteraksi dan mengolah alam supaya dapat bertahan hidup dan juga memproduksi sarana kehidupan.[1] Salah satu unsur alam yang senantiasa berinteraksi dengan manusia adalah air. Dalam konteks luas, manusia berinteraksi dengan air melalui pemanfaatan laut sebagai pelayaran, pencarian sumber pangan, dan aspek spiritual. Sementara itu, dalam konteks sempit, manusia berinteraksi dengan air melalui

penggunaannya untuk minum, mandi, masak, dan pengolahan ke dalam sumber energi. Melihat vitalnya keberadaan air bagi kehidupan manusia, diskursus tentang hak atas air perlu terus digulirkan, mencakup polemik akses, kepemilikan, pengelolaan air, dan sumber mata air.[2] Beberapa hal tersebut mengerucut pada praktik privatisasi dan kelalaian birokrasi. Privatisasi yang dimaksud berupa kepemilikan sumber mata air dan pengemasan air minum, dengan keuntungan jatuh pada pemilik modal.[3] Birokrasi yang buruk diekspresikan lewat kebijakan yang tidak tepat sasaran dan kelalaian pengawasan. Contohnya adalah krisis kesehatan yang terjadi di Flint, Michigan, Amerika Serikat.[4] Sebagai alternatif dari pengelolaan air yang "umum" saat ini, ada baiknya menarik pembelajaran dari praktik kebudayaan lokal.

Salah satu komunitas adat di Sukabumi, Jawa Barat, yaitu Kasepuhan Ciptagelar, mempunyai cara pengelolaan air yang khas berdasarkan nila-nilai yang dianut. Komunitas adat ini terdiri dari 30.000 penduduk di 568 desa yang tersebar di sekitar pegunungan Halimun. Komunitas Kasepuhan Ciptagelar telah ada sejak tahun 2001. Nama "Ciptagelar" dimaknai sebagai pelestarian tatanan titipan.

Masyarakat Kasepuhan Ciptagelar memandang air, atau *cai*, sebagai bagian dari alam yang wajib untuk dilindungi serta dikelola secara kolektif demi kepentingan bersama. Yoyo selaku tetua adat di Kasepuhan Ciptagelar menjelaskan bahwa semua orang membutuhkan air. Masyarakat Kasepuhan Ciptagelar, lanjut Yoyo, mendapatkan air dari hutan. Masyarakat Kasepuhan Ciptagelar membagi hutannya atas tiga jenis. *Pertama*, hutan tutupan yang terkatup dan tidak boleh digunakan. *Kedua*, hutan titipan yang boleh digunakan, tetapi berdasarkan hukum adat yang telah ditetapkan. *Ketiga* adalah hutan garapan, yang secara komunal dikelola untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pembagian ini turut memengaruhi pengelolaan air yang berada di dalam wilayah Kasepuhan Ciptagelar. Air tersebut berasal dari sumber mata air yang ada di hutan, seperti akar-akaran ataupun batu. Nantinya, hutan yang telah mereka rawat akan menghasilkan air untuk kemudian mereka jadikan sumber energi, salah satunya produksi listrik.

Selain untuk memproduksi listrik, air juga dimanfaatkan untuk irigasi dan kebutuhan hidup sehari-hari. Demi menjaga kelangsungan sumber airnya, Yoyo mengatakan bahwa masyarakat Kasepuhan Ciptagelar menjaga mata airnya dengan melakukan penanaman pohon. "Semuanya memiliki sistemnya sendiri-sendiri, ketika air sudah mengalir maka ada beberapa titik yang kita jaga, misalnya, sumber mata air atau *hulu-hulu cai* tidak boleh diganggu," imbuh Yoyo. Penjagaan *hulu-hulu cai* dan pengelolaan air berdampak langsung pada hasil pertanian mereka. Kasepuhan Ciptagelar mampu mencapai swasembada dan ketahanan pangan dengan cadangan beras sampai tiga tahun.[5]

Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat Kasepuhan Ciptagelar juga menggunakan air dalam prosesi adat tertentu. Salah satunya adalah prosesi *nimbur* yang dilakukan kepada setiap anak yang baru lahir. "*Nimbur* adalah proses meneteskan air ke mata, menyemburkan, sekaligus mencipratkan air ke tubuh anak yang baru lahir," ujar Yoyo. Yoyo juga menambahkan bahwa prosesi *nimbur* adalah salah satu proses penyatuan manusia dengan alam.

Menurut masyarakat Kasepuhan Ciptagelar, air merupakan pemberi dan pelengkap kehidupan. Falsafah hidup masyarakat Kasepuhan Ciptagelar mengartikan air sebagai darah yang menunjukkan keturunan. "Sayangnya, ketika berhadapan dengan liyan, kita langsung menganggapnya musuh, padahal kita tidak saling kenal," tegas Yoyo. Ia menjelaskan bahwa warga Kasepuhan Ciptagelar tidak memberi pandangan berbeda terhadap pendatang, sekalipun pendatang tersebut berasal dari mancanegara. Kesimpulannya, bagi masyarakat Kasepuhan Ciptagelar, tiap manusia bersaudara memiliki kesamaan, seperti aliran air dan darah yang terdapat di dalam tubuh manusia.

Menurut Yoyo, keseharian yang dilakukan oleh masyarakat Kasepuhan Ciptagelar bukanlah untuk melestarikan tradisi maupun menjaga tradisi, melainkan untuk menjalankan tradisi. Yoyo menilai bahwa apabila informasi ini baik apabila didengar dan diaplikasikan oleh masyarakat luas. "Tetapi ini bukanlah anjuran untuk setiap orang, karena setiap orang punya pilihannya masing-masing," tutupnya.

Pengelolaan air serta falsafah hidup masyarakat Kasepuhan Ciptagelar dapat direfleksikan dalam pengelolaan air "modern" saat ini. Seperti yang sudah disampaikan, setiap masyarakat memiliki tatanan yang berbeda-beda. Namun, hal itu tidak menjadi alasan untuk melakukan pengelolaan air secara serampangan yang pada akhirnya akan menciptakan ketimpangan.

Refleksi atas penelusuran terhadap nilai-nilai kebudayaan masyarakat Kasepuhan Ciptagelar dapat menjadi penunjuk arah dalam permasalahan air saat ini. Dalam kondisi pemanasan global dan eksploitasi alam yang tak kunjung berhenti akibat sistem ekonomi kapitalisme, nyatanya masih ada masyarakat yang dapat hidup dengan memanfaatkan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat banyak kemungkinan pengelolaan sumber daya alam yang tidak berpotensi merusak alam itu sendiri.
[Alfredo, Caca, dan Dinta]

---

[1] Karl Marx, "Economic and Philosophic Manuscript," marxist.org 2009, https://www.marxists.org/archive/marx/works/1844/manuscripts/preface.htm diakses pada 16 Juni 2020.
[2] Tadkzia Nurshafira, "Sekurutisasi Yang-Umum: Krisis Air dan Masalah Pengelolaan Air di Yogyakarta," *Institute of International Studies Brief* (Yogyakarta: Departemen Hubungan Internasional UGM, 2017): 3–6.
[3] Dennis Martinez, "Redefining Sustainibility Through Kincentric Ecology: Reclaiming Indigenous Lands, Knowledge, and Ethics," *Traditional Ecological Knowledge Learning From IndigenousPractices for Environtmental Stability* (Cambridge: Cambridge University Press, 2018): 144.
[4] Ronald Janke, "Did A Bureaucratic Fog Envelop The Flint Water Crisis?" acoel.org 23 April 2019, http://www.acoel.org/post/2019/04/23/Did-a-Bureaucratic-Fog-Envelope-the-Flint-Water-Crisis.aspx., diakses pada 17 Juni 2020.
[5] Watchdog Image, Bumi Ciptagelar – Ekspedisi Indonesia Biru #05. Video. (2016) https://www.youtube.com/watch?v=H7uEJKnhamA., diakses pada 20 Juni 2020.

Kontroversi UU Sumber Daya Air Tahun 2019: Hak Rakyat Tak Terpenuhi

Pengesahan Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (SDA) menuai kritik. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai bahwa ada hal kontroversial dalam UU ini. Secara substansi, UU No. 17 Tahun 2019 tentang SDA dianggap masih memiliki kandungan yang sama dengan UU No. 7 Tahun 2004 tentang SDA yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2015.

Atas dasar ini, Balairung mewawancarai Wahyu Perdana, Manajer Kampanye Pangan Air dan Ekosistem Esensial Walhi. Wahyu menganggap UU No. 17 Tahun 2019 tentang SDA belum memenuhi hak atas air untuk masyarakat. Selain itu, ia juga mengkritik substansi UU tersebut yang tidak menjelaskan secara rinci mengenai pengawasan pengusahaan sumber daya air.

Bagaimana pandangan Anda terhadap UU No. 17 Tahun 2019 tentang SDA?

Ada beberapa catatan mendasar untuk UU No. 17 Tahun 2019 tentang SDA. Dalam UU ini air bukan dipandang sebagai bagian dari hak, melainkan komoditas. Selain itu, DPR ataupun pemerintah selalu menekankan bahwa terdapat enam

prinsip dasar pembatasan pengelolaan SDA. Padahal, apabila melihat kalimat harfiah dari Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 dapat diketahui bahwa hanya terdapat lima prinsip dasar pembatasan pengelolaan SDA.

Pertama, setiap pengusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air karena bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya selain harus dikuasai oleh negara, juga peruntukannya adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. *Kedua*, negara harus memenuhi hak rakyat atas air. *Ketiga*, pengelolaan SDA harus mengingat kelestarian lingkungan. *Keempat*, seperti yang termaktub dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945, pengendalian negara terhadap air bersifat mutlak. *Kelima*, sebagai kelanjutan hak menguasai oleh negara dan karena air merupakan sesuatu yang sangat menguasai hajat hidup orang banyak, maka prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah BUMN atau BUMD. Adapun pembatasan keenam yang sering dilontarkan oleh pemerintah merupakan kalimat lanjutan yang menyatakan bahwa pemerintah bisa memberi izin pengusahaan air bagi swasta hanya bila air masih tersedia setelah semua pembatasan terpenuhi.

Mengapa UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dianggap belum memenuhi hak rakyat atas air?

UU ini dianggap belum memenuhi hak rakyat atas air karena masih terdapat kerancuan akan pembatasan yang disebutkan sebelumnya. Penguasaan negara terhadap air hanyalah kedok, karena kemudian negara memberi ruang kepada swasta untuk menguasai air. Padahal di awal sudah jelas bahwa penguasaan negara terhadap air bersifat mutlak dan harus dikembalikan kepada rakyat.

Kerancuan tersebut diperparah atas adanya beberapa kesalahan perumusan norma dalam undang-undang ini. *Pertama*, UU ini mempersulit model pengakuan hak masyarakat adat karena rumusannya bersifat konstitutif dan tidak memperhatikan kondisi faktual yang ada. *Kedua*, perumusan konservasi air tidak mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal secara komunal. Pendekatan yang digunakan hanya secara individual, sehingga rentan untuk disalahgunakan dalam pengusahaan swasta. *Ketiga*, skema kerjasama pengelolaan air tidak jelas. *Keempat*, perumusan partisipasi rakyat dianggap sebagai hasil pertemuan, tanpa disebutkan dengan jelas apakah rakyat memiliki hak veto atau hak tolak atas pertemuan tersebut. Hak veto rakyat ini sangat penting karena pada akhirnya rakyat yang akan menerima dampaknya. *Kelima*, setelah UU tersebut diterbitkan, aturan peralihannya justru melegalkan keterlanjuran “swastanisasi” hingga izin perusahaan tersebut habis.

Apa saja hak atas air yang seharusnya diterima oleh rakyat?

Apabila dilihat menggunakan pendekatan kelompok pengguna air, terdapat tujuh hak rakyat atas air yang harus terpenuhi, antara lain hak atas air bersih, kebutuhan air untuk sanitasi, kebutuhan air rumah tangga, kebutuhan air untuk pertanian, air dalam konteks komunal, air dalam siklus hidrologi (dalam pendekatan ekosistem), dan air sebagai konsumsi yang layak. Oleh karena itu, saat akan diadakan pengusahaan air, maka perlu dibuat pemetaan air terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk mengetahui daya dukung dan daya tampung air. Sehingga apabila tujuh hak atas air di atas belum tercukupi, maka selayaknya pengusahaan air tidak bisa dilakukan.

Lagi-lagi, dalam UU ini tidak ada indikator yang jelas bagaimana air dapat diberikan kepada pihak ketiga sebelum ketujuh hak atas air tersebut terpenuhi. Selain itu, perlindungan atas masyarakat yang memperjuangkan hak atas air juga belum diatur. Hal ini membuat masyarakat semakin kesulitan dalam mengupayakan hak atas air yang seharusnya diterima.

Apakah kasus mengenai kurangnya pemenuhan hak atas air ini sudah terjadi sejak dulu?

Sejatinya kasus ini sudah ada sejak penerbitan UU No. 7 Tahun 2004 tentang SDA. Oleh karena itu, MK memerintahkan agar UU tersebut diganti secara keseluruhan, bukan hanya merevisi substansinya. Namun, setelah diterbitkan, nyatanya UU yang baru tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan UU SDA Tahun 2004 karena air masih dipandang secara parsial. Apabila hal ini terus terjadi, maka air akan tetap dilihat sebagai barang abiotik saja dan tidak dipandang secara keseluruhan sebagai ekosistem.

Siapakah pihak yang bertanggung jawab dalam kontroversi pemenuhan hak atas air ini?

Secara fundamental dapat diketahui bahwa negara bertanggung jawab dalam hal ini. Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sayangnya, secara operasional, UU No. 17 Tahun 2019 tentang SDA masih belum mengatur dengan jelas lembaga yang menjadi *leading sector* dalam pengaturan air. Pengaturan kelembagaan ini sangat penting, sehingga terdapat mekanisme komplain yang jelas bagi rakyat. Tidak adanya leading sector dalam pengaturan air ini membuat masyarakat bingung harus meminta haknya ke siapa.

Walhi sebenarnya sudah menyarankan pemerintah untuk segera menunjuk salah satu lembaga menjadi *leading sector* atau membuat kelembagaan yang baru. Akan tetapi, sampai sekarang masih belum ada aksi nyata dari pemerintah terkait dengan hal ini. Oleh karena itu, Walhi menganggap tidak adanya keseriusan dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan air yang ada.

Apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi kontroversi pemenuhan hak air dalam UU SDA Tahun 2019?

Untuk mengatasi hal ini, dapat dilakukan audit lingkungan terhadap konsesi yang sudah ada. Namun, peraturan mengenai audit lingkungan ini pun masih belum diatur dengan jelas dalam UU No. 17 Tahun 2019 tentang SDA. Alhasil, audit lingkungan pun tidak berjalan dengan lancar. Selama hal ini tidak ditindak secara tegas, maka penyelesaian terhadap masalah hak atas air masih jauh dari titik temu.
[Anisa]

Hitung Mundur Krisis Air
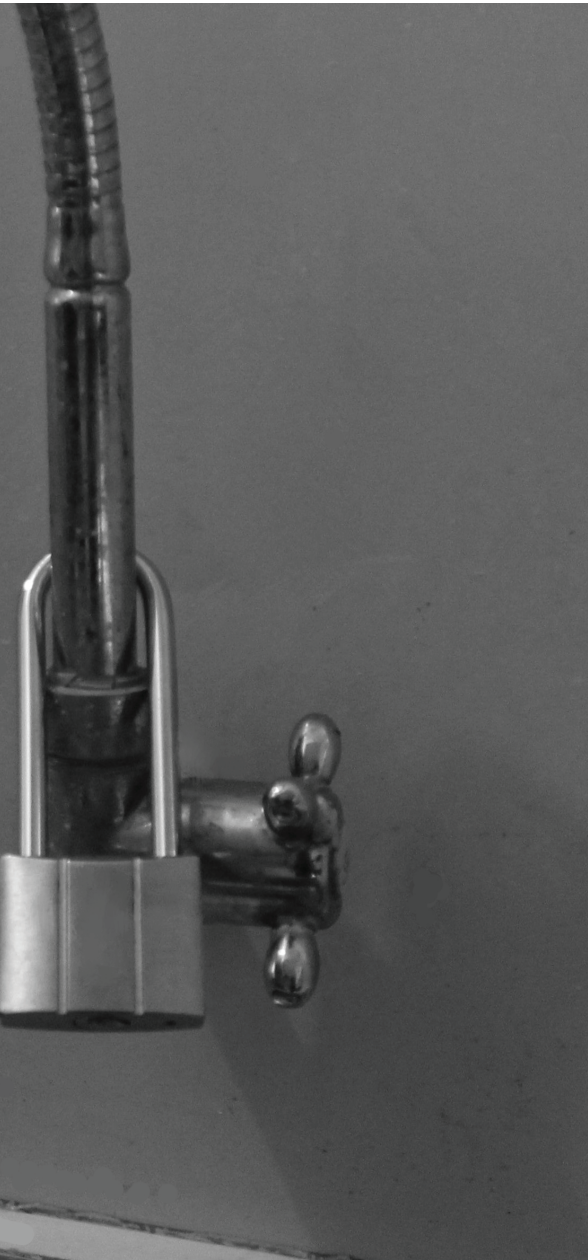
© Erika/BAL

Krisis air bersih menghantui penduduk dunia. Perubahan iklim yang dibarengi dengan meningkatnya privatisasi air semakin memperparah krisis air. Integrasi manajemen air diperlukan untuk menangani krisis yang terjadi.

Air sebagai sumber daya alam menjadi hal yang vital dalam kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk hidup membutuhkan air untuk tetap berfungsi secara fisiologis. Dengan kata lain, air adalah aspek penting untuk membuat manusia tetap hidup. Secara luas, air telah berkembang menjadi kebutuhan utama berbagai aktivitas kehidupan manusia; ekonomi, sosial, hingga politik. Sifat air sebagai sumber daya alam menyebabkan keberadaanya bergantung pada proses-proses alam. Namun, kebutuhan air telah meluas ke berbagai aspek kehidupan sehingga diperlukan pandangan yang lebih luas untuk menyikapi permasalahan air.

Permasalahan yang muncul disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor-faktor ini secara bersamaan memberikan andil terhadap terjadinya krisis air. Pada tahun 2019, terjadi fenomena El Nino yang menyebabkan kemarau yang lebih kering. Dampaknya, terjadi kekeringan hingga krisis air bersih tak hanya di pulau Jawa, namun meluas di sejumlah titik di Sumatera hingga Kalimantan.[1] Di wilayah pesisir Indonesia, akses air bersih untuk kebutuhan sanitasi hanya mencakup 66,7 persen. Reklamasi pesisir dan upaya eksploitatif lain menyebabkan rusaknya sumber air, terutama karena hilangnya mangrove yang berfungsi menjaga kualitas air.[2]

Krisis air bersih juga tidak bisa dipisahkan dari fenomena perubahan iklim (*climate change*). Implikasi dari perubahan iklim berdampak pada kehidupan manusia dan kondisi alam secara keseluruhan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satunya, misalnya, peningkatan suhu bumi secara eksponensial akibat lepasan gas rumah kaca semakin memperparah krisis air.[3] Hal ini disebabkan karena perubahan iklim mempengaruhi siklus hidrologi sebagai proses penciptaan air dan kondisi lingkungan lainnya. Akibatnya, selain memperparah krisis air, wilayah-wilayah yang dikenal kaya akan sumber air juga mengalami kekeringan.[4]

Secara kolektif, hak atas air bersinggungan dengan dimensi yang lebih luas, dari kehidupan sosial, religi, lingkungan, hingga politik masyarakat.

Selain disebabkan oleh fenomena alam, intervensi manusia turut andil dalam menciptakan krisis air. Penebangan hutan secara serampangan di berbagai wilayah menyebabkan hilangnya daerah resapan air, yang berujung pada bencana banjir yang merenggut banyak nyawa. Seperti di Daerah Aliran Sungai (DAS) Sentani, terjadi pengurangan daerah resapan air yang menyebabkan kekeringan pada musim kemarau. Luasan lahan kritis di sana mencapai 19,04 persen dari luas total DAS.[5]

Pembangunan dan aktivitas pabrik yang tidak mengindahkan sumber air di dekatnya menyebabkan air itu tercemar. Pembuangan limbah pabrik ke sungai dapat dijumpai, contohnya, di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Tak hanya sungai, air tanah di sana tercemar akibat limbah pewarna batik.[6] Pembiaran terhadap pembangunan fasilitas pariwisata yang tidak mempertimbangkan keberlanjutan ekologis wilayah setempat pun berujung pada berkurangnya pasokan air.

Krisis air yang terjadi penting untuk tidak dibiarkan lebih lanjut. Jika dibiarkan, maka akan berdampak terhadap kelangsungan hidup orang banyak. Dalam perlindungannya, sudah diakui terkait hak atas air sebagai hak asasi manusia yang melekat ke individu masing-masing. Tulisan ini akan mengurai pentingnya hak atas air beserta regulasinya, serta solusi yang dapat dipraktikan untuk menangani krisis air yang terjadi.

Hak Atas Air

Pengertian hak atas air sebagai hak asasi manusia masih menuai perdebatan. Terdapat tiga perdebatan utama yang masih berkontestasi: *pertama*, definisi atas cakupan, konten, dan indikator atas implementasinya; *kedua*, efektivitas dan ketepatan secara kontekstual dalam melawan praktik privatisasi air; dan *ketiga*, pengembalian pendekatan barat, individualis, dan antroposentris atas hak asasi air.[7] Sebagai hak asasi manusia, hak atas air memberikan beberapa implikasi: hak individu, hak kolektif, dan hak masyarakat adat.[8] Hak atas air memiliki berbagai dimensi, baik jika hak atas air dipandang sebagai hak individu maupun hak kolektif. Hak individu bersinggungan dengan hak sosial dan ekonomi lainnya seperti kesehatan dan pangan, sedangkan hak kolektif dikaitkan dengan hak untuk berkembang, untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya dan politik.[9] Secara kolektif, hak atas air bersinggungan dengan dimensi yang lebih luas, dari kehidupan sosial, religi, lingkungan, hingga politik masyarakat.[10] Selanjutnya, hak masyarakat adat untuk menentukan nasib sendiri dalam menggunakan sumber daya alam sesuai dengan praktik tradisional dan keyakinan spiritual mereka.[11]

Kandungan normatif pada hak atas air mencakup empat hal; ketersediaan, kelayakan, keterjangkauan, dan aksesibilitas atas air dalam konteks fisik dan ekonomi.[12] Ketersediaan air perlu terjamin kuantitasnya tanpa mengabaikan kemampuan masyarakat dalam mengakses air tersebut. Tolok ukur dalam memastikan keterjangkauan atas air bersih salah satunya adalah penerapan teknik dan teknologi yang murah serta penetapan kebijakan harga yang tepat atas air.[13] Keterjangkauan atas air bersih ini penting untuk menjadi perhatian khusus di tempat-tempat yang sumber airnya terancam atau bahkan telah tercemar.

Keterjangkauan air dalam aspek ekonomi tidak bisa dilihat secara general. Setiap kalangan memiliki kemampuan akses air yang berbeda-beda sehingga kriteria keterjangkauan secara ekonomi berada di ranah yang spesifik. Keterjangkauan tidak bisa dinilai semata-mata dari harga air. Harga air yang mahal pun belum tentu menjadi kendala berarti dalam upaya mengakses air.[14] Maka dari itu, perlu telaah komprehensif terkait keterjangkauan atas air.

Akses atas air secara fisik dan ekonomi tidak terpisahkan satu sama lain. Kualitas air secara fisik akan berpengaruh terhadap harga atas air tersebut terutama karena adanya proses distribusi air akibat rusaknya sumber air. Di samping harga air itu sendiri, buruknya sarana distribusi air juga dapat memengaruhi tingkat pengeluaran masyarakat atas air. Aksesibilitas air secara fisik yang perlu diperhatikan dalam ketersediaan air tidak hanya dalam kualitas dan kuantitas, tetapi juga keberlanjutan atas akses tersebut.[15]

Pengaturan Hak Atas Air

United Nation Water Conference pada tahun 1977 mengeluarkan resolusi yang menyatakan bahwa "Setiap orang [...] berhak memiliki akses terhadap air minum dalam kuantitas dan kualitas setara dengan kebutuhan dasar mereka." Melalui resolusi ini, hak atas air terlepas dari hak untuk hidup sehingga hak atas air merupakan hak yang berdiri sendiri. Konferensi tersebut juga mengharuskan adanya manajemen pembagian sumber air yang menyangkut program, perlengkapan, dan institusi sebagai upaya koordinasi di antara negara-negara yang berbagi.[16]

Dalam perkembangannya, hak atas air diakui sebagai salah satu dari hak asasi manusia. Pengakuan tersebut secara internasional tertuang dalam General Comments on the Right to Water atau dikenal dengan General Comments No. 15 (GC-15). Pengakuan ini dikeluarkan oleh Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR) pada November 2002 yang secara tegas menyebut dan mengakui bahwa hak atas air sebagai hak asasi manusia.[17]

Pada awal perkembangannya, di Indonesia hak atas air masih masuk ke dalam hak untuk hidup. Hal ini ditandai dengan hak atas air belum diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak atas air menjadi bagian untuk memenuhi hak untuk hidup, sebab air adalah komponen terpenting untuk memenuhi dan melindungi hak untuk hidup yang merupakan hak mutlak dan tidak bisa dikurangi.[18] Hal ini tercermin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Namun, dalam perkembangannya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013 atas Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Mahkamah Konstitusi mengakui dan menegaskan bahwa hak atas air merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia. Sebagai hak asasi manusia, hak atas air melekat bagi seluruh warga negara. Mengacu pada Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, maka hak atas air wajib dilindungi, dimajukan, ditegakkan, dan dipenuhi oleh negara terutama pemerintah.

Jika ditelaah secara historis, peraturan perundang-undangan mengenai air telah mengalami beberapa kali perubahan. Diawali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan diganti menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Kemudian pada tahun 2015, melalui *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi undang-undang tersebut dibatalkan. Empat tahun setelah itu tepatnya pada tanggal 7 September 2019, Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air (RUU SDA) menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang masih berlaku sampai sekarang.

Keadilan Air dan Pemenuhannya

Paradigma hak atas air mengalami perkembangan menjadi keadilan air dalam konteks pemenuhan terhadap air. Stockholm International Water Institute mendefinisikan keadilan air sebagai kombinasi dari keadilan sosial dan lingkungan yang berlaku untuk alokasi dan pengelolaan air (tata kelola air). Hal ini dilatarbelakangi oleh ketimpangan besar di seluruh dunia dalam mengakses air minum yang aman.[19] Ketimpangan yang terjadi menciptakan berbagai permasalahan dan merupakan suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Maka dari itu, perlu diciptakan kebijakan yang menjamin hak atas air dalam paradigma keadilan air.

Mengacu pada Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, maka hak atas air wajib dilindungi, dimajukan, ditegakkan, dan dipenuhi oleh negara terutama pemerintah.

Pengelolaan terhadap air perlu didemokratisasi, dan salah satu cara melakukannya adalah dengan memastikan bahwa air dilihat sebagai barang bersama atau barang publik.[20] Saat air dikontrol oleh pihak tertentu, maka pihak yang mengontrol dapat menentukan siapa saja segelintir orang yang berhak mendapat air. Misalnya, segelintir orang tersebut adalah orang yang memiliki uang. Hal ini tentu tidak adil bagi orang-orang dengan kapasitas ekonomi lemah, maka dari itu keadilan air dalam konteks ini tidak tercapai.

Krisis air yang disebabkan oleh kontrol segelintir pihak menunjukkan bahwa terdapat ketidaksetaraan akses terhadap air. Padahal, paradigma keadilan air, seperti namanya sendiri, menekankan prinsip keadilan dan partisipasi dalam pengelolaan dan distribusi air. Hal ini berpangkal pada kondisi riil manusia, bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa air. Air, dalam konteks kehidupan manusia, adalah sumber daya alam yang tidak bisa digantikan dengan alternatif lain. Oleh karena itu, setiap manusia harus dipastikan dapat memperoleh air.

Dalam pemenuhan hak atas air, krisis air perlu untuk ditanggulangi terlebih dahulu agar terjadi distribusi air secara merata.

Dalam pemenuhan hak atas air, krisis air perlu untuk ditanggulangi terlebih dahulu agar terjadi distribusi air secara merata. Solusi yang ditawarkan untuk memerangi krisis air adalah melalui *Integrated Water Resources Management* (IWRM). IWRM mencakup berbagai macam kegiatan, mulai dari pembangunan infrastruktur dan alokasi sumber daya air hingga pengaturan pembiayaan dan penerapan insentif untuk penggunaan dan perlindungan air yang efisien.[21]

Terdapat kondisi yang penting untuk mengimplementasikan IWRM; *pertama* kehendak politik dan komitmen; *kedua* rencana manajemen cekungan dan visi yang jelas; *ketiga* mekanisme partisipasi dan koordinasi, mendorong berbagi dan pertukaran informasi; *keempat* kapasitas pembangunan; *kelima* kerangka hukum dan peraturan yang fleksibel dan dapat ditegakkan dengan jelas; *keenam* rencana alokasi air; *ketujuh* investasi yang memadai, stabilitas keuangan dan pemulihan biaya yang berkelanjutan; *kedelapan* pengetahuan yang baik tentang sumber daya alam yang ada di wilayah sungai; dan *kesembilan* pemantauan dan evaluasi yang komprehensif.[22]

Pendekatan IWRM secara komprehensif tertuang dalam bab tentang sumber daya air tawar di Agenda 21 of the Earth Summit. Agenda 21 secara eksplisit mempromosikan penggunaan basis sumber daya dengan cara yang paling mendukung kesetaraan sosial, pembangunan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan.[23] Ketiga aspek ini perlu dijalankan secara beriringan. Hal ini dikarenakan sifat air tersendiri yang memiliki nilai sosial dan ekonomi yang tidak terlepas dari satu sama lain.

IWRM dapat menjadi salah satu pendekatan penting untuk diterapkan di negara-negara yang memiliki permasalahan krisis air. Hal ini perlu untuk diimplementasikan ke dalam regulasi dan kebijakan publik. Setelah IWRM diterapkan, harapannya sumber daya air dapat memenuhi keberlanjutan sehingga air dapat terus digunakan oleh generasi mendatang.
[Alfina dan Jessica]

Catatan Akhir

[1] Tanpa Nama, "Kemarau Panjang, Krisis Air Bersih Meluas di Sejumlah Wilayah," CNN Indonesia, 15 Agustus 2019, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190815064634-32-421471/kemarau-panjang-krisis-air-bersih-meluas-di-sejumlah-wilayah, diakses pada 18 Juni 2020.
[2] Ambari, "Indonesia Negeri Tropis, tapi Krisis Air Bersih di Kawasan Pesisir Terjadi?" Mongabay, 23 Maret 2018 https://www.mongabay.co.id/2018/03/23/indonesia-negeri-tropis-tapi-krisis-air-bersih-di-kawasan-pesisir-terjadi/, diakses pada 10 Juni 2020.
[3] Farhana Sultana, "Water Justice: Why It Matters and How to Achieve It," *Water International* 43, 4 (2018): 2–3.
[4] James L. Wescoat, "Water, Climate, and the Limits of Human Wisdom: Historical-Geographic Analogies Between Early Mughal and Modern South Asia," *Professional Geographer* (2013): 4.
[5] Christopel Paino, "Daerah Tangkapan Air Rusak, Krisis Air Menjadi Ancaman Kota Jayapura," Mongabay, 30 Oktober 2017, https://www.mongabay.co.id/2017/10/30/daerah-tangkapan-air-rusak-krisis-air-menjadi-ancaman-kota-jayapura/, diakses pada 4 Juni 2020.
[6] Tanpa nama, "Polemik Limbah Batik di Kota Pekalongan," Radar Pekalongan, 18 Desember 2019, https://radarpekalongan.co.id/90786/polemik-limbah-batik-di-kota-pekalongan/, diakses pada 4 Juni 2020.
[7] Emanuele Fantini, "An Introduction to The Human Right to Water: Law, Politics, and Beyond," *WIREs Water* 7, 2 (2019): 1.
[8] Emanuele Fantini, "An Introduction to the Human Right to Water: Law, Politics, and Beyond," 2.
[9] Emanuele Fantini, "An Introduction to the Human Right to Water: Law, Politics, and Beyond," 2.
[10] Emanuele Fantini, "An Introduction to The Human Right to Water: Law, Politics, and Beyond," 2.
[11] Emanuele Fantini, "An Introduction to the Human Right to Water: Law, Politics, and Beyond," 2.
[12] Salman M,A, Salman, "The Human Right to Water and Sanitation: is The Obligation Deliverable?" *Water International* 39, 7 (2014): 975
[13] Salman M,A, Salman,. "The Human Right to Water and Sanitation: is The Obligation Deliverable?" 976
[14] Erik Gawel dan Wolfgang Bretschneider, "Specification of a Human Right to Water: a Sustainability Assessment of Access Hurdles," *Water International* 42, 5 (2017):590.
[15] Nastiti, dkk, "The Effect of Physical Accessibility and Service Level of Water Supply on Economic Accessibility: a Case Study of Bandung City, Indonesia," *Water International*, 42, 7 (2017):6.
[16] Arinto Nurcahyanto dkk, "Hak Atas Air dan Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Akses terhadap Air," *Mimbar* 31, 2 (2015): 389.
[17] Arinto Nurcahyanto dkk, "Hak Atas Air dan Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Akses terhadap Air," 389.
[18] Mimin Dwi Hartono, "Hari Air Sedunia: Negara Wajib Penuhi dan Lindungi Hak atas Air," Komnasham, 22 Maret 2017, https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2017/3/22/298/hari-air-sedunia-negara-wajib-penuhi-dan-lindungi-hak-atas-air.html, diakses pada 18 Juni 2020.
[19] Farhana Sultana, "Water Justice: Why It Matters and How to Achieve It," 2.
[20] Farhana Sultana, "Water Justice: Why It Matters and How to Achieve It," 8.
[21] Roberto Lenton dan Mike Muller, "Introduction," dalam Roberto Lenton dan Mike Muller, ed., *Integrated Water Resource Management in Practice* (Quicksilver Drive: Earthscan, 2009): 7.
[22] Tanpa Nama, "Integrated Water Resources Management: Basic Concepts," IWA Publishing, https://www.iwapublishing.com/news/integrated-water-resources-management-basic-concepts, 22 Juni 2020.
[23] Roberto Lenton dan Mike Muller, "Introduction," 7.

Akan Segera Terbit!

"Pandemi"

Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Indonesia

Vol. 2 No. 2 Tahun 2020

"Air Keran dalam Kemasan": Solusi Penyediaan Air Minum atau Eksploitasi Sumber Daya?

© Aris/BAL

AMDK dipandang sebagai solusi terbaik penyaluran air minum. Di sisi lain, AMDK justru menyebabkan sebagian masyarakat kesulitan mengakses air bersih. Bagaimana hal ini dapat terjadi?

Pendahuluan

Pada Desember 2019, Rachmat Hidayat, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Air Minum Dalam Kemasan (Aspadin), memprediksi bahwa penjualan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) akan meningkat di tahun 2020.[1] Peningkatan yang diproyeksikan sebesar 10% ini lalu direvisi menjadi 8-9% akibat wabah COVID-19. Rachmat menyatakan bahwa penjualan produk kemasan *cup* dan botol menurun, namun produk kemasan galon cenderung stabil.[2]

Stabilnya pertumbuhan bisnis AMDK di Indonesia disebabkan oleh buruknya kualitas air. Mengutip dari tirto.id, walaupun sebagian besar warga Jakarta sudah menggunakan air PDAM, lebih dari 65% menggantungkan konsumsi air minumnya pada AMDK dan terus bertambah setiap tahunnya karena Sungai Ciliwung telah tercemar.[3] Penelitian menunjukan bahwa pencemaran yang terjadi di Sungai Ciliwung di bagian hilir semakin berat. Tidak hanya Sungai Ciliwung, data dari Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan menunjukan ada 52 sungai lain yang berstatus tercemar berat.[4]

Pertumbuhan bisnis AMDK tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di Amerika Serikat (AS). Berdasarkan data dari Statista, peningkatan jumlah AMDK yang dikonsumsi masyarakat AS pada tahun 2018 meningkat sebesar 5,3%.[5] Berbeda dengan Indonesia yang kualitas airnya buruk, kualitas air di AS justru lebih baik daripada AMDK. Salah satu contoh kasusnya adalah AMDK bermerek Fiji. Melalui iklannya, Fiji mengklaim kualitas produknya lebih baik ketimbang air keran yang disediakan oleh pemerintah kota Cleveland. Akan tetapi, hasil uji coba pemerintah Kota Cleveland menunjukkan bahwa kualitas AMDK Fiji tidak lebih baik daripada air keran Kota Cleveland. Pertumbuhan bisnis AMDK di AS didorong oleh strategi perusahaan AMDK yang berusaha mengubah pola pikir masyarakat dari bergantung pada air keran menjadi mengkonsumsi AMDK.

Bergesernya pola pikir masyarakat ke AMDK membawa dampak negatif bagi lingkungan. Eksploitasi yang dilakukan oleh perusahaan AMDK dapat mengakibatkan kekeringan di area sekitarnya.[6] Selain itu, konsumsi AMDK yang tinggi juga dapat mencemari lingkungan melalui sampah plastik. Di Indonesia, tercatat penggunaan botol plastik mencapai 4,82 miliar.[7]

Sejarah AMDK

AMDK pertama kali diproduksi secara massal oleh perusahaan *The Holy Well Bottling Plant* di Holy Well, Inggris pada 1622 dan dapat dengan cepat menyebar ke berbagai penjuru di Eropa.[8] Pada tahun 1700-an popularitas produk AMDK dari sumber mata air mineral semakin meluas di Eropa dan AS. Popularitas tersebut diraih karena AMDK dipercaya memiliki kemampuan menyembuhkan penyakit dan efek terapis.

Permintaan AMDK meningkat selama abad ke-18 dann ke-19 karena kebiasaan spa terapi air para kolonis Eropa dan AS.[9] Bersamaan dengan revolusi industri, saat kota-kota menjadi pengap, maka budaya spa menjadi suatu tren.[10] Seorang pengusaha AS bernama Hiram Ricker mulai menjual air minum dari mata air pada tahun 1844.[11] Satu minggu sejak ia rutin meminum air yang berasal dari mata air tersebut, gangguan pencernaan dispepsia yang dialaminya perlahan pulih. Kemudian, Hiram berinisiatif untuk menjualnya seharga 5 sen per galonnya. Penjualan air minum diperluas ke seluruh Inggris pada tahun 1859. Pada saat itu, penjualan air minum dalam bentuk barel hingga tahun 1876, perusahaan air minum yang dimiliki Rickers bersaudara ini menjual air minum dalam kemasan botol.

> *Karena itu, produsen AMDK melakukan promosi dan kampanye untuk menggeser pola pikir masyarakat dari bergantung pada air keran ke AMDK.*

Komersialisasi air dengan jumlah cukup besar juga dilakukan oleh New York's Saratoga Springs pada tahun 1856, dengan memproduksi lebih dari tujuh juta botol AMDK setiap tahunnya.[12] Wabah kolera dan tifus yang melanda AS pada saat itu menjadi salah satu alasan meningkatnya penjualan AMDK.[13] Popularitas AMDK mulai menurun ketika ditemukan alternatif sumber air minum yang aman dan relatif lebih terjangkau. Proses klorinasi yang ditemukan pada awal abad ke-20 dapat membuat air keran menjadi lebih aman dan sehat untuk dikonsumsi. Setelah mengalami penurunan yang cukup lama, AMDK kembali meraih popularitasnya dari keberhasilan strategi pemasaran perusahaan Perrier. Perusahaan tersebut berhasil melakukan "pencitraan" bahwa AMDK adalah sumber air minum yang sehat dan terpercaya.

Selain berhasil melakukan "pencitraan", pada 1973 ditemukan *patented polyethylene terephthalate* (PET).[14] Penemuan PET dinilai sangat menguntungkan karena dapat menahan tekanan air karbonasi. Hingga hari ini, PET telah menggantikan kaca untuk pengemasan botol minum kemasan sekali pakai karena sifatnya yang ringan dan tidak mudah pecah. Meskipun botol plastik berbahan PET telah banyak digunakan, perusahaan AMDK pertama di Indonesia, PT Aqua Golden Mississippi masih menggunakan botol kaca pada awal produksinya pada 1973. Kemunculan Aqua berawal dari kesulitan sang pionir, Tirto Utomo dalam menjamu tamu asing dengan AMDK yang pada saat itu belum ada, AMDK produksi dalam negeri. Ketika berkunjung ke Indonesia, para tamu asing tersebut hanya minum air kemasan dengan alasan meminum air rebusan menyebabkan perut mereka sakit. Kemasan botol Aqua 950ml bernilai Rp75, harga tersebut hampir dua kali lipat harga bensin yang hanya Rp46 per liter.[15] Oleh karena itu, AMDK pada saat itu termasuk barang mewah dan eksklusif untuk kalangan atas.

Kebutuhan akan AMDK berkembang seiring dengan pesatnya pembangunan. Lahan terbuka yang berkurang akibat pembangunan yang pesat menyebabkan sulitnya memperoleh air layak konsumsi. Hal ini merupakan peluang besar bagi industri AMDK. Industri AMDK pun mulai bermunculan pada tahun 2000-an. Hingga saat ini, produksi AMDK sudah menyentuh angka 29 miliar liter per tahun.[20]

Strategi Pemasaran AMDK

Masifnya konsumsi AMDK tidak terlepas dari strategi pemasaran untuk menggeser pola pikir konsumen dari air keran ke AMDK. Air keran adalah pesaing terbesar AMDK. Aksesibilitas yang lebih mudah dan harga yang jauh lebih murah merupakan kelebihan air keran yang sulit digantikan oleh AMDK. Hal ini seperti yang diutarakan oleh Robert Morrison, *Vice Chairman of Pepsi Company* bahwa musuh utama dari AMDK adalah air keran. Karena itu, produsen AMDK melakukan promosi dan kampanye untuk menggeser pola pikir masyarakat dari bergantung pada air keran ke AMDK.[16]

Cara yang ditempuh perusahaan AMDK dalam menggeser pola pikir masyarakat adalah menciptakan keraguan terhadap air keran. Produsen AMDK mengkampanyekan bahwa air keran tidak dapat dijamin kemurnian dan mengandung unsur-unsur yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Dengan demikian, produsen AMDK dapat menjual produknya dengan iming-iming proses pemurnian dan penjernihan dengan teknologi mutakhir. Produsen AMDK pun mengklaim produknya lebih aman untuk diminum daripada air keran.[17] Pada awal tahun 2000, air keran benar-benar bersaing dengan AMDK. Perusahaan produsen AMDK memainkan sisi psikologis konsumen dengan menciptakan rasa ketakutan akan kontaminasi dan penyakit yang disebabkan oleh air keran.

Produsen AMDK juga melakukan pelabelan terhadap produknya untuk meningkatkan penjualan. Pelabelan yang dilakukan adalah dengan mengaitkan produk dengan sumber mata air tertentu.[18] Merek Aqua melalui iklannya menyatakan bahwa produknya berasal dari mata air pegunungan dan dikemas langsung di sumbernya. Selain Aqua, merek Le Minerale juga mengklaim bahwa produknya berasal dari mata air langka di bawah lapisan batuan pegunungan. Dengan begitu, mereka dapat menaruh slogan "natural" atau "kaya akan mineral yang menyehatkan" pada produknya.

Selain dengan menciptakan keraguan terhadap air keran dan pelabelan produk, produsen AMDK

juga bekerja sama dengan restoran-restoran untuk memasarkan produknya. Coca-Cola pernah menjalankan program untuk mengurangi konsumsi air keran pada restoran. Program ini berbentuk pelatihan bagi pelayan restoran untuk menawarkan dan mempromosikan kelebihan dari AMDK. Program ini disambut baik oleh pemilik restoran karena dapat menaikan pendapatan mereka.[19]

Dampak Lingkungan Akibat Produksi AMDK

Masifnya konsumsi AMDK membawa dampak negatif terhadap lingkungan. Kemasan AMDK yang terbuat dari plastik butuh waktu sekitar 450 sampai 1.000 tahun untuk terurai.[20] Meningkatnya konsumsi AMDK mengakibatkan menumpuknya sampah botol plastik. Selain itu, meningkatnya kebutuhan terhadap AMDK menyebabkan eksploitasi berlebihan sumber mata air. Eksploitasi yang berlebihan ini dapat membawa dampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat di sekitar sumber mata air, seperti menurunnya permukaan air tanah dan pencemaran terhadap lingkungan.[21]

Sebagian besar plastik yang digunakan untuk produksi botol AMDK memang dapat didaur ulang, namun hal tersebut tidak mengurangi dampak buruknya bagi lingkungan karena kebanyakan botol plastik yang diproduksi saat ini menggunakan bahan PET. Bahan tersebut berasal dari bahan bakar fosil, yang merupakan sumber energi tidak terbarukan.[22] Penggunaan bahan bakar fosil secara berlebihan akan membawa dampak negatif kepada lingkungan seperti terganggunya keseimbangan ekosistem alam.[23]

Mengutip National Geographic, produksi botol plastik di dunia mencapai 50 miliar tiap tahunnya.[24] Namun, tingkat daur ulang plastik di dunia hanya sekitar 9%. Hal ini menyebabkan penumpukan sampah botol plastik yang membahayakan lingkungan, baik laut maupun darat.[25] Di laut, sampah plastik membahayakan biota laut karena rentan termakan oleh hewan-hewan laut dan melukai mereka. Salah satu kasus yang pernah ramai dibicarakan adalah penemuan paus terdampar yang sudah mati dalam keadaan perut penuh botol plastik. Sedangkan di darat, sampah plastik dapat menyumbat saluran air dan mencemari tanah. Sampah plastik yang dibakar juga dapat mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan penduduk di sekitarnya.[26]

Banyaknya sampah plastik berarti bahan baku yang dikeluarkan untuk memproduksi botol plastik juga banyak. Untuk memproduksi satu botol plastik ukuran satu liter, dibutuhkan sekitar tiga liter air. Air ini pun harus langsung dibuang. Selain air, produksi botol plastik juga membutuhkan minyak. Dibutuhkan sekitar 17 juta barel minyak untuk memproduksi botol plastik dalam setahun.[27]

Eksploitasi yang dilakukan oleh perusahaan AMDK juga membawa dampak buruk terhadap lingkungan di sekitar pabrik. Pabrik Aqua di Sukabumi memanfaatkan sumber air hampir sama banyaknya dengan yang dilakukan oleh PDAM Kota Sukabumi. Hal ini mengakibatkan warga mengalami kesulitan air bersih. Sebelum berdirinya pabrik Aqua, sumur milik warga dapat tetap menyediakan air walaupun sedang musim kemarau. Sejak pabrik berdiri, warga harus menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan air bersih.[28]

Dampak buruk akibat berdirinya perusahaan air minum juga dirasakan oleh warga Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan. Walaupun pada awalnya warga menerima dengan baik, lama-kelamaan pabrik mulai menimbulkan masalah. Dampak paling serius yang ditimbulkan adalah kelestarian lingkungan yang terancam. Ikan-ikan di sungai mulai mati akibat tercemar limbah hasil proses produksi. Baik pabrik Aqua maupun pabrik Amsil menyebabkan pencemaran air berupa limbah cair yang bau dan pencemaran udara akibat operasi mesin yang bising. Truk pengangkut milik pabrik sering menimbulkan kemacetan dan mengganggu warga khususnya yang berada di sekitar gerbang pabrik.[29]

Absennya peraturan perundang-undangan yang memiliki mekanisme kontrol yang jelas terhadap komersialisasi air oleh pihak swasta juga menjadi penyebab menjamurnya perusahaan AMDK di Indonesia.

Pemecahan Masalah

Konsumsi AMDK yang masif di Indonesia salah satunya disebabkan oleh rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap sumber mata air yang aman untuk dikonsumsi, terutama di wilayah perkotaan. Kriteria air minum aman konsumsi ini meliputi air yang bebas dari polutan fisik, biologis, maupun kimiawi seperti kekeruhan, materi organik dan bakteri. Di Indonesia, akses terhadap air minum aman konsumsi hanya menjangkau 77% dari total populasi.[30] Selain itu, strategi pemasaran perusahaan AMDK yang melakukan pelabelan berkontribusi pada masifnya konsumsi AMDK di Indonesia. Absennya peraturan perundang-undangan yang memiliki mekanisme kontrol yang jelas terhadap komersialisasi air oleh pihak swasta juga menjadi penyebab menjamurnya perusahaan AMDK di Indonesia.

Tingginya konsumsi produk AMDK di Indonesia seharusnya bisa diredam dengan Undang-undang Sumber Daya Air (SDA) untuk menekan produksi AMDK di Indonesia. Namun, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 yang mengatur tentang Sumber Daya Air justru mengakomodasi kepentingan swasta dengan tidak membatasi penggunaan SDA untuk kebutuhan usaha pada air permukaan. Artinya, perusahaan AMDK bisa mengeksploitasi[31] air bawah tanah dengan mesin bor berkekuatan tinggi. Selain itu, pemerintah juga melakukan pembedaan kategorisasi[32] antara AMDK dengan air bersih (kebutuhan pokok) yang mengakibatkan perusahaan AMDK dapat melakukan manufakturisasi air minum

tanpa bekerja sama dengan badan usaha milik negara. Maka dari itu, adanya produk hukum yang membatasi komersialisasi air minum oleh swasta sangat diperlukan untuk mengurangi produksi AMDK di Indonesia.

Realitas kondisi sumber air perkotaan yang seringkali tercemar oleh sampah dan limbah kimiawi hasil industri menjadi pendorong masifnya konsumsi AMDK. Salah satu solusi dari masalah ini adalah adanya penyediaan melalui sistem perpipaan terpusat[33] yang memungkinkan akses yang setara atas air bersih. Untuk mencapai akses yang setara, sistem perpipaan terpusat ini seharusnya tidak diprivatisasi maupun tidak dikelola dengan skema swasta-publik. Akses yang setara atas air bersih ini akan memungkinkan masyarakat untuk mengurangi konsumsi AMDK.

Penutup

Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap produk AMDK disebabkan oleh buruknya kualitas air akibat dari pencemaran lingkungan dan kerusakan ekologis atas sistem air tanah di beberapa wilayah perkotaan di Indonesia. Hal ini semakin diperparah dengan strategi pemasaran perusahaan AMDK yang berupa pelabelan. Selain itu, produk hukum yang seharusnya menjalankan kontrol atas privatisasi air minum justru berpihak pada komersialisasi oleh swasta – hal ini dibuktikan dengan penciptaan kategori baru atas air, air minum dan air bersih sebagai kebutuhan pokok. Di samping pembuatan peraturan perundang-undangan mengenai sumber daya air yang membatasi komersialisasi air minum oleh pihak swasta, hadirnya penyediaan air bersih melalui sistem perpipaan terpusat juga penting untuk memastikan aksesibilitas air bersih yang setara antar warga negara. Selain itu, pendekatan yang diambil untuk memastikan kesetaraan akses air bersih layak minum ini haruslah beragam dan disesuaikan dengan kondisi setiap daerah.
[Fandy, Irma, dan Veronica]

---

[1] Agung Hidayat, "Bisnis Air Minum Kemasan Diprediksi Bakal Meningkat Tahun Depan", *Kontan*, 5 Desember 2019, https://industri.kontan.co.id/news/bisnis-air-minum-kemasan-diprediksi-bakal-meningkat-tahun-depan, diakses pada 22 April 2020.
[2] Arfyana Citra Rahayu, "Ada corona, Aspadin koreksi target pertumbuhan penjualan AMDK jadi 8%-9% di 2020", *Kontan*, 20 April 2020, https://industri.kontan.co.id/news/ada-corona-aspadin-koreksi-target-pertumbuhan-penjualan-amdk-jadi-8-9-di-2020?utm_source=dable, diakses pada 21 April 2020.
[3] Mawa Kresna, "Pasar Menggiurkan Air Minum Dalam Kemasan", *Tirto.id*, 25 Oktober 2015, https://tirto.id/pasar-menggiurkan-air-minum-dalam-kemasan-bXst, diakses pada 21 April 2020.
[4] Yudo, S. & Said, N. I., 2018. Status Kualitas Air Sungai Ciliwung di Wilayah DKI Jakarta: Studi Kasus Pemasangan Stasiun Online Monitoring Kualitas Air di Segmen. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 19(1): 21.
[5] Emma Bedford, "Volume growth of bottled water in the U.S. 2007-2018", *Statista*, 31 Juli 2020, https://www.statista.com/statistics/237836/volume-grwoth-of-bottled-water-in-the-us/, diakses pada 10 April 2020.
[6] Dwi sasetyaningtyas, "Sisi Gelap Air Minum Dalam Kemasan dan Botol Plastik", *Sustaination*, 18 Oktober 2019, https://sustaination.id/sisi-gelap-air-minum-dalam-kemasan-dan-botol-plastik/, diakses pada 21 April 2020.
[7] C. L. Illsley, "Top Bottled Water Consuming Countries", *WorldAtlas*, 25 April 2017, https://www.worldatlas.com/articles/top-bottled-water-consuming-countries.html, diakses pada 21 April 2020.
[8] Natraj Pandal, "Birth of the Bottled Water Industry," *BBC Research*, http://blog.bccresearch.com/birth-of-the-bottled-water-industry diakses pada 22 April 2020.
[9] Natraj Pandal, "Birth of the Bottled Water Industry,"
[10] Alexandre Nobajas, "The bottled water industry's healthy origins," *The Conversation*, 22 Maret 2018, https://theconversation.com/the-bottled-water-industrys-healthy-origins-92978 diakses pada 22 April 2020.
[11] Tanpa Nama, "Poland Spring," *Poland Spring Preservation Society*, http://polandspringps.org/pshistory.html, diakses pada 22 April 2020
[12] Tanpa Nama, "A brief history of bottled water in America," *Great Lakes Law*, Maret 2009, https://www.greatlakeslaw.org/blog/2009/03/a-brief-history-of-bottled-water-in-america.html diakses pada 22 April
[13] Alexandre Nobajas, "The bottled water industry's healthy origins,"
[14] Glenn Fowler, "N. C. Wyeth, Inventor, Dies at 78; Developed the Plastic Soda Bottle," *The New York Times*, 7 Juli 1990, https://www.nytimes.com/1990/07/07/obituaries/n-c-wyeth-inventor-dies-at-78-developed-the-plastic-soda-bottle.html, diakses pada 23 April 2020.
[15] Mawa Kresna, "Asal Muasal Air Minum Kemasan di Indonesia," *Tirto Id*, 25 Oktober 2016, https://tirto.id/asal-muasal-air-minum-kemasan-di-indonesia-bXsv, diakses pada 23 April 2020
[16] Peter H. Gleick, *Bottled and Sold: The Story Behind Our Obsession With Bottled Water* (Washington: Island Press, 2010), 7.
[17] Peter H. Gleick, *Bottled and Sold*, 17.
[18] Andy Opel, "Constructing Purity: Bottled Water and the Commodification of Nature," *Journal of American Culture*, 22, 4 (1999): 71.
[19] Peter H. Gleick, *Bottled and Sold*, 9.
[20] National Geographic Indonesia, "Efek Negatif Pemakaian Botol Plastik, Untuk Kesehatan dan Lingkungan", *National Geographic Indonesia*, 24 Desember 2014, https://nationalgeographic.grid.id/read/13295940/efek-negatif-pemakaian-botol-plastik-untuk-kesehatan-dan-lingkungan, diakses pada 7 Mei 2020.
[21] Achmad Sjafrudin, "Dampak Lingkungan Eksploitasi Air Tanah dan Pembangunan Pabrik AMDK PT. Tirta Investama di Kampung Salam, Desa Darmaga dan Pasanggrahan, Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang, Jawa Barat," *Bulletin of Scientific Contribution*, 7, 1 (2009): 18.
[22] The University of Queensland, "The Real Cost of Bottled Water", *The University of Queensland*, https://sustainability.uq.edu.au/projects/recycling-and-waste-minimisation/real-cost-bottled-water, diakses pada 3 Juli 2020.
[23] Jahrizal Harun, "Permasalahan Minyak dan Gas (MIGAS) di Riau," *Jurnal Ekonomi* 17 (2009): 50.
[24] National Geographic Indonesia, "Efek Negatif Pemakaian Botol Plastik, Untuk Kesehatan dan Lingkungan", *National Geographic Indonesia*, 24 Desember 2014, https://nationalgeographic.grid.id/read/13295940/efek-negatif-pemakaian-botol-plastik-untuk-kesehatan-dan-lingkungan, diakses pada 7 Mei 2020.
[25] Greenpeace Indonesia, "Sebuah Krisis Kenyamanan", *Greenpeace Indonesia*, 20 Oktober 2018, https://www.greenpeace.org/indonesia/publikasi/1267/sebuah-krisis-kenyamanan/, diakses pada 7 Mei 2020.
[26] Kumparan, "Begini Dampak Sampah Plastik Bagi Lingkungan dan Kesehatan Manusia", *Kumparan*, 13 November 2019, https://kumparan.com/kumparansains/begini-dampak-sampah-plastik-bagi-lingkungan-dan-kesehatan-manusia-1sExfNL4Tky/full, diakses pada 7 Mei 2020.
[27] National Geographic Indonesia, "Efek Negatif Pemakaian Botol Plastik, Untuk Kesehatan dan Lingkungan", *National Geographic Indonesia*, 24 Desember 2014, https://nationalgeographic.grid.id/read/13295940/efek-negatif-pemakaian-botol-plastik-untuk-kesehatan-dan-lingkungan, diakses pada 7 Mei 2020.
[28] Patria Rizky Ananda, "Pengaruh Water Resources Sector Adjustment Loan (WATSAL) Terhadap Pemenuhan Hak Atas Air di Indonesia," *Journal of International Relations* 5, 2 (2019): 384.
[29] Ihda Widyanto, "Dampak Keberadaan Industri Air Minum Kemasan Aqua dan Amsil Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Dusun Jati Anom Desa Karangjati Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan," *Swara Bhumi* 5, 3 (2017): 75-76.
[30] CNN Indonesia, "Akses aman air minum hanya jangkau 77 persen warga tahun ini", *CNN Indonesia*, 1 Maret 2019, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190301162021-92-373837/akses-aman-air-minum-hanya-jangkau-77-persen-warga-tahun-ini, diakses pada 29 April 2020.
[31] Hendra Friana, "Demi investasi, ruu sumber daya air abaikan konservasi," *Tirto.id*, 31 Agustus 2019, https://tirto.id/demi-investasi-ruu-sumber-daya-air-abaikan-konservasi-ehki, diakses pada 29 April 2020.
[32] Hendra Friana, "Demi investasi, ruu sumber daya air abaikan konservasi"
[33] Michelle Kooy, dkk., "Inclusive development of urban water services in Jakarta: The role of groundwater," *Habitat International* 73 (2018): 117.
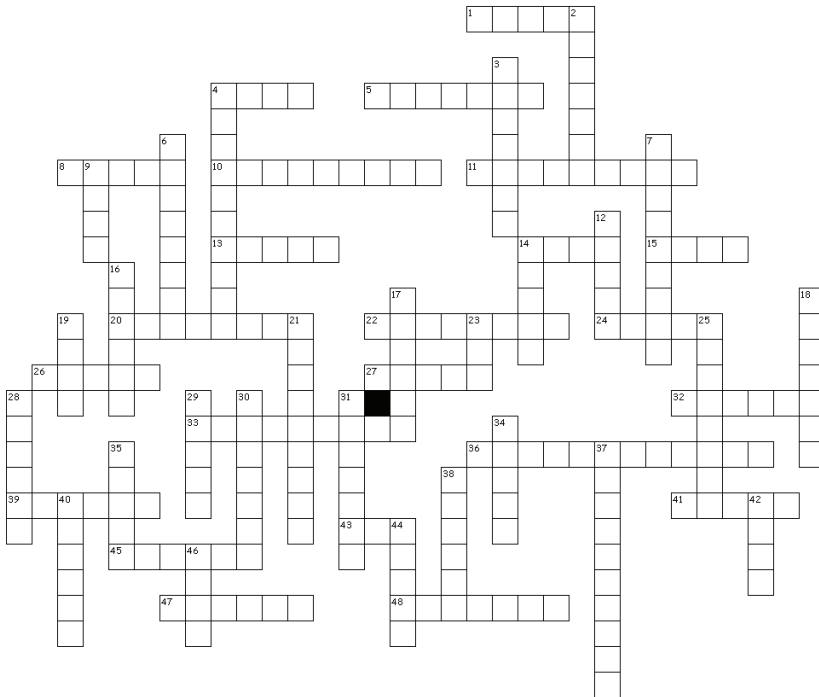
Mendatar

1. Berair dan berlumpur
4. Air gulai atau sup
5. Lokasi wisata selam di Indonesia
8. Zat cair buangan dari kandung kemih
10. Kehilangan cairan tubuh
11. Bangunan penahan atau penimbun air untuk irigasi
13. Sistem pengairan sawah di Bali
14. Pembangkit listrik yang ditenagai oleh air
15. Air minum dalam kemasan
20. Menggelembung atau meluap karena dipanaskan
22. Sungai besar
24. Awan lembap yang melayang di dekat permukaan tanah
26. Tenggelam ke dasar laut
27. Kota hujan
32. Dewa air (Agama Hindu)
33. Proses perubahan molekul zat cair menjadi gas atau uap air
36. Langkah yang dilakukan Singapura untuk mencegah krisis air
39. Cairan yang dihasilkan kelenjar ludah
41. Mengandung air atau barang cair
43. Daerah aliran sungai
45. Tongkat besar yang pipih dan lebar pada ujungnya untuk mengayuh
47. Mata air di Makkah
48. Berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut

Foto/tulis jawaban anda
dan kirimkan ke
balairungpress@gmail.com
sebelum tanggal 30 September 2020
Hadiah untuk 5 orang pengirim pertama!

Menurun

2. Musim jarang air
3. Pegunungan berisi mata air di Pati
4. Perubahan uap air atau benda gas menjadi benda cair
6. Sejenis gerabah untuk menyimpan air atau makanan
7. Peralihan musim
9. Aliran air yang deras di sungai
12. Kolam besar tempat menyimpan air sediaan untuk berbagai kebutuhan
14. Campuran air asin dan tawar
16. Tidak kering benar
17. Sejenis perahu kecil
18. Pengaturan pengairan dengan sistem tertentu
19. Singkatan nama divisi Mapagama yang melakukan pengarungan sungai
21. Ilmu tentang air
23. Udara (Inggris)
25. Penyedia air minum di UGM
28. Nama belakang penulis buku *Natural Hazards, Risk and Vulnerability: Floods and Slum Life in Indonesia*
29. Volume air yang mengalir dari suatu saluran
30. Arung jeram (Inggris)
31. Kapten kapal
34. Salah satu unit kegiatan mahasiswa di UGM
35. Akronim *coronavirus disease*
37. Masuknya air ke arah bawah ke dalam tanah
38. Peristiwa tergenangnya daratan
40. Sebutan untuk lokasi danau buatan di UGM
42. Kelompok butiran air
44. Nama waduk di DIY
46. Hujan (Jawa)

© Laras/BAL

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sebagai Kunci Kelestarian Sumber Daya Air

Hatma Suryatmojo
Dosen Fakultas Kehutanan UGM dan asisten peneliti di Laboratorium Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Hari Air Sedunia ke-28 telah diperingati pada 22 Maret lalu dengan mengambil tema "Water and Climate Change" (Air dan Perubahan Iklim). Tujuan peringatan hari air sedunia untuk mendorong agar masyarakat sedunia ikut memberi dukungan dalam konservasi air dengan cara penggunaan air secara bijak, sesuai kebutuhan dan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya air untuk kehidupan masa kini dan masa depan.

Menurut data United States Geological Survey, pasokan air total dunia setara dengan 1,34 milyar kilometer kubik yang meliputi 71% permukaan bumi. 97% air di bumi merupakan air laut, dan hanya 3% saja yang berupa air tawar. Sementara itu, 75% dari air tawar tersebut berwujud sebagai es dan glasier, 24% berwujud air bawah tanah, dan tinggal 1% saja air tawar yang tersebar di danau, sungai, sebagai lengas tanah dan di atmosfer. Maka sesungguhnya manusia hanya mengelola kurang dari 0,33% air di bumi yang berwujud air di danau dan sungai saja, itupun masih kewalahan sehingga menimbulkan berbagai masalah lingkungan.

Data PBB menyebutkan bahwa 2,1 miliar orang tidak memiliki akses yang baik terhadap air bersih, sehingga berpotensi mengganggu kesehatan dan kualitas hidup. Pengelolaan sumber daya air yang baik akan terwujud jika kita mampu mengelola keseimbangan dalam lingkungan hidup, maka setiap orang harus memiliki peran dan tanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan hidupnya. Meskipun jumlah air di bumi tetap, namun distribusi dan ketersediaannya selalu dipengaruhi oleh perubahan iklim. Perubahan iklim telah diindikasikan menjadi salah satu faktor munculnya masalah lingkungan hidup dunia dan mengancam kelanjutan sistem penyangga kehidupan. Perubahan iklim juga telah mendorong munculnya berbagai bentuk anomali cuaca ekstrem yang memicu terjadinya bencana hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi merupakan bencana yang diakibatkan oleh parameter-parameter meteorologi (curah hujan, kelembaban, temperatur, angin). Perubahan cuaca hanya pemicu saja, penyebab utamanya adalah kerusakan lingkungan yang masif akibat penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Salah satu satuan wilayah lingkungan penting sebagai sistem penyangga kehidupan adalah wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS). DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan (Permenhut RI Nomor: P.42/Menhut-II/2009). Definisi tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya seluruh permukaan daratan bumi telah terbagi habis dalam wilayah DAS. DAS

berfungsi mengatur neraca air, neraca sedimen, neraca hara, dan neraca energi. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 DAS, dan teridentifikasi 2.145 DAS membutuhkan pemulihan dan 108 DAS lainnya dalam kondisi kritis karena tutupan bervegetasi yang rendah, jumlah kerusakan lingkungan serta kejadian bencana yang selalu meningkat. Bahkan 50 dari 155 DAS besar di Pulau Jawa tidak memiliki penutupan lahan berhutan sama sekali. Kondisi tersebut mengindikasikan semakin menurunnya kualitas ekosistem DAS yang berimplikasi pada meningkatnya kejadian bencana terkait air (*disaster related water*) dan dipicu oleh anomali cuaca akibat perubahan iklim.

Keberadaan beberapa jenis potensi sumber daya alam seringkali menempati wilayah atau bentang alam yang sama, misalnya deposit bahan tambang dan mineral di dalam kawasan hutan. Akibatnya, terjadilah tumpang-tindih kepentingan dan kewenangan pengaturan pengelolaan sumber daya alam oleh instansi dan wilayah administrasi yang berbeda. Sementara itu, pengaturan dan pembagian wilayah administrasi pemerintahan tidak memperhatikan batas bentang alami DAS, maka pengelolaan sumber daya alam di dalam wilayah DAS selalu mengalami berbagai konflik kepentingan antarwilayah administrasi.

"Tanggung jawab bersama, bahwa keberhasilan dalam pengelolaan DAS tidak akan dapat tercapai jika beban dan tanggung jawab hanya diberikan kepada pemerintah tanpa melibatkan masyarakat dan para pihak lainnya."

Pengelolaan DAS diperlukan untuk mengatur hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan. Maka penting untuk menggunakan indikator ekosistem sebagai satuan unit terbaik dalam pengelolaan DAS. Namun, Konsep pengelolaan lingkungan hidup dengan mengutamakan kelestarian ekosistem DAS hingga saat ini masih belum menjadi sebuah kebutuhan mendesak. Tata ruang dalam DAS hendaknya mempertimbangkan fungsi dari setiap wilayah hulu, tengah, dan hilir serta perannya dalam menyeimbangkan neraca dalam DAS. Strategi yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kepedulian terhadap beberapa hal penting berikut:

Konservasi kawasan hulu DAS. Hulu DAS dicirikan sebagai kawasan dengan tingkat kesuburan sumber daya lahan yang tinggi, kelerengan tinggi, bervegetasi atau berhutan, memiliki curah hujan tinggi, berperan utama sebagai kawasan resapan air hujan (*recharge area*), dan berfungsi melindungi kawasan di bawahnya. Yang banyak terjadi di Indonesia, kawasan hulu telah dirombak menjadi fungsi lain seperti pemukiman, pertanian intensif, dan kegiatan pariwisata. Perubahan penggunaan lahan berimplikasi pada perubahan tata air yang berakibat penurunan fungsi perlindungan kawasan di bawahnya.

Kesadaran sebagai warga DAS. Sebagian besar masyarakat tidak atau belum memahami posisi dan lokasi lingkungan mereka beraktivitas dalam kaitannya dengan lingkungan yang lebih luas yaitu dalam wilayah kesatuan DAS. Sebagai kesatuan ekosistem, daerah hulu berperan sebagai daerah produksi air, erosi, dan unsur hara bagi kawasan-kawasan di bawahnya. Pengelolaan daerah produksi yang tidak mengindahkan keseimbangan ekosistem menjadi pemicu munculnya berbagai jenis degradasi ingkungan yang berdampak pada meluasnya lahan kritis dan meningkatnya frekuensi kejadian bencana.

Tanggung jawab bersama. Keberhasilan dalam pengelolaan DAS tidak akan dapat tercapai jika beban dan tanggung jawab hanya diberikan kepada pemerintah tanpa melibatkan masyarakat dan para pihak lainnya. Pelibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, pemantauan, dan evaluasi menjadi penting untuk mencapai fungsi dan dampak positif terhadap perbaikan ekosistem dan tata air DAS.

DAS adalah milik bersama. Ketika para pihak menyadari bahwa tanggung jawab pengelolaan ekosistem dan lingkungan DAS adalah milik bersama, maka semangat "memiliki" DAS akan menjadi modal yang kuat untuk dapat bersinergi membangun DAS yang sehat. Berbagai kegiatan yang mengajak dan menyadarkan masyarakat sebagai bagian dari masyarakat DAS, akan memunculkan rasa tanggung jawab terhadap kelestarian ekosistem dan lingkungan hidup.

Indonesia yang berada di wilayah tropis memang diuntungkan dengan iklim yang memberikan hujan yang melimpah, namun jika tidak dikelola siklus hidrologi DAS dengan baik, niscaya kerusakan ekosistem dan lingkungan akan terjadi. Mengelola ekosistem dan lingkungan hidup dalam konsep DAS bukan hal yang mudah, namun tidak mustahil untuk dilakukan. Perlu kesepahaman dari seluruh pemangku kepentingan, rasa memiliki yang sama, dan komunikasi yang baik dalam pelestarian ekosistem DAS. Semangat, motivasi, kebersamaan, dan sinergi menjadi kunci penting dalam upaya mengurangi risiko bencana akibat kerusakan DAS.

©Erika/BAL

Ancaman Reduksi Pengembangan Karakter dalam Pembelajaran Daring Selama Krisis Pandemi COVID-19

Di Indonesia, pembelajaran daring diiringi berbagai keluhan atas pelaksanaannya. Ketimpangan digital menjadi isu yang paling banyak diperbincangkan.

Zita Wahyu Larasati
Rezaldi Alief Pramadha
Dosen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan FISIPOL UGM

Pandemi COVID-19 memaksa penduduk dunia untuk mengambil tindakan pembatasan fisik demi menekan angka penularan penyakit tersebut. Bekerja dari rumah (*Work from Home*, WfH) atau sekolah dari rumah (*School from Home*, SfH) menjadi opsi terbaik untuk tetap menjalankan roda kehidupan kala wabah melanda. Kegiatan-kegiatan yang sebelumnya dilakukan melalui tatap muka kini sebisa mungkin dilakukan tanpa kontak langsung. Perkembangan teknologi informasi kini memungkinkan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya melalui jaringan internet atau sering disebut daring (dalam jaringan).

Di Indonesia, pembelajaran daring diiringi berbagai keluhan atas pelaksanaannya. Ketimpangan digital menjadi isu yang paling banyak diperbincangkan. Masih banyak mahasiswa yang harus bersusah payah mengakses kelas daring karena sinyal internet yang kurang baik. Dari sisi pengajar, kurangnya penguasaan keterampilan mengoperasikan aplikasi sarana pembelajaran daring membuat sejumlah dosen mengganti proses interaksi perkuliahan daring dengan pemberian tugas. Tak pelak hal ini memicu keluhan mahasiswa akan menumpuknya tugas pengganti perkuliahan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa strategi pembelajaran daring di kala pembatasan fisik berpeluang mereduksi interaksi dosen dan mahasiswa serta antarmahasiswa. Padahal, interaksi

interpersonal merupakan aspek penting dalam pengembangan karakter mahasiswa (Berkowitz, 2002).

Ancaman Reduksi Pengembangan Karakter

Menurut Ki Hadjar Dewantara, pendidikan merupakan upaya untuk menumbuhkan budi pekerti manusia agar selaras dengan dunia, sebagai konsekuensinya pendidikan semestinya mengarah pada Trisakti Jiwa (Dewantara, 2013). Trisakti Jiwa adalah tiga kekuatan dan keluhuran manusia yang diasah dalam proses pendidikan yaitu cipta, rasa, dan karsa. Cipta merupakan daya pikir manusia untuk mencari, mengolah, dan menemukan kebenaran. Rasa ialah kemampuan manusia untuk mengolah emosi dan perasaannya agar memiliki kepekaan sosial. Sedangkan karsa merujuk pada dorongan dari hasil olah pikir dan olah rasa yang diimplementasikan dalam suatu tindakan atau perbuatan. Lebih lanjut, Ki Hadjar Dewantara menjelaskan bahwa ketiga kesaktian jiwa tersebut adalah syarat mutlak untuk mewujudkan manusia susila atau makhluk yang berbudi dan beradab (Dewantara, 2013).

Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, tujuan dari pendidikan dapat diukur dari capaian luaran pembelajaran yang diharapkan terinternalisasi dalam diri setiap peserta didik. Capaian pembelajaran tersebut berisi kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pentingnya capaian pembelajaran tidak semata-mata ditujukan untuk memenuhi standar kompetensi yang diperlukan di tempat kerja, secara lebih luas untuk menghasilkan insan Indonesia yang cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestesis (Kemenristekdikti, 2015). Dengan demikian, capaian pembelajaran merujuk pada upaya untuk mengembangkan Trisakti Jiwa peserta didik.

Dalam implementasinya, proses pembelajaran daring tidak hanya mensyaratkan ketersediaan infrastruktur, tetapi juga pengetahuan dan keterampilan mengoperasikan teknologi. Menurut Indartono (2011), terdapat lima pendekatan dalam pembelajaran daring yaitu; *pertama, computer-based learning* (CBL); *kedua, computer-based training* (CBT); *ketiga, computer-supported collabortative learning* (CSCL); *keempat, technology-enchanced learning* (TEL); dan *kelima,virtual learning environment* (VET). Pendekatan tersebut secara berurutan menunjukkan tingkatan penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran daring.

Penentuan pendekatan sangat penting untuk memastikan proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif guna mengembangkan karakter peserta didik yang jujur, bertanggung jawab, mampu bekerjasama, disiplin, kritis, kreatif, dan inovatif (Mariah et al., 2018). Karakter kritis, menurut Freire (2000), membutuhkan lingkungan pendidikan yang dialogis di mana peserta dan tenaga didik berperan sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran yang dialogis, interaksi dan komunikasi antar tenaga dan peserta didik diperlukan sebagai upaya memproduksi pengetahuan secara kolektif. Dengan demikian, dalam pembelajaran daring tenaga pendidik semestinya memiliki keterampilan dan pemahaman atas strategi pembelajaran sibernetika yang efektif guna memastikan tercapainya luaran pembelajaran (Mariah et al., 2018).

Saat ini pelaksanaan pembelajaran daring telah didukung oleh berkembangnya beragam aplikasi pembelajaran. Setiap aplikasi memiliki karakternya, keunggulan, dan kelemahannya masing-masing yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran. Untuk mengurangi kelemahaan dari setiap aplikasi, tenaga pendidik dapat menggabungkan beberapa aplikasi. Misalkan dalam kegiatan presentasi menggunakan Google Meet, sedangkan untuk diskusi lebih lanjut menggunakan fitur diskusi dalam eLisa.

Implementasi pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 banyak menemui kendala terkait dengan keterampilan dan pengetahuan tenaga pendidik dalam mengoperasikan teknologi. Dari hasil studi yang dilakukan oleh Pusat Inovasi dan Kajian Akademik UGM tahun 2020 menunjukan kekurangcakapan tenaga pendidik dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan peserta didik melalui aplikasi pembelajaran menjadi masalah dalam proses pembelajaran daring (PIKA UGM, 2020). Padahal, jalinan komunikasi dan interaksi sosial dalam proses pembelajaran dibutuhkan untuk mengembangkan karakter peserta didik.

Pandemi COVID-19 masih belum terlihat ujungnya dan Indonesia belum menunjukkan kemungkinan untuk mengurangi pembatasan fisik. Tantangan dalam proses pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 ialah berupa ancaman kerentanan pengembangan karakter peserta didik. Sebenarnya, praktik pembelajaran tatap muka acap kali masih kurang mengindahkan pentingnya pendidikan yang dialogis. Namun, jika kondisi pembelajaran daring seperti ini dibiarkan berlarut-larut, kualitas pendidikan di perguruan tinggi, khususnya dalam hal pengembangan karakter, dikhawatirkan akan menurun. Agar pembelajaran daring dapat berjalan dengan efektif, maka dibutuhkan keaktifan dan kecakapan tenaga pendidik dan peserta didik, khususnya dalam memanfaatkan teknologi guna mengembangkan karakter peserta didik.

Daftar Pustaka

Berkowitz, M. W. (2002). The Science of Character Education: Bringing in A New Era in Character Education. *Stanford, CA: Hoover Institution Press*, 43–63.

Dewantara, K. H. (2013). Bagian Pertama: Pendidikan (Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka). In *Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa UST-Press bekerjasama dengan Majelis Luhur Taman Siswa*.

Freire, P. (2000). *Pendidikan Kaum Tertindas*. LP3ES.

Kemenristekdikti. (2015). Paradigma Capaian Pembelajaran. In *Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia*.

Mariah, S., Andayani, S., & Sari, A. (2018). Character Development In Virtual Class. *Proceedings of the 1st International Conference on Science and Technology for an Internet of Things*. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.4108/eai.19-10-2018.2282821

Pusat Informasi dan Kajian Akademiki (PIKA) UGM (2020). *Infografis Pembelajaran Daring Bagi Mahasiswa*. http://pika.ugm.ac.id/id/2020/03/31/infografis-pembelajaran-daring-2/

© Aris/BAL

Akhir Tanah Air

JJ Rizal
Sejarawan

Air menjadi tema utama prasasti-prasasti tertua di Indonesia. Kalau tak percaya tengoklah Prasasti Tugu abad ke-5 dan Prasasti Tuk Mas abad ke-6.

Para arkeolog menyakini leluhur di masa lalu memahkotai air sebagai pusat sesembahan. Air awal dan penggerak kehidupan. Air mengalirkan energi karena di dalamnya bersemayam dewa-dewa.

Setelah dua prasasti itu sejarah dihiasi aneka kisah penghormatan air dalam bentuk *patirthan* atau tempat-tempat air suci. *Patirthan* disetarakan bangunan suci. Secara konsep ruang disambung dengan gunung dan hutan. As dunia, *axis mundi*, di mana sorga dan bumi bertemu. Air membawa leluhur bukan melakukan penaklukan tapi peleburan diri dengan alam.

Negarakertagama dari masa Majapahit banyak menceritakan raja ke *patirthan*. Pusaka lain, *Sutasoma* menambahkan saat itu *petirthan* meluas jadi konsep identitas dan entitas masyarakat. *Sutasoma* karya Mpu Tantular selain sumber *bhineka tunggal ika*, juga memberi satu lagi inspirasi wawasan kebangsaan.

Via kisah Taman Ratnalaya sebagai "pulau yang tampak samar di tengah telaga" diungkapkan simbol paling ekspresif untuk mengingatkan dua unsur fundamental Nusantara: tanah dan air. *Negarakertagama* menambah kisah *petirthan* yang memuncak dalam istilah Nusantara, sebutan kepulauan lain yang di antarai perairan dengan Majapahit.

Selang dua abad kemudian, arus balik terjadi. Zaman gemilang memudar seiring kapal-kapal Eropa melayari perairan Nusantara. Sejak itu, "hari dulu yang indah" lenyap berganti "hari kini yang gelap" kata Sukarno pada 1930 dalam pidato *Indonesia Menggugat*.

Masih di pidato itu, Sukarno mencangkok Nusantara dan tanah air jadi istilah sekaligus pangkal tolak imajinasi bangsa yang ingin diwujudkan. Nusantara pun meluas artinya. Perairan dilihat bukan pemisah tapi penyatu kepulauan Indonesia. Nusantara menjadi sinonim Kepulauan Indonesia.

Wawasan itu kian jembar saat Sukarno pidato Pancasila 1 Juni 1945. "Hanya dua kali kita mengalami *nationale staat*, di zaman Sriwijaya dan Majapahit," katanya. *Nationale staat* ini merujuk zaman kekuasaan Indonesia seluruhnya. Baginya dua kerajaan itu telah menyatukan orang dan tempat huniannya yang merupakan negara kepulauan sebagaimana tercermin dalam kata Nusantara dan tanah air.

Dari sana, tanah air dan negara kepulauan yang dimaksud Sukarno dapat dijelaskan. Sejarawan maritim AB Lapian memadankannya dengan *archipelagic state* atau negara laut utama. Indonesia

adalah laut yang ditaburi pulau-pulau, bukan negara pulau-pulau yang dikelilingi laut. Tak ayal perairan seharusnya prioritas.

Pada masa awal republik, saat ekonomi hancur oleh perang revolusi lalu perang dingin disertai pemberontakan daerah, konsep *patirthan* yang menyelaraskan manusia dengan alam disambungkan kembali ke imajinasi Indonesia.

Wajar jika Yudi Latif peneliti Pancasila melihat "para pendiri bangsa kita sudah mengantisipasi kritik enviromentalis kini bahwa demokrasi itu terlalu antroposentris. Perlu mendengar aspirasi alam".

Visi misi kebangsaan itu hidup di antara elite. Hatta ketika ke Danau Toba pada 1950-an terpukau ekologinya. "Jagalah sebaik-baiknya jangan dirusak sebab ini akan menjadi tandon hidup anak cucu kita ke depan," pesannya.

Sukarno pada 1952 mengimplan *patirthan* dalam gagasan politik pangannya yang bertumpu kepada kesadaran keragaman ekosistem yang menyediakan aneka pangan lokal selain padi.

Bersamaan, ia mendorong menghidupkan kembali pelayaran nasional sebagai jalan menuju "Ekonomi Terpimpin". Perusahaan pelayaran Belanda, Koninklijk Paketvaart Maatschappij (KPM) dijadikan awal nasionalisasi perusahaan asing. Lantas Menteri Perhubungan Juanda ditugaskan membentuk PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI), setelah lebih dulu meresmikan Wawasan Nusantara. Menteri Maritim diangkat. Angkatan Laut RI jadi terkuat di Asia.

Tapi seiring G30S 1965 semua ikhtiar Sukarno yang masih seumur kanak itu dibunuh. Soeharto meskipun mengaku ayahnya *ulu-ulu*, petugas desa pengatur air, tapi ia mewakili kemenangan Angkatan Darat (AD). Persis Daendels diubahnya hukum. Ia buka infastruktur darat yang dikaitkan dengan pos-pos militer sisa masa darurat militer 1950-an. Tujuannya mengamankan mobilisasi modal global rekrutan sponsor AD sejak lama, USA. "*Economist with guns*," kata Bradley R Simpson.

Pada 1998, Soeharto digulingkan. Tapi, ia telah menyuburkan logika teritori dan logika kapital. Logika yang lahir dari ekonomi liberal pasar itu mendasari pembangunan yang penuh invasi, perlawanan, penaklukkan atas alam.

Hatta yang sensitif akan ekonomi eksploitatif pada 1972 mengkritik. "Kekayaan alam kita, air terjun diserahkan kepada asing, apabila rakyat perlu listrik, membeli listrik itu dari orang asing, adakah pelanggaran UUD 1945 yang lebih besar daripada itu?" kata Hatta.

Para teknokrat pengarah pembangunan Orde Baru pun dikritisi Hatta. Mengapa menambah kaya yang sudah kaya, tapi menindas rakyat? Lebih jauh dikatakan Pancasila mati di bawah Orde Baru, sebab pembangunannya bertentangan dengan UUD Pasal 27, 31, 34 dan terutama 33.

Para teknokrat yang disebut Hatta itulah konsultan ekonomi liberal pasar. Mereka menawarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono "tren global konsep koridor ekonomi". Lalu diwujudkan dalam Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Meskipun ambyar saat kekuasaan beralih ke Jokowi yang Sukarnois malah dilanjutkan. Padahal MP3EI berkelindan dengan reorganisasi rekonfigurasi ruang skala global untuk proyek liberalisasi ekonomi pasar melalui ekspansi produksi, distribusi, dan reproduksi kapital. Salah satunya BRI di Cina. Proyek yang bau anyir—istilah Sukarno—"nekolim" itu masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan terwujud dalam proyek Mega Infrastruktur.

Jokowi mengaku menghabiskan masa kecil sembilan tahun sebagai anak pinggir kali. Ia pun mencanangkan Indonesia poros maritim dunia. Tapi, ia minim referensi sejarah budaya sungai dan laut. Jadi miskin paradigma membangun peradaban berbasis *patirthan*. Kali-kali Jakarta dibetonnya. Nomenklatur Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Sumber Daya Energi dan Mineral, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Perhubungan di bawah Kementerian Koordinasi Kemaritiman dan Investasi.

Sampai di sini jelas "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya" diorientasikan melayani permintaan ruang-ruang produksi baru. Tak dipahami ada ekologi dan kehidupan sosial budaya di dalamnya. Logika *patirthan* diganti logika Van den Bosch perancang Tanam Paksa, yaitu proyek besar penaklukan dan pengerukan.

Jika tanah air semakin berjejaring, maka pinjam istilah Sukarno hanya efek "nafsu serakah mencari rezeki" yang perlu ruang jarahan baru. Di bawah visi ini, kota-kota berlomba nawarkan "tanah murah, buruh patuh, aturan cincai dan diskon pajak". Boro-boro jadi kota hijau atau biru yang ada kota abu-abu, aspal beton melulu.

Kartini di awal abad ke-20 pernah menyebut tentang jalan-jalan yang "terbuat dari kemajuan". Tapi, selang seabad, anak bangsanya membangun infrastruktur jalan di darat dan laut yang terbuat dari rentetan kerusakan lingkungan, pelanggaran HAM, pembodohan, korupsi, kesenjangan dan hilangnya pilihan hidup masyarakat, bahkan kriminalisasi terhadap mereka.

Tapi, semua kepiluan itu, dimistik jadi nol via indeks pertumbuhan produk regional sebagai statistik tunggal ukuran pembangunan. Ketimpangan struktural rakyat dianggap *hoax*. Sukarno di pidato Pancasila mencita-citakan membangun tanah air "semua untuk semua", ironisnya yang terwujud satu persen orang menguasai 50 persen kekayaan nasional dari hulu sampai muara, di darat, laut, dan udara.

Wajar saat wabah, kala kemanusiaan di titik paling rentan, pemerintah justru semakin jelas wataknya yang kemaruk kapital. Rakyat dianggap non faktor. Ini terasa dengan disyahkannya aneka UU eksploitatif.

Modus berpikir bukan apa yang benar, tapi apa yang untung menjangkiti semua lapis birokrasi. Eksekutif, legislatif, yudikatif, polisi, militer. Dari orang pertama di atas sampai ke bawah. Di pusat maupun daerah. Sampai di sini babak pamungkas tiba: akhir tanah air.

Menormalkan Banjir sebagai Manajemen Risiko Penduduk Pinggiran Megakota

Rupa manajemen risiko penduduk pinggir kali makin menekankan posisi mereka sebagai korban dari ketimpangan sosial Jakarta. Nyatanya posisi ini jauh dari tuduhan kaum elit dan pemerintah yang melabeli mereka sebagai penyebab banjir Jakarta.

Judul Buku
Natural Hazards, Risk and Vulnerability: Floods and Slum Life in Indonesia.
Penulis
Roanne van Voorst
Tebal Buku
161 Halaman
Waktu Terbit
2016
Penerbit
Routledge

Banjir Jakarta sudah sering menjadi *headline* berbagai media nasional di saat musim penghujan datang. Dari berbagai liputan tersebut, nampak bahwa banjir sudah menjadi momok bagi warga Jakarta. Luapan banjir dapat membawa penyakit dan melumat aset properti. Namun tetap saja, bantaran sungai yang sudah pasti terdampak banjir masih menjadi rumah bagi berbagai individu terpinggirkan di megakota Jakarta. Meskipun banyak dari penduduk tersebut tidak dapat memprediksi waktu kedatangannya secara akurat, mereka percaya bahwa banjir sewaktu-waktu pasti akan terjadi dan menenggelamkan pemukimannya. "Banjir sudah biasa," begitu kata orang-orang kampung Bantaran Kali, pemukiman kumuh dengan nama disamarkan di bantaran Sungai Ciliwung yang menjadi lokasi penelitian Roanne van Voorst.

Bagi mereka, hidup tidak hanya riskan dihempas banjir, tetapi juga kemiskinan dan penggusuran. Untuk menghadapi fenomena tersebut, para penduduk memiliki berbagai macam cara dan strategi dalam menghadapi situasi yang disebut sebagai ketidakpastian yang normal (*normal uncertainty*). *Normal uncertainty* menjelaskan bahwa ancaman seperti banjir, kemiskinan, dan penggusuran adalah kejadian yang tidak pasti akan terjadi, namun dianggap sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari penduduk Bantaran Kali.

Istilah *normal uncertainty* dicetuskan oleh Roanne van Voorst dalam disertasinya yang berjudul *Natural Hazards, Risk and Vulnerability: Floods and Slum Life in Indonesia*. Dalam rangka memenuhi studinya, van Voorst tinggal bersama penduduk Bantaran Kali dari 2010 sampai 2011 sebagai bentuk penelitian lapangan untuk disertasinya. Van Voorst mengidentifikasi berbagai macam bentuk respon penduduk terhadap risiko dan ancaman yang dihadapi oleh penduduk Bantaran Kali sehari-hari. Ada yang memanfaatkan situasi genting ini untuk menjadi rentenir bagi warga yang membutuhkan uang cepat. Ada yang memilih untuk mengedukasi masyarakat sekitar mengenai cara evakuasi banjir. Sementara itu, ada juga yang memilih untuk bergantung pada pihak luar. Tidak sedikit pula dari penduduk yang tidak percaya terhadap bantuan
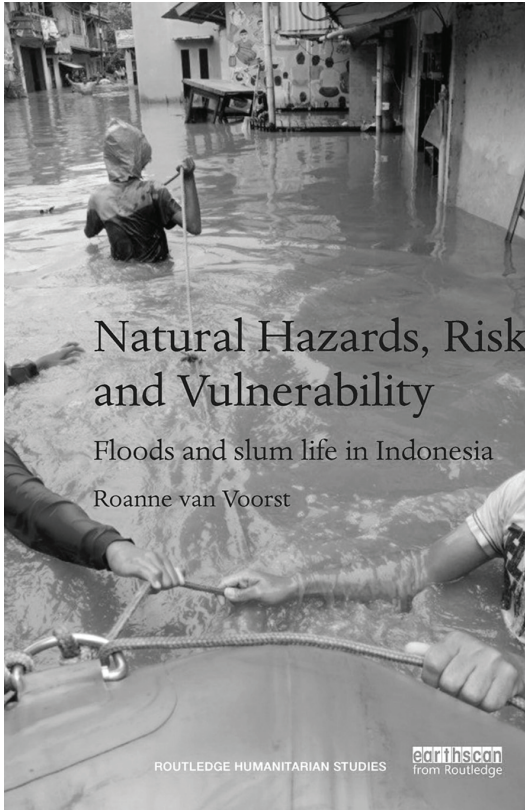
© Istimewa

orang lain dan memilih untuk membangun tempat evakuasi sementara sendiri.

Di balik bentuk respon yang beragam dari penduduk Bantaran Kali, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan dan konsolidasi respon terhadap risiko yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Van Voorst menegaskan bahwa faktor struktural dan individual saling membentuk dan memelihara satu sama lain dalam pembentukan respon penduduk. Kedua faktor ini pun melahirkan perilaku kehidupan yang berbeda-beda. Banyak penduduk Bantaran Kali merasa tidak memiliki pilihan selain tetap tinggal di Bantaran Kali ketimbang pindah ke daerah yang lebih baik. Mereka cenderung tidak percaya diri terhadap kemampuan dirinya untuk bertahan hidup di daerah asing dan memilih untuk bertahan. Beberapa dari penduduk memiliki relasi klientelisme, yaitu hubungan dengan organisasi berbasis massa seperti Front Betawi Bersatu, yang diyakini akan melindungi dan menolong mereka ketika banjir atau penggusuran terjadi. Contoh dari keberagaman ini memberikan kesimpulan bahwa baik kondisi psikologis seorang individu maupun posisinya dalam struktur sosio-ekonomi dalam masyarakat melatarbelakangi pembentukan respon terhadap ancaman dalam kehidupan sehari-harinya.

Dalam penelitiannya, van Voorst dengan gamblang menyatakan bahwa ia tidak ingin menjadi peneliti yang menggunakan lensa bencana yang sempit dalam memandang suatu isu. Ia justru memakai pendekatan luas yang memadukan paham antropologi, sosiologi, dan psikologi. Pemaduan berbagai paham ini berhasil menghasilkan tulisan yang holistik sehingga turut menjelaskan berbagai isu yang sendirinya merupakan diskursus menarik. Beberapa dari isu tersebut adalah prostitusi, premanisme, dan isu kelas. Selain itu, pendekatan van Voorst juga nampak keunggulannya saat ia berhasil menjelaskan kompleksitas kehidupan sehari-sehari penduduk Bantaran Kali sebagai bentuk aktivitas berkehidupan yang tak selamanya dapat dikaitkan dengan banjir. Kompleksitas tersebut dipaparkan dengan telaten sehingga responden menjadi lebih dari karakter satu dimensi saja. Walhasil, dalam bukunya terdapat berbagai macam sudut pandang individu sehingga tidak ada kesan menggeneralisasi.

Terlepas dari kelebihan di atas, buku ini juga diiringi beberapa kekurangan. Buku ini adalah disertasi van Voorst, sehingga menjadikan tujuan pasarnya dari kalangan akademisi dan bukan khalayak umum. Akibatnya, buku ini memiliki beberapa perbendaharaan kata yang tidak awam dalam penulisannya. Terlebih lagi apabila dipadukan dengan fakta bahwa buku ini ditulis dalam bahasa Inggris. Dari segi substansi, kekurangan dari buku ini adalah penelitian van Voorst yang dirasa terlalu berfokus kepada dinamika internal penduduk Bantaran Kali. Ini membuat van Voorst abai dengan pihak ketiga yang kerap berinteraksi dengan penduduk Bantaran Kali, misalnya NGO yang sering membantu di kala banjir dan akademisi lokal yang memang berkutat dengan isu banjir di Bantaran Kali. Perspektif eksternal ini seharusnya juga disajikan secara komprehensif di dalam buku, namun van Voorst lebih memilih untuk menyinggung permukaannya saja. Tidak terdapat hasil wawancara dengan pihak NGO maupun akademisi lokal dalam bukunya.

Akhir kata, van Voorst berhasil menggambarkan realita kehidupan penduduk pinggiran kali disorot dari kacamata akademik sehingga jauh dari tindakan berkepentingan. Ini dicerminkan dari keberhasilannya membungkus isu manajemen risiko, kaum marjinal, dan perilaku sosial yang sebelumnya masih dipandang sebelah mata oleh baik politisi maupun kaum menengah ke atas dalam disertasinya.. Hasil disertasinya juga disajikan dengan narasi yang runtut dan sederhana, walaupun isu yang diangkatnya cenderung kompleks. Namun, fakta ini tidak mengurangi kedalaman konten yang ada. Dengan demikian, disertasi ini dapat menjadi bahan wajib bagi yang ingin menyelami studi kaum marjinal serta pola pikir mereka secara lebih humanis.

[Aly dan Safira]

Menjunjung Rasa Kemanusiaan di Tengah Ketegangan Politik

Bagi Bajrangi, lebih mungkin menyeberangi batas India-Pakistan dengan kemanusiaan daripada dengan paspor dan visa.

Judul Film
Bajrangi Bhaijaan
Tahun
2015
Genre
Aksi, Komedi, Drama
Durasi
163 menit
Sutradara
Kabir Khan
Pemain
Salman Khan, Harshaali Malhotra
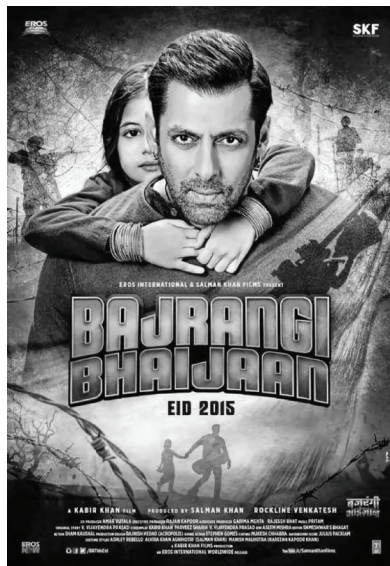
© Istimewa

Film diawali ketika seorang gadis kecil yang bisu bernama Munni (Shahida) terpisah dari ibunya saat melakukan perjalanan kembali ke Pakistan dari Delhi, India untuk mengunjungi Nizamuddin Auliya, tempat suci umat Muslim di sana. Ibu Munni berharap anaknya diberi mukjizat bisa berbicara. Ia kemudian bertemu dengan seorang pemuda baik hati dan taat beragama, Bajrangi. Bajrangi telah berjanji kepada Bajrangbali—Dewa Hanoman dalam kepercayaan Hindu—untuk membawa Munni pulang ke negara asalnya.

Pemuda tulus dan jujur pemuja Bajrangbali

Bajrangbali yang sangat Bajrangi puja, cukup banyak disebut oleh Bajrangi di film ini. Ketaatannya dalam beragama mengantarkannya pada salah satu sifat penting yang jarang dimiliki kebanyakan orang saat ini: ia tidak pernah berbohong. Bajrangi nekat meminta izin kepada penjaga pagar perbatasan untuk memasuki wilayah Pakistan. Uniknya, adegan ini merefleksikan keadaan dewasa ini, dimana orang-orang tidak segan melanggar norma agama untuk mencapai tujuannya.

Tolong menolong tanpa mengharapkan imbalan begitu ditekankan pada film ini. Perjuangan untuk mengantarkan Munni pulang tanpa memandang Munni sebagai gadis yang berbeda agama maupun negara dengannya sungguh luar biasa. Tanpa visa dan paspor, ia begitu berani sekaligus nekat melewati perbatasan kedua negara yang saling berkonflik itu.

Niat tulus untuk saling tolong menolong berlandaskan kemanusiaan Bajrangi kemudian mengantarkannya bertemu dengan seorang wartawan lokal, Chand Nawab. Kehadirannya sangat membantu perjalanan mereka mengantarkan Munni. Ia membawa sebuah *handycam* yang berperan mengabadikan momen perjuangan dan perjalanan mereka mengantarkan Munni ke Pakistan. Benda itu juga menjadi senjata pamungkas untuk melepas jeratan siksaan Bajrangi yang dilakukan para polisi karena ia ditangkap dengan tuduhan mata-mata India.

Film ini menunjukkan bahwa penyebaran informasi yang pesat dapat membawa dampak besar. Contohnya, ketika pengungkapan kebenaran sekaligus ajakan kepada para penonton untuk turut

bersimpati dan membantu merealisasikan tujuan mulia mereka oleh Chand Nawab. Akhirnya, dengan bukti video perjalanan mereka serta ajakan yang menggebu-gebu, membuat Bajrangi menghirup napas kebebasan kembali. Peranan sosial media dan pers untuk membuat gerakan memang sangat dahsyat karena mampu menarik perhatian orang-orang untuk turut mendukung tuntutan keadilan. Sesungguhnya, satu-satunya hal yang membuat orang-orang dapat mempercayai kita adalah bukti yang konkret, diiringi dengan kemampuan persuasif terhadap orang lain yang kuat.

Terbukti pada adegan akhir film ini yang menunjukan ribuan orang dari India dan Pakistan berkumpul di perbatasan India dan Pakistan. Mereka bersorak-sorak mengantarkan kepulangan Bajrangi sekaligus menyambut kedatangan kembali pria laksana pahlawan itu. Perpisahan yang mengharukan antara Bajrangi dan Munni kemudian terjadi dengan berbuah Munni yang dapat mengeluarkan suaranya kembali.

Hambatan tensi agama dan politik

Sejak awal, sejumlah interaksi dalam film tak hentinya mengingatkan betapa sulitnya menyeberang batas antara kedua negara yang berkonflik itu. "Lebih mudah pergi ke Amerika," cetus ayah Munni ketika kakeknya menyarankan Munni dan ibunya pergi ke India. Alasannya jelas: sulit mendapatkan visa ke negara tetangga. Kesulitan ini ditegaskan kembali oleh agen perjalanan yang menolak membuatkan Munni paspor.

Situasi ini memang benar adanya. Warga negara Pakistan atau keturunan Pakistan harus menunggu hingga delapan minggu untuk visa India, alih-alih normal tiga hari.[1] Minimnya mobilitas bisa jadi juga akibat dari ketiadaan penerbangan langsung Delhi-Islamabad.[2]

Parahnya ketegangan kedua negara tak bisa dilepaskan dari peristiwa The Great Partition atau pemisahan diri Pakistan dari India tahun 1947 yang digagas Partai Liga Muslim India.[3] Bagi penganut agama Hindu, umat Islam memecah tanah airnya.[4] Bagi Muslim, terus bersama India berarti tidak bisa menentukan nasibnya sendiri.[5] Meski partisi sebenarnya masalah politik, memihak ke pandangan tertentu disamakan dengan memilih agama satu dibandingkan lainnya.[6]

Permusuhan dalam negeri juga menonjol. Dayanand, calon mertua Bajrangi beragama Hindu, menyatakan tidak akan menerima orang yang berbeda agama di rumahnya. "Bangsanya sudah membunuh bangsa kita tanpa ampun," begitu keluh Dayanand ketika mengetahui Munni berasal dari Pakistan.

Sangat mungkin Dayanand merujuk pada serangkaian kerusuhan yang mengantarkan India pada partisi berdarah. 'Direct Action Day' di Kalkuta pada pertengahan Agustus 1946 mungkin paling representatif menjelaskannya. Pada hari itu, protes umat Islam mendesak berdirinya Pakistan diwarnai kekerasan, membunuh empat ribu orang.[7] Tahun-tahun selanjutnya tak kalah menyeramkan. Hindu atau Islam yang terjebak di "negara yang salah" harus siap mati. Hingga kini, orang-orang yang hidup pada masa itu menghindari pembicaraan tentang partisi. Peristiwa ini menjadi luka lama bagi semua orang, apapun kewarganegaraannya.

Menanggapi kenangan pahit tersebut, film ini berupaya menyampaikan pesan perdamaian. Salah satunya ketika Munni masuk ke dalam masjid dan Rasika—calon istri Bajrangi— serta Bajrangi berusaha mengejarnya. Rasika berupaya meyakinkan Bajrangi yang ragu masuk ke tempat suci agama lain: "Kasta dan agama itu omong kosong. Jangan buang waktumu untuk urusan sepele."

Satu lagi pesan dalam film ini: kebencian antara India dan Pakistan tidak inheren, melainkan terus dibakar oleh pemerintah. Meski rakyat Pakistan telah menunjukkan simpati kepada Bajrangi dan bukti telah cukup untuk menyatakan ia bukan mata-mata, Kepala Interservices Intelligence—badan intelejen Pakistan—tetap ingin ia ditahan. Fenomena ini menjadi simbol bahwa kebencian terus disulut pemerintah akibat permusuhan keduanya.

Apresiasi

Film ini patut diberi *standing ovation* karena keberaniannya menyampaikan pesan-pesan yang sensitif. Tak hanya pesan toleransi beragama yang kental, filmnya juga politis dengan menegaskan kepemilikan Pakistan atas sebagian kecil Kashmir. Tidak hanya menonjol secara konteks, kontennya pun patut diacungi jempol. Harshaali Malhotra piawai memerankan Munni yang polos, responsif serta jenaka, tidak terhalang ketidakmampuan berbicara karakternya. Hal yang sangat disayangkan adalah ketiadaan penjelasan mengapa Munni akhirnya bisa kembali berbicara ketika ia memanggil Bajrangi di akhir cerita. Meski mengharukan, kemampuan berbicara Munni yang muncul tiba-tiba tanpa penjelasan, menimbulkan *gap* dalam elemen kunci cerita.

Seperti pertandingan kriket sengit yang menjadi simbol rivalitas kedua negara, India dan Pakistan bersaing, bahkan nyata melawan satu sama lain dalam hampir semua medan. Bagi Bajrangi Bhaijaan, seperti kereta Samjhauta Express penghubung Delhi-Lahore yang ditumpangi Munni, hanya *samjhauta*—kompromi—yang bisa menyatukan keduanya.

[Feby dan Marsha]

---

[1] Robert Wintemute, "India's visa rule is unfairly persecuting innocent Pakistanis," *The Guardian*, 14 Agustus 2010, https://www.theguardian.com/commentisfree/2010/aug/14/india-visa-rule-persecutes-pakistanis, diakses pada 26 April 2020.

[2] Andrew Whitehead, "Partition 70 years on: The turmoil, trauma, and legacy," *BBC News*, 27 Juli 2017, https://www.bbc.com/news/world-asia-40643413, diakses pada 26 April 2020.

[3] Yasmir Khan, *The Great Partition: The Making of India and Pakistan* (New Haven dan London: Yale University Press, 2017), 18–20

[4] Yasmir Khan, *The Great Partition*, 94.

[5] Yasmir Khan, *The Great Partition*, 43.

[6] Yasmir Khan, *The Great Partition*, 35.

[7] Yasmir Khan, *The Great Partition*, 62–67.

Segera Hadir!

Rekrutmen Terbuka

BPPM BALAIRUNG

Redaksi | Penelitian dan Pengembangan

Produksi dan Artistik | Perusahaan

Kompleks Perumahan Dosen UGM
Bulaksumur B-21, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta 55281

© Laras/BAL

Cambuk dan Rantai

Iksaka Banu

Pemenang Kusala Sastra Khatulistiwa 2014 dan 2019 lewat karya Semua untuk Hindia *dan* Teh dan Pengkhianat

Sebuah Rumah di Leeuwengracht

Senja paling menakutkan adalah senja yang jatuh di atas kota Batavia. Tepatnya di daerah di belakang tembok benteng, di deretan rumah besar di tepi kanal-kanal itu. Setidaknya begitulah yang kurasakan selama tujuh tahun menetap di Batavia. Kesimpulan itu kudapatkan setelah membandingkannya dengan sejumlah daerah lain yang pernah kusinggahi. Ada perasaan aneh yang sulit dijabarkan setiap kali langit kota ini mulai berubah warna dari lembayung menjadi hitam.

Pikiran serta perasaan yang semula bekerja sehat, mendadak terpiuh. Takluk kepada angin malam yang berembus pelan, bau air laut yang busuk, gemerisik kain sarung orang-orang Jawa yang melangkah di kegelapan, bayang-bayang hitam yang menari di tembok seirama lenggak-lenggok obor dalam genggaman tangan mereka saat lewat di depan rumah kita, bau asam sirih dalam sisa ludah merah di tanah, aroma opium yang terbakar di dalam pipa bong di kedai-kedai candu orang Cina, serta uap kemelaratan yang menguar dari tubuh para gelandangan di emperan jalan. Semua itu menghadirkan rasa gentar yang ganjil.

Batavia *ommelanden* hari ini memang bukan kawasan seperti 50 atau 60 tahun lampau. Pesonanya telah lama sirna dimakan wabah kolera, beri-beri, malaria, dan pes.

"Bila engkau datang petang hari dari arah benteng melewati gerbang Amsterdam menuju selatan, yang akan kau jumpai adalah sebuah kota mati," demikian keluh kerabatku tak lama setelah kunjungannya yang ketiga ke Batavia.

Kerabatku itu seorang pecundang bermulut besar yang selalu mabuk, dan cepat sekali bangkrut setiap berlaga di meja judi. Nasibnya tak pernah beruntung. Sejak larangan berjudi diberlakukan oleh gubernur jenderal, ia juga sudah lebih dari empat kali keluar-masuk bui lantaran selalu hadir di mana pun acara haram itu dilangsungkan.

Dan seperti umumnya penjudi kawakan, seluruh omongannya melulu bualan, tak ada yang bisa dipercaya. Kecuali, ya, kecuali ucapannya soal aroma kematian di Batavia. Untuk satu hal itu aku sepakat. Pada petang tertentu, aku bahkan sering merasa sepasang mataku berpindah ke alam lain. Seolah bisa menyaksikan dengan jelas belasan teluh jahat melesat beriringan di udara dalam bentuk bintang-bintang berekor.

Baiklah, kurasa aku sedikit berlebihan. Sesungguhnya perkara teluh itu semata dongeng setempat yang kudengar dari Lucia, istriku. Ia memperoleh kisah itu dari budak perempuan tua yang setiap hari membantunya menyisir rambut sehabis mandi. Konon, melalui perantaraan seorang dukun sakti, teluh dikirim seseorang kepada pihak lain yang tidak ia sukai. Pemilik rumah yang terkena teluh akan mengalami satu dari tiga kemungkinan malapetaka ini: Mati, sakit parah, atau sedikitnya sial.

Sejauh ini tak ada orang, terutama kulit putih, yang bisa melihat wujud teluh. Ada yang mengatakan bemtuknya seperti gumpalan kain sebesar ibu jari berisi lintah, cacing, atau kelabang. Ada juga yang berisi potongan rambut, jarum, atau paku berkarat, yang langsung masuk ke dalam tubuh para korban, dan perlahan-lahan menghancurkan hidup mereka melalui penyakit muntah darah, bengkak besar, atau bisul-bisul bernanah yang tak kunjung sembuh hingga maut menjemput. Orang bisa merasakan hawa aneh tertentu bila berdekatan dengan si penerima teluh. Juga di sekitar tempat tinggalnya. Bahkan lama setelah orang yang bersangkutan meninggal atau pindah dari rumah itu.

Nah, mungkinkah kantor kejaksaan merangkap rumah dinas Tuan Jan Aldemar Staalhart di Leeuwengracht ini benar-benar pernah disusupi teluh? Selama dua kali aku bekerja lembur di sini, setiap petang selalu muncul hawa tak nyaman dari setiap sudut ruangan yang miskin cahaya ini. Seperti ada kepalan tangan dingin yang hinggap di tengkuk. Membuatku merasa sedang diawasi diam-diam oleh seseorang, atau sesuatu. Kesan mistis itu semakin terasa petang ini, karena hujan disertai guruh dan pijar kilat belum juga berhenti sejak pukul lima tadi.

Kabarnya, rumah ini dulu milik seorang saudagar utama, anggota Dewan Hindia terkemuka sekaligus salah satu pimpinan *schutterij*. Ia tewas di tembok benteng saat memadamkan pemberontakan Cina sepuluh tahun lalu. Seandainya masih hidup, besar kemungkinan ia menjadi salah seorang kandidat gubernur jenderal. Sayang sekali, nasibnya tidak sebaik itu. Bahkan kematiannya pun kemudian dihubungkan dengan hal mistis.

Sewaktu bujangan, pejabat ini diketahui menggauli seorang budak wanita sehingga memiliki seorang anak. Setelah istri Eropanya datang, si budak dan si anak disuruh pergi tanpa bekal keuangan layak. Konon sang budak tidak terima, lalu mengirim teluh yang berujung pada nasib sial si tuan di medan pertempuran. Itu berita yang santer bertiup di masyarakat. Namun aku curiga bukan teluh, melainkan racun tuba pada bekal makananlah yang mencabut nyawa orang malang itu.

Dosis tuba yang tidak terlalu besar mungkin hanya menyebabkan seseorang merasa sangat pusing dan mual. Namun cukup ampuh membuat konsentrasi hilang di tengah pertempuran. Bagaimana racun itu bisa masuk ke dalam makanan? Entahlah. Namun setahuku, para budak memiliki jaringan pertemanan luas.

Setelah kepergian suaminya, sang istri Eropa tak ingin tinggal lebih lama di Batavia. Ia menjual rumah ini kepada pemerintah, lalu kembali ke Belanda bersama anak-anaknya.

Aku tak mengerti, mengapa Gubernur Jenderal Jacob Mosel tidak menempatkan Tuan Staalhart di rumah dinas jaksa terdahulu di Noordwijk?

Rumah itu memiliki udara dan air yang jauh lebih bersih dibandingkan lingkungan kota tua ini. Sama seperti lingkungan rumahku di Gunungsari.

Bicara rumah, tak ada yang lebih kuinginkan saat ini selain tidur meluruskan kaki di rumah sendiri setelah seharian dipanggang matahari dan kerumitan urusan pekerjaan. Apa daya, malam ini Tuan Staalhart memintaku menemaninya mencatat dan menyusun laporan mengenai insiden yang terjadi siang tadi.

"Coba beri aku sedikit cahaya, Joost. Mari kita lihat ini," suara Tuan Staalhart yang berat memecah keheningan. Dengan lampu minyak tanah di tangan, aku membungkuk perlahan, mengekor jari telunjuk Tuan Staalhart.

"Ya, yang itu," kata Tuan Staalhart. "Tolong dekatkan lagi lampunya."

"Sebentar, Tuan," sahutku sambil memutar ulir lampu ke kanan agar nyala api bertambah besar. Kini semua yang ada di depanku terlihat jelas, dan kejelasan itu membuatku terdiam.

Cabikan-cabikan itu.

Sewaktu menjabat jaksa muda di Banda, aku pernah menyaksikan penduduk setempat mengambil getah damar. Pohon-pohon itu tumbuh liar, agak jauh dari perumahan penduduk. Mula-mula mereka melukai batang pohon dengan golok di beberapa tempat setinggi kepala mereka. Cairan bening mengucur ke luar dari luka bacokan, membentuk jalur-jalur lurus membasahi sekujur batang. Ada yang berhasil mencapai akar pohon, ada pula yang menumpuk di permukaan tanah. Tetapi kebanyakan berhenti di tengah, saling tumpang tindih, karena getah damar memang lekas membeku, mirip cairan lilin. Getah beku inilah yang diambil. Biasanya untuk bahan bakar, atau bahan pembuat cat perahu.

Itulah ingatan yang hinggap kembali di benak saat mengamati cabikan menyilang di hadapanku, yang tadi diperlihatkan Tuan Staalhart. Bentuk alurnya mirip. Hanya kali ini bukan gundukan getah damar yang kutatap, melainkan cabikan daging berlumur darah di atas tubuh seorang manusia yang bernapas tersengal-sengal. Bukan kedinginan, melainkan ketakutan. Seorang manusia. Perempuan berkulit cokelat. Telanjang bulat.

Ya. Itu bekas luka koyak yang mengering, lalu koyak lagi. Ada yang menggores sangat dalam, sehingga membuat tonjolan bergerigi dari bahu hingga ke pinggul. Sisanya berupa cabikan-cabikan sepanjang satu-dua jengkal, termasuk yang melukai buah dada kiri. Ketika Tuan Staalhart membersihkan luka tadi dengan alkohol, perempuan itu menggeliat dan merintih.

"Mereka benar-benar ingin meremukkan tubuh perempuan ini." Tuan Staalhart menggumam menyusul helaan napas panjangnya.

Aku tak tahu harus bicara apa. Jadi, kutatap saja pria tua yang wajahnya tampak semakin mengeras itu.

"Siapa tadi nama?" Tuan Staalhart mengangkat dagu si perempuan, bertanya dalam bahasa Melayu tak sempurna.

Perempuan itu mengeluarkan suara aneh. nyaris seperti suara kalkun.

"Ia takkan bisa menjawab pertanyaanmu, Tuan," kataku. "Seseorang telah mengerat seruas lidahnya di masa lalu. Lihat."

Kutekan kedua pipi perempuan itu sehingga mulutnya terbuka. Tuan Staalhart mengamati sebentar, lalu menggeleng.

"Bajingan!" makinya.

"Namanya Rasina," sambungku. "Tadi kudengar para bandit meneriakkan nama itu kepadanya."

"Tak ada seinci pun yang selamat dari siksaan," Tuan Staalharat mengarahkan lampu di tanganku ke bagian bawah tubuh perempuan itu.

"Kau tidak tuli, bukan? Betul namamu Rasina?" Tuan Staalhart menatap si perempuan. "Kau mendengar dan mengerti perkataanku?"

Manusia malang itu mengangguk. Tubuhnya menggigil, kedua kakinya limbung, seolah tak sanggup menahan berat tubuhnya sendiri. Betis kiri tampak memar, sementara yang sebelah kanan sobek tepat di lekuk yang berbatasan dengan paha belakang. Tetapi mungkin juga ia limbung lantaran belum makan sejak pagi.

"Apa *kowe* mencuri perhiasan di rumah Tuan Jacob?" tanyaku.

Rasina menggeleng.

"Apa kerja *kowe* di sana?"

Rasina mengayunkan tangannya ke sana ke mari, disertai beberapa lenguhan.

"Mengurus bayi? Anak majikan?" aku menebak-nebak.

Rasina mengangguk.

"Mengapa anak buah Tuan Jacob mengejarmu? Apa *kowe* bikin salah sama Sinyo? Bikin celaka Sinyo?"

Rasina menggeleng. Bibirnya gemetar. Pipinya basah air mata.

"Tampaknya ia langganan menerima sabetan cambuk," kataku kepada Tuan Staalhart. "Budak yang tidak begitu patuh."

"Sudahlah. Ini hari yang berat untuknya, juga untuk kita," sahut Tuan Staalhart. Matanya yang berada jauh di belakang batas dahi itu seolah membara dalam keremangan cahaya lampu.

"Sinah! Di mana Sinah?" Tuan Staalhart berteriak

"Sinah di sini, Tuan," seorang wanita tua, babu kantor kami, yang sejak tadi bersila di ambang pintu, beringsut mendekat.

"*Kowe* kasi pakaianmu buat perempuan ini. Besok kuganti," kata Tuan Staalhart. "Dan bilang Kromo, kasi perempuan ini makan, lalu biarkan ia tidur bersamamu," sambungnya.

"Sinah takut tidur sama perempuan ini, Tuan. Bagaimana kalau ia mati di atas *amben* Sinah?" tanya Sinah

"Ia tidak akan mati, Sinah. Jangan keterlaluan!" Tuan Staalhart menggeleng kesal. "Lukanya sudah kuobati. Dia bisa tidur di lantai dengan tikar."

Aku mengawasi Sinah yang berjalan terbungkuk-bungkuk membimbing tubuh telanjang Rasina ke dapur, setelah itu, aku mulai mengemasi barang-barangku.

"Mau ke mana? Bukankah sudah terlalu larut untuk pulang, Joost? Masih gerimis. Jalan ke Gunungsari pasti sudah berubah menjadi kolam lumpur. Tidur saja di kamar samping. Tapi aku ingin bertanya sebentar saja," ujar Tuan Staalhart sembari membuka botol jenever, lalu menuang isinya ke dalam dua buah gelas kecil. Diberikannya segelas kepadaku, lalu ia menjatuhkan tubuh di kursi rotan. Kedua kakinya diluruskan ke depan, naik ke meja kayu kecil berbentuk bundar.

Aku menurunkan kembali tasku dari pundak.

"Tentang Jacob de Vries?" tanyaku. Kutarik sebuah kursi, lalu duduk di depan Tuan Staalhart.

"Ya. Ceritakan sedikit lagi," sahut Tuan Staalhart sambil mengangguk.

"Apa lagi? Tadi sudah kuceritakan bahwa ia saudagar yang makmur. Berdagang aneka kebutuhan pokok bagi penghuni benteng. Belakangan, ia memonopoli pasokan gula. Sebagian orang Cina dan petani tebu tidak suka kepadanya. Ia dan kelompoknya punya jalur khusus ke pejabat sampai ke tingkat gubernur jenderal. Sudah dua kali ia menjadi rekanan utama tanpa proses lelang. Tetapi sesungguhnya yang punya banyak uang adalah istrinya. Dua tahun lalu Jacob menikahi Sarah de Veelgeld, janda kaya dengan dua orang anak. Tuan De Veelgeld, suami pertama Sarah, adalah asisten direktur jenderal yang dulu lama tinggal di Ceylon sebelum pindah ke Batavia. De Veelgeld meninggal terjangkit *Roode Loop*."

"Bagaimana Sarah bisa menikah dengan si Jacob itu?"

"Nada suara Tuan seolah mengatakan bahwa Jacob tidak pantas mempersunting Sarah," kataku tertawa. "Tetapi jangan khawatir. Tuan tidak sendirian. Ketika *Domine* meresmikan pernikahan mereka, sebagian besar hadirin di gereja menggunjingkan hal serupa."

"Kau tahu, Joost, beberapa orang ditakdirkan memiliki kemujuran berlebih. Dan dunia yang fana ini telah mengajarkan kepada kita bahwa kemujuran seringkali justru berpihak kepada para durjana," Tuan Staalhart menghabiskan jenever di gelasnya sekali teguk. "Itulah

yang sering mengganggu pikiranku. Apa arti budak malang seperti ini bagi orang berduit macam De Vries?" lanjut Tuan Staalhart. "Ia bisa membeli lima atau sepuluh budak lain. Mengapa ia tidak memerdekakan anak ini? Ia toh sudah dikristenkan, dan kata Sinah ia pernah menjadi orang merdeka."

"Mungkin Rasina terlibat utang, sehingga terpaksa menggadaikan surat kebebasannya. Kembali menjadi budak," sahutku.

"Sangat mungkin," kata Tuan Staalhart. "Tinggal kita lihat, mengapa ia harus menanggung siksa sekeras itu. Aku tahu, wajah bisa menipu. Ada budak buruk rupa, kasar, menjengkelkan, tetapi setia dan baik hati. Ada pula yang selembut Rasina tetapi suka mencuri."

"Apakah Tuan akan terus menahannya di sini? Sampai kapan?" tanyaku perlahan.

"Kau sudah lihat luka di sekujur tubuhnya," jawab Tuan Staalhart. "Kau ingin ia mati? Ia akan tetap di sini sampai penyelidikan selesai."

"Aku hanya ingin mengingatkanmu, Tuan Staalhart." Aku menghela napas. "Jacob de Vries bukan orang yang mudah digertak. Apalagi bila menyangkut hartanya. Ia bisa balik mengadukan kita dengan dalih perampasan hak milik."

"Joost…" Tuan Staalhart memperbaiki letak duduknya. "Kita adalah jaksa penuntut. Pekerjaan kita adalah mencari bukti, berdebat di pengadilan, serta menggiring orang ke penjara atau ke tiang gantungan bila perlu. Ingat? Dan soal gertakan itu," Tuan Staalhart menghentikan kalimatnya sejenak. "Aku siap menghadapinya. Bagaimana denganmu?"

Aku terdiam lama sebelum menjawab, "Aku asistenmu, Tuan. Semoga itu menjelaskan sikapku. Kita bisa minta Dewan Hindia agar dipinjami empat atau lima orang *schuterij* sebagai bala bantuan bersenjata di sini secepatnya."

"Aku gembira mendengar jawabanmu," kata Tuan Staalhart. "Engkau lebih mengenal orang-orang itu. Aku membutuhkanmu. Banyak yang ingin kuketahui. Tetapi tidurlah dahulu. Besok kita mulai bekerja. Selamat malam!" Tuan Staalhart bangkit dari kursi, menyalakan sebatang lilin, lalu membawanya menuju kamar tidur.

Aku masih terdiam di kursi. Suara guruh sesekali masih terdengar di kejauhan. Kugoyang-goyang sisa jenever di gelas.

Budak wanita itu.

Rasina. Rasina van Banda. Entah siapa nama aslinya sebelum ia dibaptis menjadi Kristen. Tampaknya belum terlalu lama ia meninggalkan masa remaja. Mungkin usianya baru lima atau enam belas tahun? Aku selalu kesulitan menebak usia penduduk asli. Wajah mereka hampir sama, pria maupun wanita. Kelihatannya mereka juga lebih lambat menua dibandingkan kami, orang Eropa. Kulit mereka tak gampang kisut. Dan bicara soal wajah, kalau tidak berlumur darah dan debu, aku yakin wajah Rasina cukup rupawan untuk ukuran bumiputra. Ditambah potongan tubuhnya yang padat kukuh. Memang sangat cocok dijadikan babu atau pengasuh anak. Mungkin dulu sekitar seratus dua puluh *rijksdaler* harus dikeluarkan untuk membelinya dari pasar lelang. Sebuah investasi yang tidak sedikit. Masuk akal bila para begundal De Vries siang tadi seperti kebakaran jenggot. Tetapi mengapa mereka merusak hartanya sendiri dengan cambuk? Itulah pangkal persoalan kami hari ini.

Semua bermula ketika aku dan Tuan Staalhart sedang duduk di sebuah kedai Cina untuk makan siang setelah letih mengambil barang dan sisa dokumen dari kantor lama jaksa di Noordwijk dengan tiga gerobak terbuka. Sudah sepekan kami pergi-pulang memindahkan perabot serta barang bukti pengadilan. Hari ini, semua harus selesai. Aku mengusulkan memperpanjang sewa ketiga gerobak berikut kuli-

kulinya, tetapi Tuan Staalhart berkeras hanya akan mengambil satu gerobak.

"Hari ini kita hanya akan memilah berkas perkara kedaluwarsa yang menumpuk di ruang tengah itu. Kita bungkus, lalu kita kirimkan ke Stadhuis. Setelah itu kita mampir ke rumah kontrakanku. Aku harus memindahkan buku perpustakaanku ke kantor baru," katanya.

Aku menurut. Sungguh sial, ternyata buku-buku Tuan Staalhart luar biasa banyaknya. Terdiri dari satu peti besar dan empat peti berukuran sedang. Melihat koleksi bukunya yang jauh melebihi simpanan bajunya, kelihatannya atasanku ini tidak memerlukan pakaian, bahkan makanan untuk hidup. Cukup membaca buku.

Dengan bantuan Kromo, bujang kantor kami, akhirnya selesai juga semua tugas pemindahan itu. Tentu masih butuh waktu lagi untuk menata semuanya di kantor baru. Tetapi itu bisa dilakukan lusa setelah kerani kami, yang saat ini sedang mengambil cuti, kembali masuk kerja. Yang lebih mendesak, paling tidak buatku, adalah rasa lapar.

Aku tahu kedai Cina di dekat Nieuwehollandsche kerk. Mereka menjual nasi kecap yang diberi udang, ayam, dan irisan daging babi goreng kering. Ditambah semangkuk sup hisit. Terenak di seantero *ommelanden*. Jadi, kuajak Tuan Staalhart ke tempat itu. Ketika kuberi tahu harga seporsinya sekitar 300 picis, ia hampir tidak jadi berangkat.

"Kita boleh memesan lauknya terpisah, Tuan. Harganya sesuai jumlah lauknya, " buru-buru kujelaskan kepada si kikir ini. Syukurlah akhirnya ia setuju. Maka kami segera memacu kuda ke tempat itu.

Kami duduk di meja depan dekat jendela, tempat orang kulit putih biasa dilayani, dan pesanan makan belum lagi tiba ketika seorang perempuan pribumi mendadak masuk kedai, menubruk meja kami, lalu bersembunyi di bawah, di antara kaki kami, merangkul kaki kami kuat-kuat. Belum pernah kulihat wajah itu sebelumnya, tetapi dari potongan bajunya, pastilah ia seorang budak.

Sebentar kemudian terdengar derap kaki kuda. Tiga orang kulit putih menghambur masuk kedai. Aku tahu ketiganya. Mereka tukang pukul Jacob de Vries. Salah seorang di antara mereka bertubuh tinggi besar, setara dengan tubuhku, dan mengenakan penutup mata sebelah kiri. Tangannya menggenggam setangkai cambuk bermata tiga. Guus de Schriel, nama orang itu. Aku pernah berjumpa dengannya sekali dalam persidangan penganiayaan seorang kelasi Inggris. Seharusnya ia dipenjara enam bulan, tetapi uang jaminan dari Jacob de Vries menyelamatkannya. Tampaknya ia juga masih mengenaliku. Sambil menghampiri meja kami, ia mengangkat topinya sedikit

"Selamat siang, Tuan Asisten Jaksa," gumamnya. Lalu menoleh kepada dua rekannya. "Jan, Dirk, bawa perempuan itu!"

Yang dipanggil dengan nama Jan merogoh ke bawah meja, menarik tangan kiri si budak. Dirk menunggu di depannya.

Perempuan itu memekik-mekik, berusaha bertahan memegang kaki meja dengan tangan kanannya. Tentu saja sia-sia. Meja kami berputar, lalu jatuh terguling. Buru-buru kami melompat berdiri. Beberapa pengunjung segera menyingkir dari tempat itu. Sebagian lagi berusaha tetap duduk tenang sambil sesekali mengamati.

Si perempuan diseret ke luar. Ia terus meronta, dan akhirnya berhasil mengangkat tubuh. Kini ia berada dalam posisi duduk, dengan kedua kaki menghadap depan. Bertahan agar tidak terseret.

"Jangan membuatku marah!" bentak Dirk sambil membungkuk, menarik tangan perempuan itu lebih keras. Tiba-tiba kedua kaki si budak menjejak keras, tepat mengenai selangkangan Dirk. Pria tambun itu meraung. Pegangannya terlepas. Si budak berusaha berlari ke depan kedai, tetapi persis di pintu masuk lengannya berhasil ditangkap oleh Guus.

"Kena kau!" ujar Jan sambil berlari menyusul ke arah pintu. "Dirk, ayo cepat. Kita tak punya banyak waktu!" teriaknya.

"Tahan dulu!" bentak Dirk sambil berjalan terhuyung. Tangannya terkempit di antara paha. "Aku ingin memastikan setan betina ini mengingat pelajaran kepatuhan yang pernah kuberikan kepadanya!" sambung Dirk.

Kedua temannya tertawa melihat cara Dirk berjalan.

"Kau yakin benda di balik tanganmu itu masih utuh, Dirk?" tanya Jan.

"Tutup mulutmu!" Dirk menyepak kaki Jan, lalu menghampiri perempuan yang terus berontak dalam cengkraman Guus.

"Berikan cambuk itu, Guus!" teriak Dirk.

"Sudahlah, jangan terlalu lama!" Guus melemparkan cambuknya kepada Dirk.

Dengan penuh amarah Dirk menyobek baju si perempuan lalu diayunkannya cambuk ke punggung si wanita yang terbuka. Sekali, dua kali, tiga kali. Perempuan itu melolong-lolong.

Aku mencoba memandang berkeliling sekali lagi. Siang itu, seluruh tamu kedai adalah warga kulit putih. Aku yakin semua melihat kejadian ini, tetapi tak ada yang peduli. Mereka meneruskan makan siang dalam kebisuan. Bahkan kini tak ada lagi yang mencoba menengok ke arah kami.

Akan halnya si budak, tampaknya kini tak lagi mampu berdiri. Ia melorot, menggeloso, bertumpu pada kedua lutut, dan terus menggeliat mengikuti jatuhnya cambuk ke atas tubuhnya. Pada sabetan berikutnya, Tuan Staalhart maju ke depan.

"Cukup, Tuan!" teriak Tuan Staalhart kepada Dirk. Tetapi pria itu seperti kerasukan setan, tak kunjung berhenti mengayunkan cambuk ke kiri dan kanan. Pada detik itulah, di luar dugaanku, Tuan Staalhart meraih botol arak kosong dari meja terdekat, lalu memukulkannya ke arah kepala Dirk sambil mendorong pria itu hingga terjatuh.

"Cukup, kataku!" seru Tuan Staalhaart, membuat semua yang berada di dalam ruangan itu menoleh ke arah kami.

Dirk bangkit perlahan, memungut wig putihnya yang terlempar akibat pukulan botol. Sebetulnya pukulan itu meleset. Botol tergelincir ke samping mengenai pundak. Dan tubuh Dirk cukup tebal untuk menahan hantaman yang diayunkan oleh lengan orang setua Tuan Staalhart. Samasekali tidak berarti. Dorongan keras dari Tuan Staalhart lah yang membuatnya rubuh. Tetapi itupun sudah cukup membuat kedua bola mata Dirk nyaris menyembul keluar karena murka.

"Sudah gilakah engkau, Tuan, memukulku di depan orang banyak? Di depan budak ini?" bentak Dirk sambil melangkah mendekati Tuan Staalhart. "Siapa temanmu ini, Tuan Asisten? Ingin sekali kubuka kepalanya untuk melihat apakah ada isinya atau tidak!"

"Berhenti di situ!" kucabut pistol dari pinggang, lalu kuarahkan kepada Dirk. "Lepaskan budak itu!" seruku kepada Jan.

"Tuan Asisten," Guus menatapku dalam-dalam. "Itu budak Tuan De Vries," katanya.

"Aku tahu," jawabku. Barangkali mereka mendengar nada ragu di dalam suaraku. Ini memang situasi yang cukup membingungkan. Aku yakin ketiga tukang pukul de Vries itu pasti membawa pistol juga di balik jas panjang mereka. Tetapi untuk saat ini, akulah manusia yang terlihat paling berbahaya di dalam ruangan ini.

"Bagus engkau mengetahuinya, Tuan Asisten. Kalau begitu, tidakkah sebaiknya Tuan membiarkan teman-temanku membawanya pulang?" kata Wim.

Kulirik Tuan Staalhart. Ia berdiri tak bergerak. Kedua tangannya tergantung di ke dua sisi paha. Tidak bicara. Tapi aku tahu pesan yang terkandung di kedua matanya.

"Tuan Asisten?" Guus bertanya sekali lagi.

"Lepaskan budak itu, Tuan," kataku sambil menggeser laras pistol dari Dirk kepada Jan, yang masih terlihat mencengkeram tangan si budak. "Tuan mau melawan hukum?"

Jan tampak ragu, tetapi segera mendorong budak itu ke samping saat melihat isyarat persetujuan dari Guus. Seperti seonggok karung basah, budak itu jatuh tertelungkup. Tuan Staalhart menariknya ke tepi ruangan, lalu menyandarkan tubuh perempuan itu ke tembok, diikuti belasan pasang mata. Termasuk mataku.

"Bila Tuan bertiga berkunjung ke gereja pekan lalu, tentu tahu siapa yang berdiri di sebelahku ini. Kami sudah mengumumkannya kepada warga," kataku. "Ini Tuan Jan Aldemar Staalhart. Jaksa Wilayah baru yang menggantikan Tuan Hendriek Pieter Lusteloos."

"Oh, Tuan Jaksa sendiri rupanya," Guus mengangkat tangan kanannya ke dada, menyusun sikap memberi hormat. Tetapi nada suaranya jauh dari kesan hormat.

"Betul, dan maaf, engkau tidak kami perkenankan membawa budak ini untuk sementara, Tuan," kata Tuan Staalhart. "Nanti kami beri tahu, kapan bisa menjemputnya kembali."

"Kata siapa kami tidak bisa membawanya?" Guus membuka sarung tangan kulitnya, dan menyelipkannya di saku jas. Sepasang sepatu larsnya beradu dengan lantai kayu, dan kelihatannya bagian tumitnya sengaja ditekan, sehingga menimbulkan derit mengerikan saat ia melangkah mendekati kami. Begitu dekat, sehingga tubuhnya yang tinggi besar seolah akan menggilas tubuh mungil Tuan Staalhart.

****

• *Schutterij*: Milisi, penjaga keamanan.
• *Roode Loop*: Kolera
• *Domine*: Pendeta (Kristen)
• *Amben*: Tempat tidur bambu
• *Cravat*: hiasan leher berwiru, diikat seperti dasi

Penggalan dari sebuah novel yang sedang digarap

Merdeka Belajar dan Belenggu Korporasi ala Nadiem Makarim
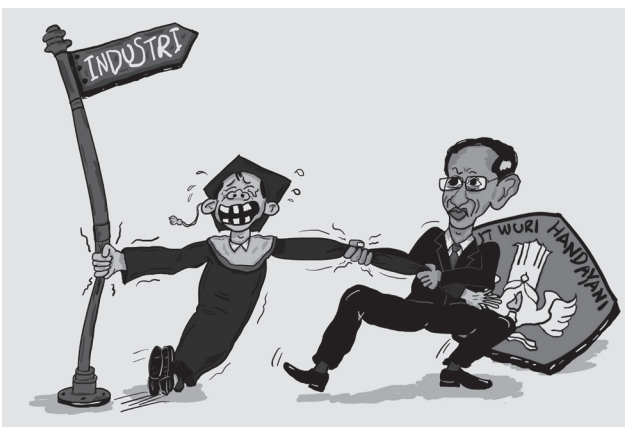
© Sammy/BAL

Bulan September hingga Oktober boleh jadi merupakan waktu mendebarkan bagi pelajar yang baru lulus sekolah menengah atas (SMA) untuk mempersiapkan diri menjadi seorang mahasiswa. Masa transisi dari siswa SMA menjadi seorang mahasiswa bukanlah perihal sepele. Lingkungan belajar, sistem belajar, hingga pergaulan yang dilalui di perguruan tinggi akan sangat berbeda dibanding pengalaman di sekolah menengah. Sebagai mahasiswa, seseorang dituntut untuk menjadi lebih mandiri, membuka wawasan baru dengan memperbanyak diskusi dari berbagai organisasi, serta menjalin relasi seluas-luasnya. Mahasiswa juga berperan sebagai salah satu *agent of change*. Oleh karena itu, mahasiswa sepatutnya menjadi kader dalam perubahan dan pemberdayaan sebuah bangsa, baik secara fisik maupun nonfisik, yang kemudian ditunjang oleh fungsi mahasiswa lainnya yaitu kontrol sosial yang meliputi kontrol budaya, kontrol masyarakat, dan kontrol individu.[1]

Kemampuan berpikir kritis atas lingkungan sekitar menjadi hal terpenting bagi mahasiswa. Dengan berpikir kritis, mahasiswa dapat menelaah masalah dalam berbagai sudut pandang dan menuntut keadilan bagi kaum yang tertindas. Salah satu peran mahasiswa sebagai *agent of change* adalah melakukan unjuk rasa. Sebagaimana Soe Hok Gie juga pernah berkata bahwa perjuangan harus tetap ada sebagai usaha penghapusan terhadap kedegilan, pengkhianatan, dan segala bentuk tindakan non humanis.[2]

Sejak pertengahan Maret 2020, seluruh aktivitas sehari-hari termasuk perkuliahan, kegiatan di luar perguruan tinggi, dan bahkan aksi unjuk rasa terpaksa dibatasi bahkan ditunda pelaksanaannya akibat pandemi COVID-19.

Selama masa pandemi COVID-19, banyak mahasiswa di seluruh Indonesia melakukan unjuk rasa secara daring. Mereka menyuarakan protes melalui forum diskusi daring, penyebaran poster berisi tuntutan-tuntutan, hingga meluapkan kritik berupa cuitan di akun Twitter masing-masing. Beberapa aksi yang sempat digelar pada masa pandemi ini antara lain aksi menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja #GejayanMemanggil pada 16 Juli 2020 yang dipelopori oleh Aliansi Rakyat Bergerak dan aksi menuntut transparansi mengenai penggunaan uang kuliah tunggal (UKT) pada 15 Juli 2020 yang dipelopori oleh Aliansi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Aliansi Mahasiswa Pascasarjana UGM.

Salah satu tuntutan mahasiswa adalah meminta kejelasan mengenai rancangan kebijakan Kampus Merdeka yang akhir-akhir ini dibangga-banggakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Republik Indonesia, Nadiem Makarim. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) UGM berkolaborasi dengan Majelis Wali Amanat UGM memanfaatkan momentum hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei 2020 untuk menyelenggarakan "hearing rektorat" secara daring melalui aplikasi panggilan video membahas kebijakan Kampus Merdeka.[3] Kebijakan ini akan sangat berdampak pada keberlanjutan proses pendidikan mahasiswa di seluruh Indonesia. Di dalam kajian mengenai kebijakan Kampus Merdeka, Forum Advokasi UGM dan BEM KM UGM menyatakan bahwa kesiapan perguruan tinggi dalam mengimplementasikan kebijakan ini harus dikawal, karena akan berdampak ke berbagai pihak, terutama mahasiswa.[4]

Pada 24 Januari 2020 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengadakan rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi di Jakarta yang dihadiri oleh perwakilan rektor, dekan, dosen, serta mahasiswa seluruh Indonesia. Nadiem menyosialisasikan tentang kebijakan Kampus Merdeka dengan menjelaskan poin demi poin yang terkandung dalam kebijakan rancangan Kemendikbud tersebut. Secara keseluruhan terdapat empat poin kebijakan yang terkandung dalam Kampus Merdeka. *Pertama*, keleluasaan bagi perguruan tinggi negeri maupun swasta untuk membuka program studi baru, dengan sejumlah syarat. Perguruan tinggi mesti terakreditasi A atau B dan bekerja sama dengan organisasi atau perguruan tinggi lain yang termasuk dalam Quacquarelli Symonds (QS) World University Rankings. QS menilai dan memberi peringkat tiap tahunnya kepada perguruan tinggi dari berbagai negara sesuai rumpun atau bidang ilmu tertentu. Mereka menilai berdasarkan situasi, produktivitas, dampak penelitian, serta hasil survei global yang dilakukan kepada perusahaan dan kalangan akademisi.[5]

Kedua, perombakan terhadap mekanisme akreditasi dan re-akreditasi perguruan tinggi. Kemendikbud bermaksud untuk menyederhanakan alur birokrasi penetapan akreditasi dan re-akreditasi perguruan tinggi. *Ketiga*, upaya memudahkan PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk bertransformasi menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH), tanpa menjadikan akreditasi sebagai prasyarat. Keempat, hak bagi mahasiswa untuk menempuh studi diluar program studi (prodi) pilihan mereka. Sehingga setiap mahasiswa hanya wajib menjalani studi selama lima semester di prodi pilihan mereka. Sedangkan, dua semester sisanya digunakan untuk mempelajari prodi lain atau menambah keterampilan melalui praktik magang di perusahaan-perusahaan yang telah menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi.

Agenda koordinasi Mendikbud tersebut juga membuka sesi diskusi langsung. Mahasiswa, dosen, dan rektor berkesempatan untuk memberi masukan atau dukungan langsung terhadap kebijakan Kampus Merdeka. Tentu, apa yang disampaikan oleh perwakilan mahasiswa pada sesi diskusi tersebut tidak menampung secara utuh pendapat seluruh mahasiswa Indonesia mengenai kebijakan Kampus Merdeka. Terutama mengenai poin keempat kebijakan yang memberi dampak langsung terhadap proses belajar mahasiswa selama masa kuliah.

Sebelum masuk lebih dalam pada poin keempat, coba kita ingat kembali tujuan didirikannya perguruan tinggi. Mengutip dari Mohammad Hatta, tujuan perguruan tinggi ialah menciptakan mahasiswa-mahasiswa yang cakap dalam keilmuan, sadar akan kondisi masyarakat, dan mampu mengaplikasikan ilmu yang dimilikinya.[6] Cakap dalam keilmuan sudah diupayakan oleh Nadiem melalui poin *keempat* dengan sedikit modifikasi. Mahasiswa tidak hanya cakap dalam bidang ilmu yang dipilih pada jurusannya saja, tetapi juga mengembangkan kecakapan pada bidang ilmu lain dengan menempuh dua semester di program studi yang berbeda. Tetapi sayangnya, alih-alih memicu mahasiswa untuk meningkatkan kesadaran akan kondisi masyarakat, kebijakan Kampus Merdeka justru berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar dengan menciptakan tenaga kerja yang terkualifikasi secara global. Sedangkan realitanya, masalah kurangnya tenaga kerja yang berkualitas hanyalah satu dari sekian parasit yang menggerogoti kesejahteraan masyarakat Indonesia. Lantas siapa yang akan memperjuangkan HAM jika mahasiswa disibukkan oleh praktik-praktik di perusahaan?

Eko Prasetyo, penulis buku berjudul *Minggir! Waktunya Gerakan Muda Memimpin! Soekarno, Semaoen, & Moh. Natsir*, menganalisis lebih dalam mengenai implementasi poin keempat kebijakan Kampus Merdeka bagi keberlanjutan proses belajar dan orientasi mahasiswa. Eko melihat kondisi perguruan tinggi yang seharusnya berpihak pada rakyat justru menunjukkan orientasi pada pasar melebihi segalanya. Kampus dengan orientasi yang sama dengan institusi-institusi ekonomi lain akan menempatkan mahasiswa sebagai komoditas. Mahasiswa dengan potensi pasar tinggi nantinya akan diolah sedemikian rupa agar menjadi produk akhir berupa sarjana. Produk akhir inilah yang kelak akan ditempatkan di bawah tali kekang perusahaan. Eko juga menuturkan bahwa dampak lain dari orientasi perguruan tinggi yang lebih berfokus pada dunia kerja dan pasar adalah terciptanya kerenggangan relasi dengan masyarakat yang berdampak negatif pada gerakan mahasiswa di Indonesia.

Mahasiswa yang terlena dalam dekapan kapitalisme semakin menunjukkan sikap apatis terhadap pergerakan. Apalagi fakta bahwa BUMN dan perusahaan yang terlibat dalam kemitraan Kampus Merdeka dapat berpartisipasi dalam penyusunan kurikulum, praktik kerja, dan penyerapan lapangan kerja.[7] Merespon hal tersebut, Eko menjelaskan bahwa perguruan tinggi yang mendidik mahasiswanya sebagai pekerja hanya akan menjadi institusi yang mempertahankan status quo. Artinya, perguruan tinggi tidak melakukan perubahan sama sekali karena berupaya untuk meneguhkan status kelas. Alhasil, perguruan tinggi bukannya menentang dan mengkritik status sosial, melainkan meletakkan status sosial sebagai kebenaran yang absolut.

Robertus Robet, dosen Sosiologi Universitas Negeri Jakarta, pernah menulis opininya di majalah *Tempo* bahwa sejak era Orde Baru, dunia pendidikan kita telah direndahkan dengan pandangan yang keliru bahwa perguruan tinggi mesti menghasilkan orang-orang yang berguna secara instrumental di bawah pembangunan dan kepentingan dunia usaha.[8] Lantas apakah kita ingin semakin meneguhkan pandangan ini dengan menerapkan kebijakan Kampus Merdeka dan meletakkan perguruan tinggi sebagai sapi perah untuk memuaskan dahaga pasar? Sepakat dengan ucapan Robertus, perguruan tinggi semestinya berfungsi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan hanya semata-mata mengasah kemampuan bekerja, tapi juga memperjuangkan gerakan mahasiswa serta daya pikir kritis dan kesadaran akan masalah sosial di sekitar kita. **[Penginterupsi]**

Catatan Akhir

[1] Dimas Nur Imam Firdaus. *Pengaruh Aktif Berorganisasi Kampus dan Kehidupan Sosial terhadap Prestasi Belajar pada Mahasiswa FIAI UII*. Skripsi. (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018): 6
[2] Soe Hok Gie, *Catatan Seorang Demonstran*, (Jakarta: Penerbit LP3ES, 1989), 119.
[3] May Darling, "UGM Peringati Hardiknas 2020 di Tengah Covid-19", Citraindonesia.com, Mei 2, 2020, https://citraindonesia.com/ugm-peringati-hardiknas-2020-ditengah-covid-19/, diakses pada 15 Juni 2020.
[4] BEM KM UGM dan Forum Advokasi UGM, "Policy Brief Kebijakan Kampus Merdeka UGM," (2020): 2.
[5] Ayunda Pininta Kasih, "Universitas Terbaik Indonesia Versi QS World University Rankings 2020", Kompas.com, Maret 10, 2020, https://edukasi.kompas.com/read/2020/03/10/11225651/universitas-terbaik-indonesia-versi-qs-world-university-rankings-2020?page=all, diakses pada 17 Juni 2020.
[6] Faiz Ridha Syahputra, "ITB Sebagai Sarana Pergerakan Mahasiswa", *Essai Singkat Pergerakan dan KM-ITB*, (2014): 1
[7] Wahyu Adityo Prodjo, "Nadiem Imbau Dirut BUMN Lihat Kampus Merdeka sebagai Investasi Utama Bisnis", Kompas.com, Februari 13, 2020, https://edukasi.kompas.com/read/2020/02/13/21403401/nadiem-imbau-dirut-bumn-lihat-kampus-merdeka-sebagai-investasi-utama-bisnis?page=all, diakses pada 28 Juni 2020.
[8] Robertus Robet, "Majalah Tempo: Belenggu Kampus Merdeka", *Tempo.co*, Maret 7, 2020, https://majalah.tempo.co/read/kolom/159862/salah-kaprah-kampus-merdeka-nadiem, diakses pada 2 Juli 2020.

Berlayar bersama Ombak, dari Orba sampai Wabah
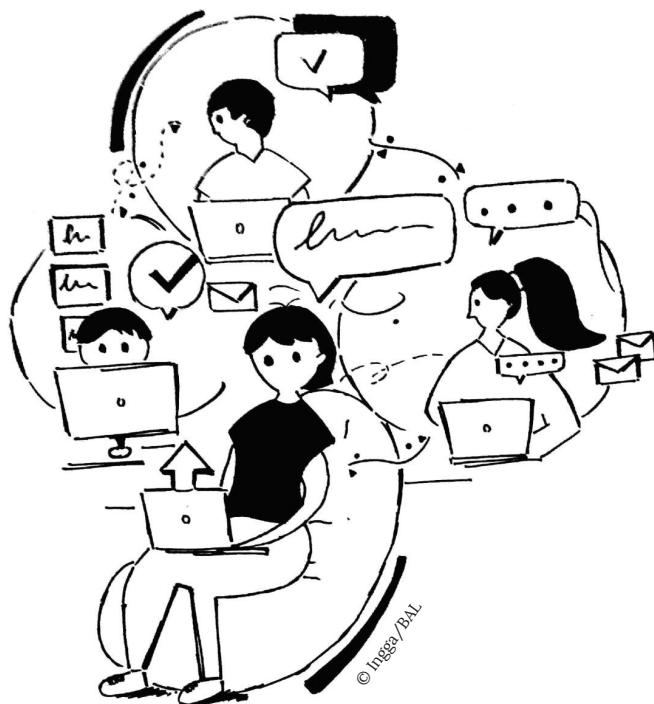
Menilik kembali sejarahnya, Balairung, seperti yang dicatat oleh para awak terdahulu, telah menemui banyak peristiwa penting yang memengaruhi arah geraknya. Seperti catatan Ni'am dan Choirudin mengenai 'angkatan' dalam Balairung yang dibagi ke dalam dua angkatan, angkatan 1985 dan angkatan pasca-1998. Keduanya merepresentasikan orientasi, karakter, dan 'ideologi' Balairung yang banyak dipengaruhi oleh pembacaan atas dinamika mahasiswa dan gerakan politiknya.[1]

Hasan Bachtiar melihat Balairung, pada era Orde Baru, menjadi salah satu bagian dari tonggak konfrontasi mahasiswa terhadap rezim.[2] Balairung yang pertama kali menerbitkan produknya pada 1985, baru mulai menghadirkan rubrik laporan jurnalistik bernama 'Berita Tema' pada 1989. Sejak saat itu, Balairung banyak menerbitkan laporan jurnalistik dengan tema-tema yang berhubungan dengan rezim, situasi politik nasional, dan gerakan mahasiswa. Beberapa di antaranya seperti, "Menggugat Peran (Politik) Mahasiswa" terbit pada 1990 "Kalau Serdadu Rindu Tiga Roda" pada 1994, "Pemilu 97 Merayakan Pesta Untuk Status Quo" pada 1995, dan "Gerakan Mahasiswa Era 90-an Diaspora Kekuatan yang Siap Meledak" pada 1997.

Setelah rezim Orde Baru tumbang pada 1998, dinamika gerakan mahasiswa ikut mengalami perubahan. Hal ini juga memengaruhi orientasi pers mahasiswa yang pada awalnya menjadi bagian dari 'tonggak konfrontasi melawan rezim'. Pada tahun 2000, diselenggarakan sarasehan pers mahasiswa se-Jawa dan Bali.[3] Pertemuan tersebut menghasilkan dua gagasan sebagai bentuk reorientasi pers mahasiswa pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Kedua gagasan tersebut adalah *community press* (pers komunitas) dan *press of discourse* (pers wacana). Balairung kemudian mengejawantahkan kedua gagasan ini lewat produk Majalah Balairung, dan Jurnal Balairung yang terbit pertama kali pada 2001.

Namun, perubahan-perubahan yang terjadi di seputar lembaga, dan lingkungan kerja yang menopangnya, tidak melulu didasari pada pergulatan politik nasional–satu hal yang ikut menentukan 'jati diri' pers mahasiswa dewasa ini. Kita menghadapi sesuatu yang baru, pandemi, wabah mematikan, yang juga berarti masalah baru.

Sebagian dari kita mungkin akan menganggap bahwa fenomena ini akan segera berakhir, dan kehidupan akan kembali normal. Akan tetapi, jikalau wabah mereda, catatan seperti apa yang dapat kita tuliskan—sesuatu yang dapat dipelajari di kemudian hari ketika virus mematikan kembali menyebar ke berbagai penjuru dunia.

Pembacaan atas situasi yang sedang berlaku menjadi begitu penting untuk menentukan orientasi, sikap, dan posisi Balairung. Ini berhubungan langsung dengan kebermanfaatan Balairung terhadap publik. Hal ini dikarenakan Balairung tidak menciptakan lingkungan kerjanya sendiri. Ia senantiasa beririsan dengan masyarakat, kebijakan pemerintah, otoritas kampus, dinamika mahasiswa dan gerakannya, dan lain-lain.

Jika tolok ukurnya adalah lingkungan kerja, maka saya meyakini belum ada pengaruh fundamental—pemerintah terhadap kampus, pemerintah terhadap gerakan mahasiswa, dan lainnya—yang mengubah wajah dan karakternya secara signifikan. Dengan demikian, perubahan di tubuh Balairung belum secara mendasar menyentuh gagasan mengenai pers mahasiswa yang muncul dua puluh tahun silam itu.

Situasi yang berlaku saat ini mendorong kami untuk melakukan penyesuaian produk. Bunga Rampai yang ada di tangan pembaca kali ini merupakan produk pengganti Majalah Balairung yang terbit setahun sekali. Ia sebetulnya bukanlah produk yang benar-benar baru sebab ia tidak dibentuk dengan menerapkan paradigma baru. Jika dilihat dari rubrikasinya, ia dapat disebut sebagai Majalah Balairung. Kalaupun hendak disebut lebih mirip Jurnal—utamanya Jurnal Balairung yang terbit sebelum 2018—ia memang memuat banyak artikel ilmiah dengan berbagai pendekatan, termasuk pendekatan jurnalistik dan pendekatan ilmiah. Namun, sebutlah saja ia "Bunga Rampai" sebagai sebuah catatan baru, sebuah catatan penyesuaian terhadap situasi yang memaksa kami tidak dapat melakukan metode-metode jurnalistik yang ketat untuk menyebutnya sebagai Majalah Balairung.

Alexandria Neason dalam tulisannya "In a pandemic, what is essential journalism?" berpendapat, di tengah pandemi, peran pers menjadi sangat diperlukan untuk memberikan 'instruksi-instruksi' atas apa yang perlu dan tidak perlu dilakukan, ke mana harus pergi, apa yang perlu dihindari, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan upaya-upaya menghindari penyebaran virus. Namun, Neason juga melihat bahwa setiap harinya jurnalis turun ke lapangan dan melaporkan perkembangan situasi pandemi terkini, justru memperbesar risiko penularan yang bertentangan dengan kebutuhan publik.

Dia menambahkan bahwa situasi ini mendorong jurnalis untuk mempertanyakan kembali "apa yang esensial dari berita-berita yang dirilis? "Lebih banyak informasi" seperti halnya prinsip dasar pada situasi normal tidak dapat lagi bekerja. Ini saatnya, jurnalisme sebagai sebuah industri untuk melihat dirinya bukan sebagai kelompok luar untuk melayani masyarakat melainkan melihat dirinya sebagai bagian dari masyarakat. Dengan demikian, pada situasi sulit seperti ini, jurnalis dapat menanamkan secara tegas kebermanfaatannya pada kesehatan publik, bukan pada profit dari iklan yang terpampang dua puluh empat jam. [4]

Di tengah pandemi ini, banyak hal masih dapat dilakukan secara jarak jauh, namun itu tidak lantas membuat kerja-kerja jurnalistik berjalan maksimal. Apa yang ditulis oleh Neason menjadi semacam wanti-wanti juga kepada jurnalis mahasiswa dalam menentukan arah geraknya di situasi seperti ini. Terlebih lagi, dengan prinsipnya sebagai media alternatif yang hadir untuk mengimbangi arus informasi dari media-media arus utama, maka apa yang luput dari pemberitaan umum, perlu dihadirkan oleh pers mahasiswa.

Kita mungkin masih percaya bahwa situasi pandemi ini belum dapat mengubah secara mendasar orientasi Balairung, dan pers mahasiswa secara umum seperti halnya pada masa Orde Baru dan setelah tumbangnya. Akan tetapi, sebagaimana pengertian paling 'primitif'-nya, sebuah perkumpulan manusia dibentuk untuk mengantisipasi ancaman dari luar kelompoknya dan menetapkan kebermanfaatannya bagi khalayak umum. Pers mahasiswa perlu terus melakukan pembacaan atas 'ancaman-ancaman' yang sedang dan berpotensi mengganggu kepentingan khalayak umum dengan mempertimbangkan posisinya di tengah publik, berada di luar dan melayani publik atau di dalam dan ikut bertahan melewati krisis bersama-sama.

Merespons situasi yang sedang berlangsung dewasa ini, tidak hanya wabah, melainkan juga 'ancaman-ancaman' lainnya di kemudian hari demi prinsip 'kebermanfaatan' pers mahasiswa kepada publik secara luas, saya hendak mengulang pertanyaan yang sama dalam beberapa waktu belakangan ini, perlukah diadakan kembali sarasehan pers mahasiswa? **[Penjaga Dapur]**

Catatan Akhir

[1] M. Lubabun Ni'am Asshibbamal dan Achmad Choirudin, "Memancang Tonggak 'Community Press-Online," *Balkon Spesial: Terusik Tanda-Tanda Zaman* (2010): 84–86

[2] Hasan Bachtiar, "Bekerja dengan detail, Mengapa Jurnal BALAIRUNG?"*Jurnal Balairung* (No. 34/XVI/2001): 179.

[3] Bachtiar memberikan ilustrasi menarik mengenai 'keresahan dalam tubuh Balairung' pasca 1998 yang memantik diselenggarakannya sarasehan pers mahasiswa se-Jawa dan Bali, bahwa pers mahasiswa "tak bersungguh-sungguh untuk bekerja dengan tatanan dan logika pers umum ... Sedangkan pada saat yang lain, para awak persma mengklaim dirinya sebagai bagian dari pergerakan politik mahasiswa. Namun, ketika terjadi penggebukan aksi mahasiswa oleh militer, misalnya, awak persma mengaku justru sebagai 'wartawan mahasiswa'," Hasan Bachtiar, "Bekerja dengan Detail" *Jurnal Balairung Edisi 34/XVI/2001: Scipta Manen*: 180–181.

[4] Alexandria Neason. "In a pandemic, what is essential journalism?" Columbia Journalism Review. 2 April 2020. https://www.cjr.org/analysis/essential-reporting-and-analysis-amid-pandemic.php diakses pada 12 Juni 2020.

HEMAT AIR

Hihihi... Hihihi~ Dingin~ Hehe...

Heh, Iyik! Kamu jangan buang-buang air! Kamu gak tau lagi susah air? Mau mandi gak pake air?
Eng... Engga Bu. Maaf Bu

Saat dewasa...
Kalo saya terpilih, Desa ini akan saya jadikan Pusat bla... bla... dan tiap Keluarga akan mendapat bla... bla... bla...
Waah... Keren... Inovatif...
PILIH No 2,5

Heh, Pak! Hemat air, Pak! Jangan buang-buang air liur buat cuap-cuap boongin rakyat!
Haha... Haha... Waah...
PILIH No 2,5
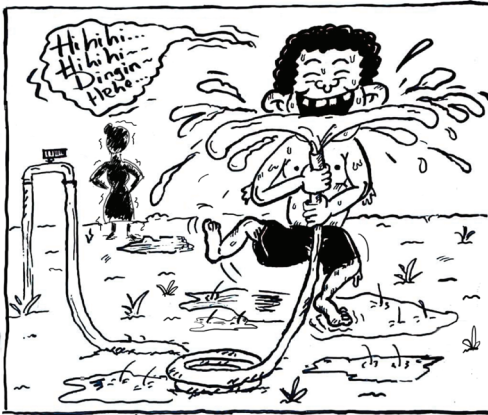
Diklat Jurnalistik Mahasiswa Tingkat Lanjut Ke-2 Tahun 1991 BPPM Balairung UGM

TIMPANG

© Haifa/BAL

PASANG IKLAN YUK..!

Mau bisnismu dikenal se-UGM, Yogyakarta, atau bahkan seantero Indonesia?

Serahkan saja kepada kami!

Iklan dapat dalam bentuk:

Iklan | Media Partner | Advertorial

SKEMA

1. FOTO PRODUK/ JASA YANG INGIN DIIKLANKAN
2. BUAT CAPTION SINGKAT MENARIK
3. HUBUNGI KONTAK BALAIRUNGPRESS
4. BAYAR JASA DAN TANDA TANGANI PERJANJIAN KERJA SAMA
5. IKLAN ANDA SIAP TERBIT

Kompleks Perumahan Dosen UGM

Jalan Kembang Merak B21, Bulaksumur, Caturtunggal, Depok, Sleman

BANK ISU BPPM

adalah sebuah upaya aktif Balairung untuk menampung kegelisahan publik. Bentuk-bentuk kegelisahan dapat berupa isu-isu yang sedang berkembang khususnya di Universitas Gadjah Mada (UGM) dan umumnya di Yogyakarta.

Bank Isu diperuntukkan bagi siapa saja yang hendak mengusulkan isu atau fenomena tertentu di UGM dan/atau di Yogyakarta. Hadirnya Bank Isu diharapkan dapat menjadi medium bagi Balairung untuk memberitakan isu-isu yang berasal langsung dari publik dan untuk publik.

Skema

1. Mengusulkan Isu
2. Kurasi oleh Redaktur
3. Mengontak kembali pengusul isu
4. Reportase

Kontak Redaktur Isu

Line: Ayu (ayunurfaizah)
WA: Rizal (085722106879)

ugm.id/bankisubalairung